RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

JAWA TIMUR



RPJPD 2025 2045

GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa pembangunan daerah bertujuan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional serta meningkatkan hasil pembangunan daerah bagi masyarakat secara adil dan merata dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa untuk keberlangsungan penyelenggaraan pembangunan daerah dan keberlanjutan pembangunan sebelumnya serta untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, perlu disusun rencana pembangunan jangka panjang daerah yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah;

c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dan untuk keberlanjutan pengaturan mengenai rencana pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Jawa Timur, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025, perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

8. Peraturan . . .

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 123);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

dan

GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2025-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II . . .

BAB II
RPJPD

Pasal 2

(1) RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok Pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah.
(2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon Gubernur.

BAB III
TATA CARA PERENCANAAN

Pasal 3

Perencanaan Pembangunan Daerah berorientasi pada proses, dengan menggunakan pendekatan:
a. politik;
b. teknokratik;
c. partisipatif;
d. atas bawah (*top-down*); dan
e. bawah atas (*bottom-up*).

Pasal 4

Perencanaan Pembangunan Daerah berorientasi pada substansi, dengan menggunakan pendekatan:
a. holistik-tematik;
b. integratif; dan
c. spasial.

BAB IV
SISTEMATIKA

Pasal 5

(1) Sistematika RPJPD, meliputi:
    a. Bab I : Pendahuluan;
    b. Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
    c. Bab III : Permasalahan dan Isu Strategis;
    d. Bab IV : Visi dan Misi Daerah;
    e. Bab V : Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok; dan
    f. Bab VI : Penutup.
(2) Isi beserta uraian sistematika RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V . . .

BAB V
PELAKSANAAN RPJPD

Pasal 6

(1) RPJPD Provinsi sebagai pedoman penyusunan:
    a. RPJMD Provinsi untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun, khususnya arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD; dan
    b. RPJPD Kabupaten/Kota.
(2) RPJMD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD Provinsi.
(3) RPJPD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

(1) Pemerintah Provinsi melakukan pengendalian danevaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD melalui pengendalian jangka menengah dan jangka pendek.
(2) Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan perencanaan melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD.
(3) RPJPD Provinsi dapat dievaluasi kembali setiap 5 (lima) tahun.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai RPJPD Provinsi Jawa Timur tahun 2025 dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 17 September 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TIMUR,

ADHY KARYONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 17 September 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

BOBBY SOEMIARSONO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 4 SERI D.

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PENJANG DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2025-2045: (3-187/2024).

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2025-2045

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 ditetapkan sesuai amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa RPJPD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir. RPJPD Provinsi Jawa Timur periode sebelumnya berakhir pada tahun 2025 sebagaimana Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025.

RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043.

RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 disusun dengan mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 600.1/176/SJ Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, yang selanjutnya dimutakhirkan pada SEB Nomor 600.2.1/3674/SJ Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemutakhiran Sasaran Pembangunan Provinsi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. Ketentuan Inmendagri Nomor 1 Tahun 2024 dimaksud memuat tentang tahapan penyusunan dokumen dan ketentuan mengenai sistematika dokumen RPJPD, sedangkan SEB Nomor 1 Tahun 2024 memuat mengenai penyelarasan Visi, Sasaran Visi, Misi, Arah Kebijakan, dan Arah Pembangunan, beserta indikator dan target 2025 hingga target 2045 pada masing-masing daerah.

RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 disusun dalam rangka mewujudkan Pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mendukung terwujudnya Visi Indonesia Emas 2045, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan, serta disusun berdasarkan kaidah dan pendekatan sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu:

1. Pendekatan teknokratis, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
2. Pendekatan partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
3. Pendekatan politis, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD; dan
4. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan Negara Indonesia yang Berkelanjutan penyusunan RPJPD Provinsi Jawa Timur juga turut mempertimbangkan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk melakukan integrasi terhadap arah kebijakan umum pada Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) termasuk juga arah kebijakan umum pada Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2045 yang menitikberatkan pada keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045, adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 123);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) salah satu tujuannya mengamanatkan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

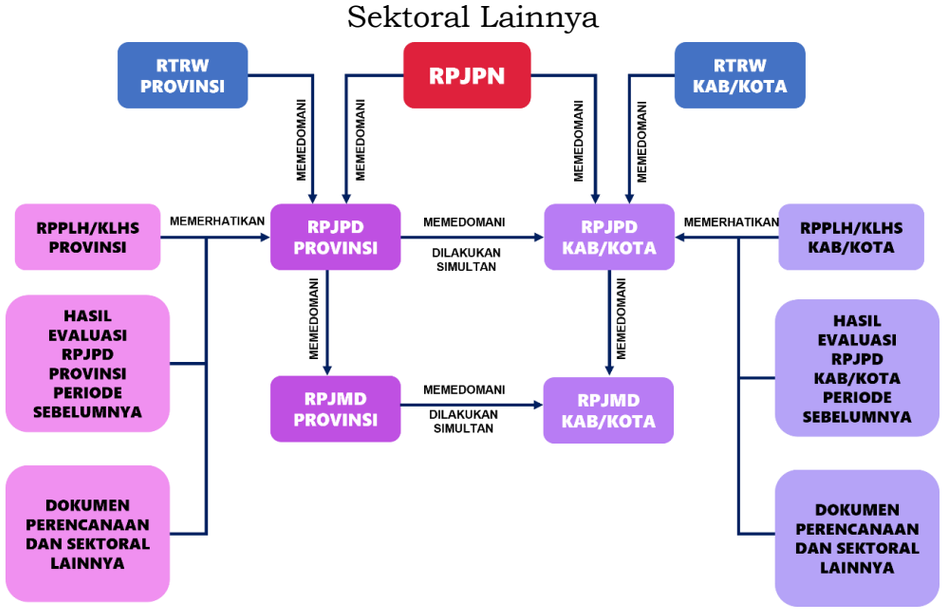
Oleh karena itu dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang memberi acuan mengenai struktur dan pola ruang agar dalam pencapaian visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun agar selaras dengan atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW, serta penyelarasan RPJPN.

Selain memperhatikan RTRW, penyusunan RPJPD juga harus memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Hal ini bertujuan agar dapat tercipta keselarasan antara arah kebijakan sasaran pokok daerah dengan kaidah pembangunan berkelanjutan, sehingga mampu mengelola potensi yang menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

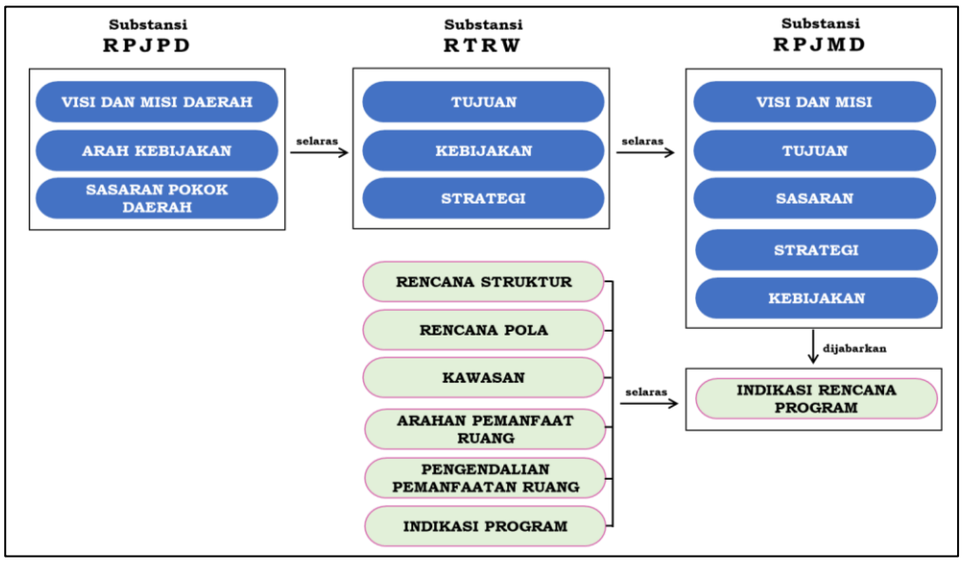
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam pelaksanaannya mempedomani sasaran pokok RPJPD dalam rangka penyelarasan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah Daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka Panjang Daerah periode berkenaan yang merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah, dan dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yaitu dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun disusun dengan berpedoman pada RPJMD yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

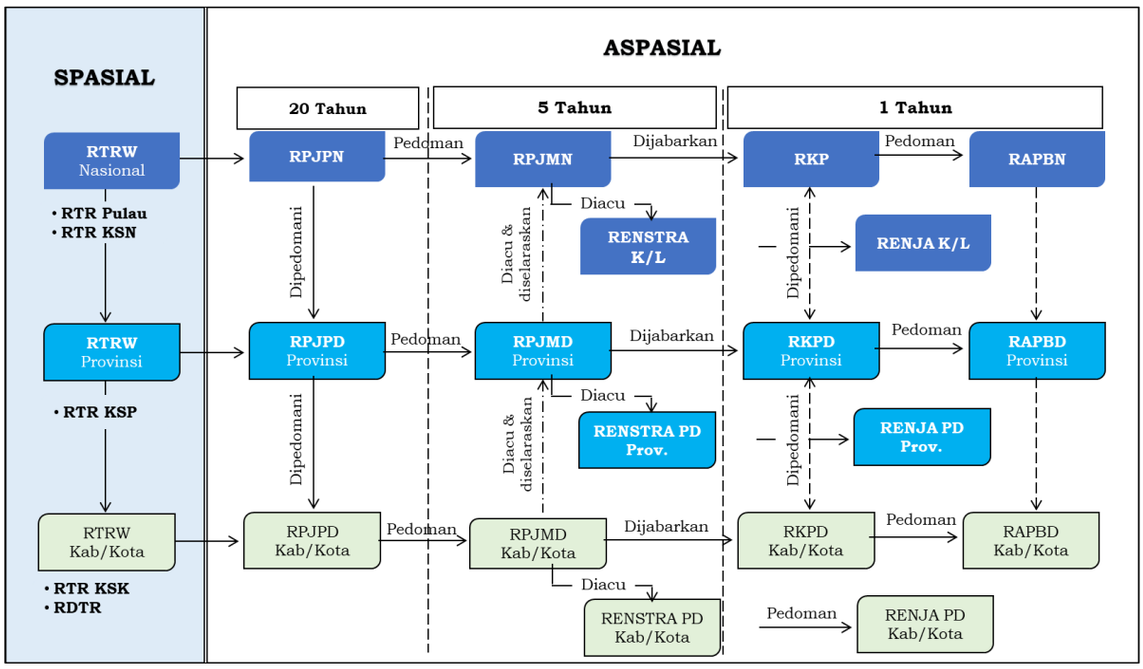
Gambar 1. 1 Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya



Gambar 1. 2 Penyelarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan RTRW



Gambar 1. 3 Sinkronisasi, Integrasi Perencanaan Penganggaran



1.4. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan sesuai dengan visi, misi, arah kebijakan, serta sasaran pokok pembangunan daerah yang telah disepakati dalam program pembangunan daerah yang terpadu, fokus, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah:

1) Memberikan arah dan pedoman pelaksanaan pembangunan di Provinsi Jawa Timur 20 (dua puluh) tahun mendatang;
2) Mewujudkan keselarasan arah kebijakan sasaran pokok Pembangunan daerah sesuai dengan kaidah pembangunan berkelanjutan;
3) Mewujudkan Pembangunan daerah yang terintegrasi dan bersinergi baik antardaerah, antarwaktu, antarfungsi pemerintahan.

1.5. Sistematika Penulisan

RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2045 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika

Bab II : Gambaran Umum dan Kondisi Daerah

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Geografi

Memuat peran strategis daerah, potensi sumber daya alam serta gambaran kualitas lingkungan hidup dan kebencanaan termasuk ancaman perubahan iklim.

2.1.2 Demografi

Menjelaskan karakteristik demografi daerah.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Menjelaskan karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif ekonomi.

2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

Menjelaskan karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif sosial budaya.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Menjelaskan kondisi tata kelola pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan umum baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

Menjelaskan sektor unggulan daerah yang menjadi penopang perekonomian dan sektor lainnya yang potensial untuk dikembangkan.

2.4.2 Daya Saing SDM

Menjelaskan kondisi SDM sebagai salah satu faktor penggerak perekonomian daerah.

2.4.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

Menjelaskan kondisi fasilitas/infrastruktur di daerah.

2.4.4 Daya Saing Iklim Investasi

Menjelaskan kondisi iklim investasi di daerah dari aspek kemudahan berinvestasi, situasi politik serta keamanan dan ketertiban daerah.

2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

Menyajikan hasil capaian pembangunan dan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 untuk penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 termasuk Kinerja RTRW dan Rencana Sektoral dalam dokumen perencanaan daerah.

2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

Menjelaskan dinamika kependudukan yang harus diperhatikan untuk dilayani dan dipenuhi kebutuhan sarana prasarana oleh pemerintah daerah, diantaranya memuat:

2.6.1 Analisis Proyeksi Kependudukan

Analisis proyeksi kependudukan per lima tahun sampai dengan Tahun 2045 yang meliputi perkembangan jumlah penduduk, distribusi penduduk, bonus demografi, dan penduduk usia tua.

2.6.2. Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana Dan Prasarana

Analisis proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana per lima tahun sampai dengan Tahun 2045 berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dari Kementerian/ Lembaga (K/L) terkait. Kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik dimaksud meliputi: rumah/tempat tinggal dan permukiman, air bersih, energi/listrik, persampahan, kesehatan, dan pendidikan.

2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Menjelaskan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan indikasi program/proyek strategis yang dapat mempengaruhi perkembangan daerah.

Bab III : Permasalahan dan Isu Strategis

3.1. Permasalahan

Memuat tentang permasalahan utama yang merupakan faktor penghambat yang mengikat dan apabila ditangani dapat melepaskan potensi daerah yang tertahan secara signifikan, yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.

3.2. Isu strategis daerah

Memuat kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Lebih jauh, bagian ini menguraikan isu-isu strategis daerah yang

berdampak luas dan memiliki konsekuensi jauh ke depan yang berpotensi menimbulkan kerusakan dan biaya yang makin besar.

Bab IV : Visi dan Misi Daerah

Pada bab ini menjabarkan visi, 5 (lima) sasaran visi, dan 8 (delapan) misi pembangunan daerah. Penjabaran hal-hal tersebut dilakukan dengan masing-masing merujuk pada muatan RPJPN untuk menunjukkan konsistensi dan sinkronisasi antara muatan dokumen perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi.

4.1. Visi

4.2. Sasaran Visi

Sasaran Visi mengikuti jumlah 5 (lima) Sasaran Visi pada RPJPN yang telah disesuaikan dengan karakteristik daerah

4.3. Misi

Misi mengikuti jumlah 8 (delapan) misi pada RPJPN yang telah disesuaikan dengan karakteristik daerah

Bab V : Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok

5.1 Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang disusun dengan kerangka kerja Pembangunan per lima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah. Pentahapan per lima tahun mengacu pada tahap dan tematik Pembangunan dalam RPJPN Tahun 2025-2045 yang disesuaikan dengan karakteristik daerah.

5.2 Sasaran Pokok

Sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan gambaran kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan secara langsung terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025-2045.

5.2.1 Arah Pembangunan Daerah

Arah Pembangunan Daerah merupakan strategi daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan Pembangunan nasional jangka panjang yang sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah.

5.2.2 Arah Kebijakan Transformasi

Arah kebijakan menggambarkan upaya transformasi penurunan dari RPJPN 2025-2045 untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional serta menggambarkan upaya transformasi yang spesifik dengan kebutuhan/karakteristik daerah dan mendukung tercapainya visi daerah. Arah kebijakan mengacu pada Buku II Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional penyelarasan RPJPD dengan RPJPN bagian III terkait dengan Arah Kebijakan Transformasi menurut Provinsi dan ditambahkan dengan analisis kebutuhan daerah.

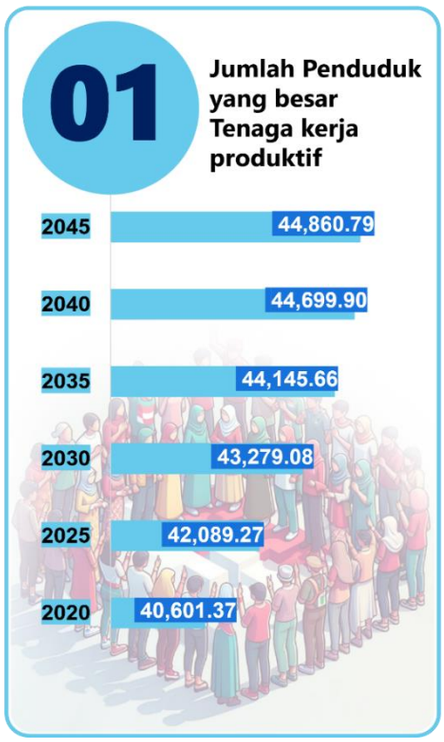
5.2.3 Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan Daerah

Indikator Utama Pembangunan Daerah merupakan alat ukur untuk melihat pencapaian dari tujuan pembangunan daerah serta kontribusi terhadap tujuan pembangunan nasional jangka panjang. Indikator Utama Pembangunan Daerah berjumlah 45 (empat puluh lima) indikator, selaras dengan RPJPN Tahun 2025-2045.

Bab VI : Penutup

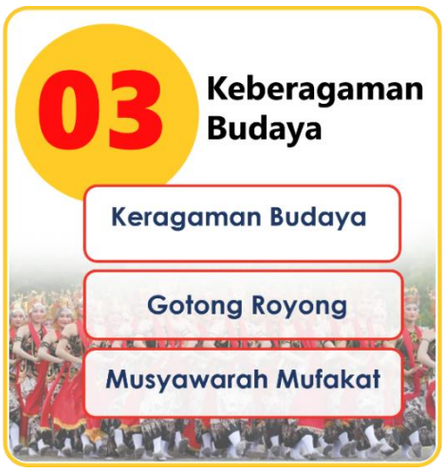
Memuat tentang kaidah pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan, diantaranya melalui konsistensi perencanaan dan pendanaan, sistem insentif, kerangka pengendalian, termasuk pengendalian dan evaluasi pembangunan dan manajemen risiko, mekanisme perubahan, komunikasi publik, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor nonpublik, dan manajemen investasi sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah.

MODAL DASAR PEMBANGUNAN JAWA TIMUR

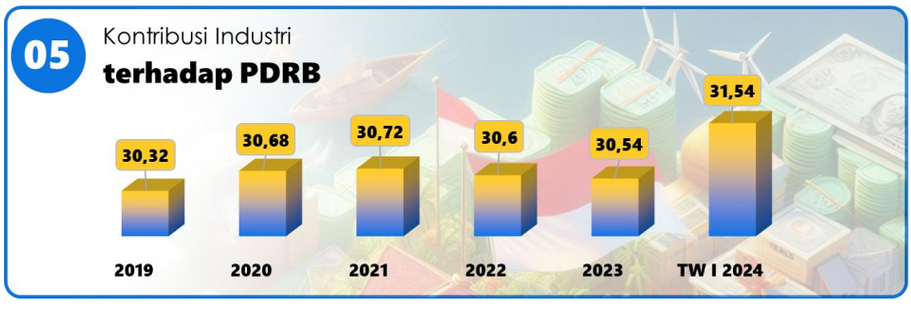












BAB II
GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Geografi

2.1.1.1 Luas Wilayah Administrasi

Provinsi Jawa Timur memiliki luas wilayah darat 48.036,84 Km2 yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota yang mempunyai 666 Kecamatan dengan 773 Kelurahan dan 7.721 Desa. Secara astronomis, Provinsi Jawa Timur terletak pada 110° 50’ 28.520” hingga 116° 28’ 17.156” Bujur Timur dan 4° 50’ 30.680” hingga 8° 58’ 52.699” Lintang Selatan dan memiliki memiliki wilayah kepulauan yang terdiri dari pulau bernama sebanyak 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) pulau.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 bahwa Wilayah administrasi Provinsi kurang lebih seluas 10.044.208 (sepuluh juta empat puluh empat ribu dua ratus delapan) hektar (termasuk wilayah darat dan laut).

Jumlah kecamatan dan desa Kabupaten/Kota se-Jawa Timur dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

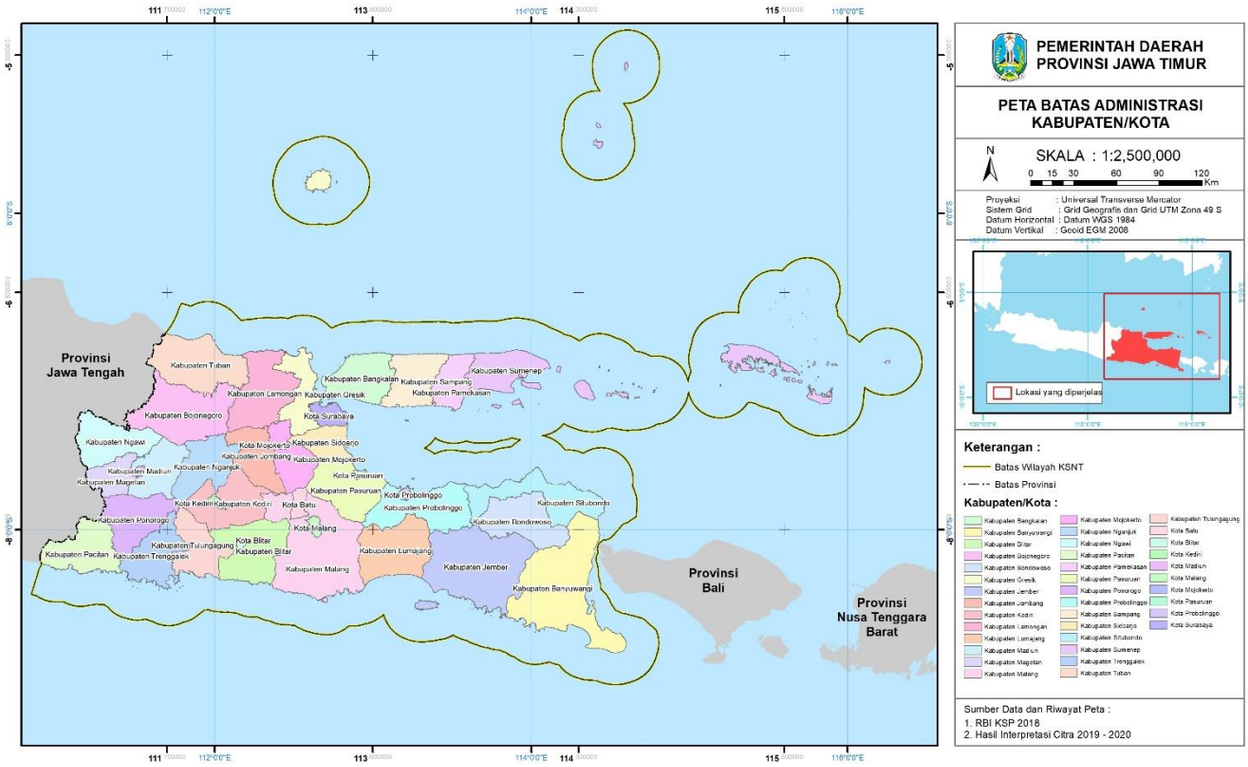
Tabel 2. 1 Jumlah Kecamatan dan Desa Kabupaten/Kota se-Jawa Timur

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Kelurahan/Desa			Luas Wilayah (Km^2)
			Kelurahan	Desa	Jumlah	
1	Kab. Pacitan	12	5	167	172	1.433,59
2	Kab. Ponorogo	21	26	281	307	1.418,62
3	Kab. Trenggalek	14	5	152	157	1.249,23
4	Kab. Tulungagung	19	14	257	271	1.144,53
5	Kab. Blitar	22	28	220	248	1.745,16
6	Kab. Kediri	26	1	343	344	1.523,56
7	Kab. Malang	33	12	378	390	3.473,44
8	Kab. Lumajang	21	7	198	205	1.797,10
9	Kab. Jember	31	22	226	248	3.313,46
10	Kab. Banyuwangi	25	28	189	217	3.592,90
11	Kab. Bondowoso	23	10	209	219	1.554,99
12	Kab. Situbondo	17	4	132	136	1.653,72
13	Kab. Probolinggo	24	5	325	330	1.724,51
14	Kab. Pasuruan	24	24	341	365	1.493,29
15	Kab. Sidoarjo	18	28	318	346	724,04
16	Kab. Mojokerto	18	5	299	304	984,64
17	Kab. Jombang	21	4	302	306	1.109,84
18	Kab. Nganjuk	20	20	264	284	1.289,07
19	Kab. Madiun	15	8	198	206	1.113,63
20	Kab. Magetan	18	28	207	235	706,44
21	Kab. Ngawi	19	4	213	217	1.395,80
22	Kab. Bojonegoro	28	11	419	430	2.312,63
23	Kab. Tuban	20	17	311	328	1.973,50
24	Kab. Lamongan	27	12	462	474	1.752,71
25	Kab. Gresik	18	26	330	356	1.256,36
26	Kab. Bangkalan	18	8	273	281	1.301,03
27	Kab. Sampang	14	6	180	186	1.228,25
28	Kab. Pamekasan	13	11	178	189	795,15

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Kelurahan/Desa			Luas Wilayah (Km^2)
			Kelurahan	Desa	Jumlah	
29	Kab. Sumenep	27	4	330	334	2.084,02
30	Kota Kediri	3	46	0	46	67,23
31	Kota Blitar	3	21	0	21	33,20
32	Kota Malang	5	57	0	57	111,08
33	Kota Probolinggo	5	29	0	29	54,68
34	Kota Pasuruan	4	34	0	34	39,00
35	Kota Mojokerto	3	18	0	18	20,22
36	Kota Madiun	3	27	0	27	36,13
37	Kota Surabaya	31	153	0	153	335,93
38	Kota Batu	3	5	19	24	194,17
Total		666	773	7.721	8.494	48.036,84

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau

Gambar 2. 1 Wilayah Administrasi Provinsi Jawa Timur



2.1.1.2 Kondisi Penggunaan Lahan

Penggunaan Lahan merupakan peruntukan ruang di lapangan, dimana penggunaan lahan di lapangan terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Penggunaan lahan diidentifikasi dengan melakukan pengolahan interpretasi dari data peta dari citra satelit SPOT 6/7 Tahun 2019-2020. Penggunaan lahan berbeda dengan rencana peruntukan ruang atau pola ruang yang ditetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur. Profil penggunaan lahan menggunakan jenis tutupan lahan yang selanjutnya diklasifikasikan menjadi hutan, lahan terbangun, lahan terbuka alami/semi alami, laut, padang rumput, perairan tergenang, perkebunan/kebun, pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, semak belukar dan sungai, sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.2.

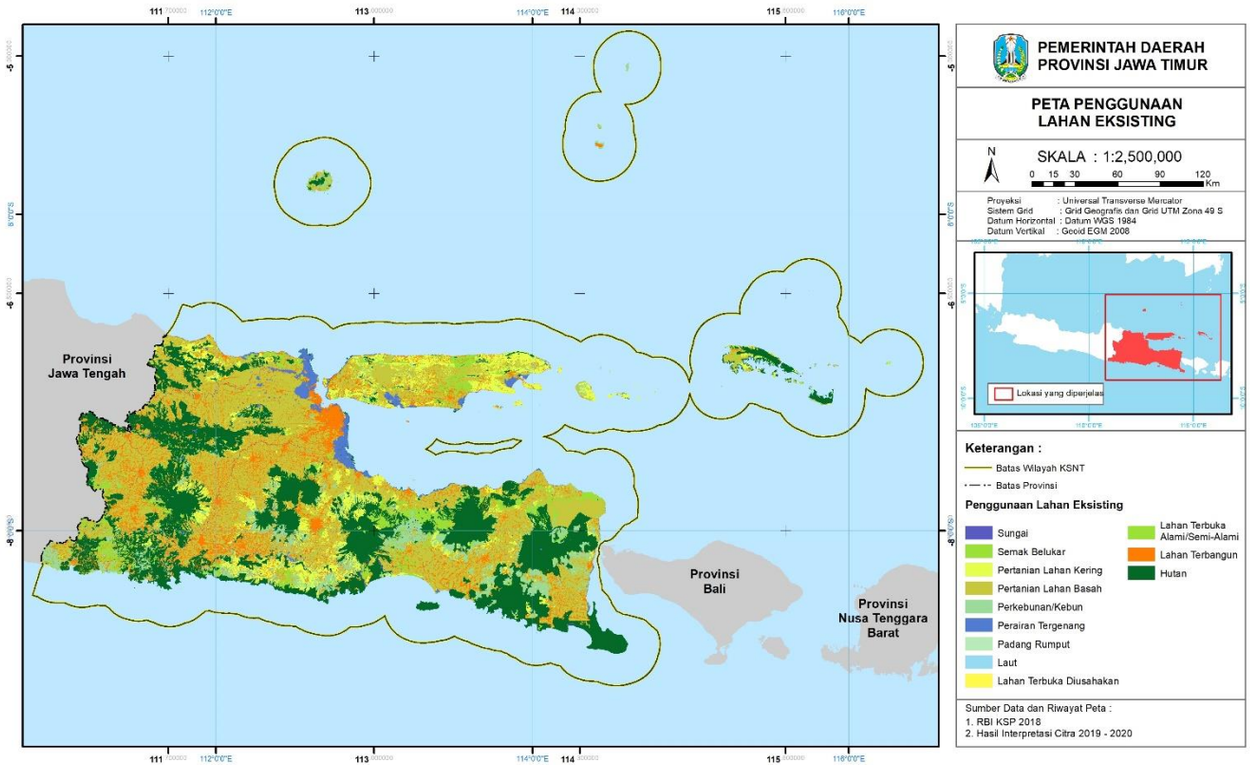
Tabel 2. 2 Alokasi dan Persentase Tutupan Lahan Jawa Timur

No	Tutupan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Hutan	1.361.995,52	28,35
2	Lahan Terbangun	618.297,29	12,87
3	Lahan Terbuka Alami/Semi Alami	20.859,74	0,43
4	Lahan Terbuka Diusahakan	1.606,95	0,03
5	Laut	13,86	0,00
6	Padang Rumput	112,46	0,00
7	Perairan Tergenang	99.306,38	2,07
8	Perkebunan/Kebun	344.827,08	7,18
9	Pertanian Lahan Basah	1.650.996,22	34,37
10	Pertanian Lahan Kering	422.138,71	8,79
11	Semak Belukar	265.798,96	5,53
12	Sungai	17.901,81	0,37
TOTAL		4.803.854,98	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data Peta Citra SPOT 6/7 Tahun 2019-2021

Berdasarkan interpretasi citra satelit, tutupan lahan Jawa Timur didominasi oleh Pertanian yang memiliki proporsi terbesar yaitu sebesar 43,16% dari luas wilayah keseluruhan Jawa Timur. Hal ini menjadi dasar Jawa Timur menjadi Provinsi dengan potensi pengembangan wilayah berbasis pertanian/agropolitan. Selanjutnya penggunaan lahan terbesar kedua adalah peruntukan kawasan hutan yaitu sebesar 28,35%, kemudian diikuti dengan proporsi penggunaan lahan permukiman yang merupakan indikasi perkembangan kawasan terbangun di Jawa Timur.

Gambar 2. 2 Penggunaan Lahan Eksisting Jawa Timur



Sumber: Hasil Pengolahan Data Peta Citra SPOT 6/7 Tahun 2019-2021

Berdasarkan peta penggunaan lahan Tahun 2021 yang diupdate dengan penggunaan lahan tahun 2022 sebagaimana tergambarkan dalam Gambar 2.1,

kawasan lahan terbangun paling besar terdapat di Kota Surabaya sebagai ibukota Provinsi Jawa Timur serta kawasan sekitarnya dengan mengikuti perkembangan jaringan jalan (radial). Pembangunan jaringan jalan sebagai ujung tombak dari aksesibilitas kawasan pusat perkotaan di sekitarnya terutama di Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan hingga Kota Malang. Peta dimaksud juga menggambarkan adanya kawasan hutan yang cukup rata tersebar di bagian selatan Jawa Timur.

2.1.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah

Rencana struktur wilayah provinsi adalah rencana sistem susunan pusat-pusat permukiman (sistem perkotaan wilayah provinsi yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya) dan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala provinsi dan mengintegrasikan wilayah provinsi. Sistem perkotaan wilayah tersebut di atas dapat berupa pusat perekonomian, rencana kota baru, simpul ekonomi baru dan/atau koridor ekonomi baru yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan ruang, keberlanjutan pembangunan dan ketahanan masyarakat. Kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya merupakan wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Sistem perkotaan di wilayah Provinsi Jawa Timur terdiri dari:

- Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yaitu Kawasan Perkotaan Gresik, Bangkalan, Lamongan, Sidoarjo, Mojokerto, Kota Malang, Kota Mojokerto dan Kota Surabaya;
- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yaitu Kawasan Perkotaan Banyuwangi, Bojonegoro, Jember, Pacitan, Pamekasan, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo; dan
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang terdiri dari pusat kegiatan bagi beberapa kecamatan.

Rencana pola ruang Provinsi Jawa Timur ditekankan pada penanganan dan pengembalian fungsi lindung sementara pada kawasan budi daya dioptimalkan pemanfaatannya dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Sedangkan untuk kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, kegiatan yang dikembangkan diarahkan untuk tidak mengganggu keseimbangan ekosistem pesisir. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 – 2043 telah menetapkan 16,54% Wilayah Provinsi Jawa Timur merupakan Kawasan Lindung sedangkan 83,46% merupakan Kawasan Budidaya.

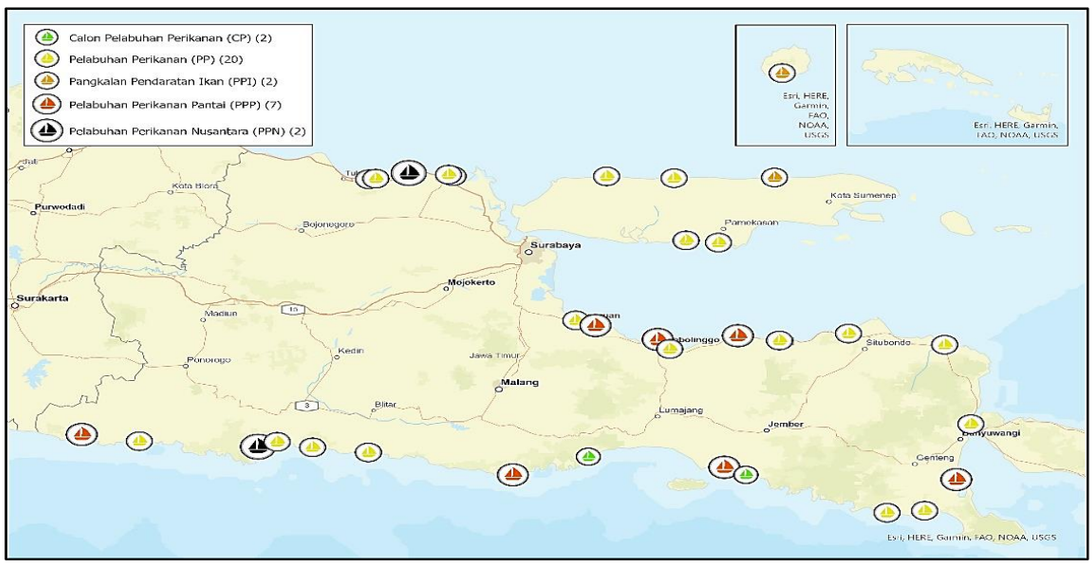
2.1.1.4 Potensi Sumber Daya Alam

1. Potensi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Sebagaimana uraian sebelumnya, bahwa tutupan lahan Jawa Timur didominasi oleh pertanian sebesar 32,99% dan hutan sebesar 28,39% menunjukkan potensi besar pengembangan Wilayah Jawa Timur berbasis pertanian/agropolitan.

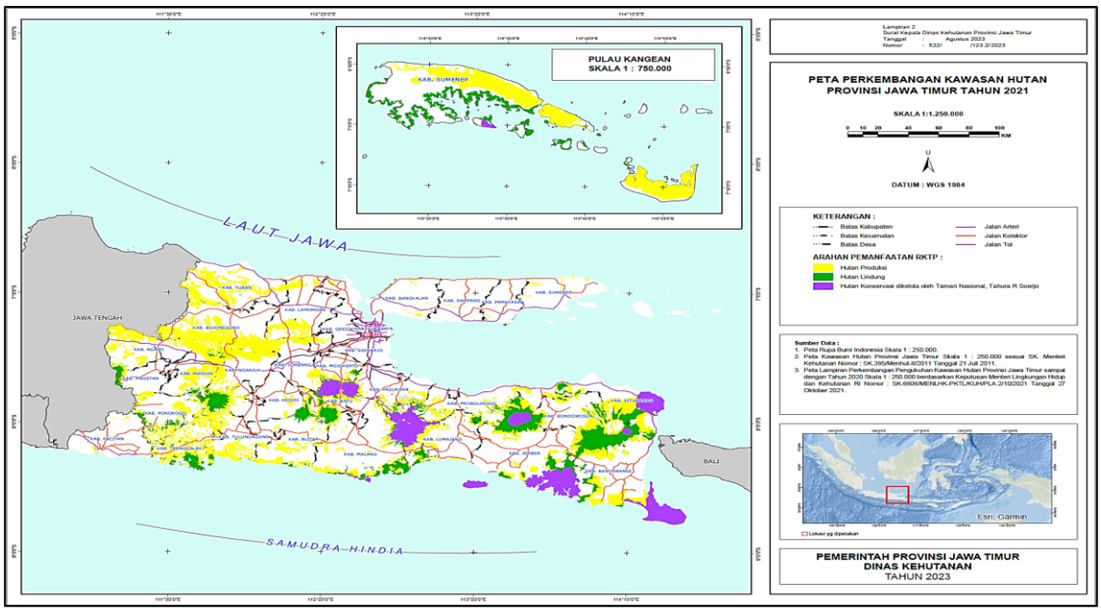
Potensi perikanan Jawa Timur juga amat besar dan dapat digambarkan dari jumlah pelabuhan perikanan di Jawa Timur berdasarkan Kepmen KKP No. 109 Tahun 2021 yang berjumlah 33 (tiga puluh tiga) Pelabuhan Perikanan tersebar di Wilayah Pesisir Jawa Timur.

Gambar 2. 3 Sebaran Pelabuhan Perikanan di Jawa Timur



Sumber: Kepmen KKP No. 109 Tahun 2021

Gambar 2. 4 Peta Kawasan Hutan Provinsi Jawa Timur



Sumber: Dinas kehutanan, sesuai SK. Menteri LHK Nomor 6606/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021

Selanjutnya terkait potensi ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor dan subsektor pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Agro) masih terus tumbuh dan pada tahun 2022 mencapai Rp. 173.638,40 milyar (PDRB ADHK tahun dasar 2010). Adapun demikian berbagai subsektornya terjadi fluktuasi pertumbuhan dan penurunan dari tahun ke tahun. Sedangkan tren kontribusi PDRB (nilai ekonomi) sektor agro masih berfluktuasi tetapi mengalami penurunan signifikan pada subsektor tanaman pangan. Hal ini disebabkan karena laju pertumbuhan

sektor agro tidak secepat laju sektor lain, terutama sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan.

Penurunan ini disebabkan oleh terjadinya alih fungsi lahan, alih komoditas serta dampak dari perubahan iklim. Upaya yang sudah dan akan terus dilakukan antara lain dengan pengendalian alih fungsi lahan dengan mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

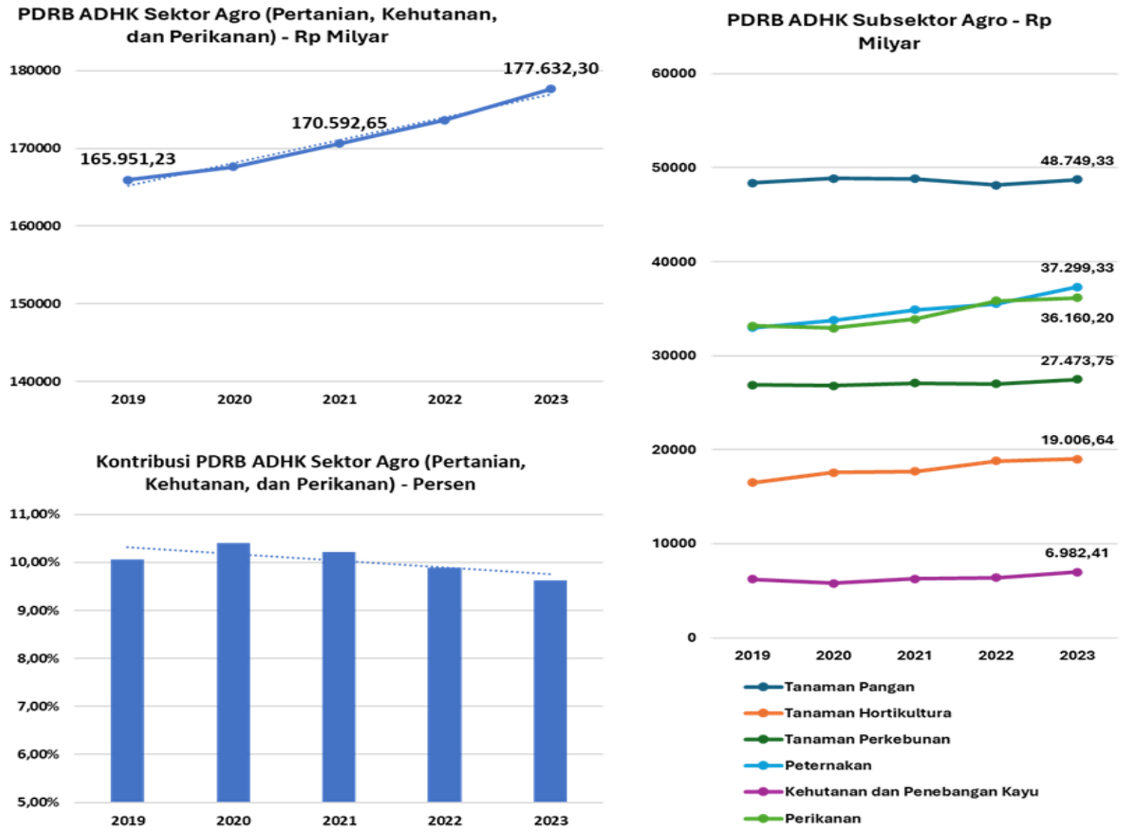
Upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian dalam mengantisipasi perubahan iklim serta tatacara budidaya pertanian yang baik juga terus dilakukan dengan kerjasama dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah juga memberikan fasilitasi alat mesin pertanian untuk mengurangi pengeluaran, meningkatkan pendapatan serta nilai tambah yang diterima oleh petani. Selain itu upaya dalam meningkatkan minat generasi muda untuk terjun dalam dunia pertanian juga terus didorong sebagai solusi keberlangsungan usaha pertanian di Jawa Timur.

Seperti halnya pada komoditas tanaman pangan, upaya-upaya peningkatan kapasitas SDM pertanian, intensifikasi dan rehabilitasi tanaman perkebunan, pengendalian terhadap penyakit menular pada ternak juga terus dan akan dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan dan peternakan.

Di sektor perikanan, meskipun mengalami kontraksi selama tiga tahun berturut-turut (2018-2020), subsektor ini pulih dengan pertumbuhan positif pada 2021 dan 2022. Dalam menjaga dan meningkatkan produksi dan produktivitas sektor perikanan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan fasilitasi bantuan alat produksi dan peralatan tangkap bagi nelayan, peningkatan kapasitas SDM nelayan serta pembudidaya ikan melalui bimbingan dan pelatihan.

Subsektor kehutanan dan penebangan kayu mengalami fluktuasi dengan kontraksi terdalam pada tahun 2016 dan 2020, tetapi nilai absolut PDRB ADHB cenderung meningkat, terutama dari tahun 2020 hingga 2022. Upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kontribusi sektor kehutanan antara lain dengan pengelolaan hutan produksi yang berkelanjutan, peningkatan kapasitas SDM masyarakat di sekitar hutan untuk menjaga dan mengelola hutan secara berkelanjutan.

Gambar 2. 5 Perkembangan PDRB ADHK (Rp Milyar) dan Kontribusi Sektor dan Subsektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 2019 – 2023

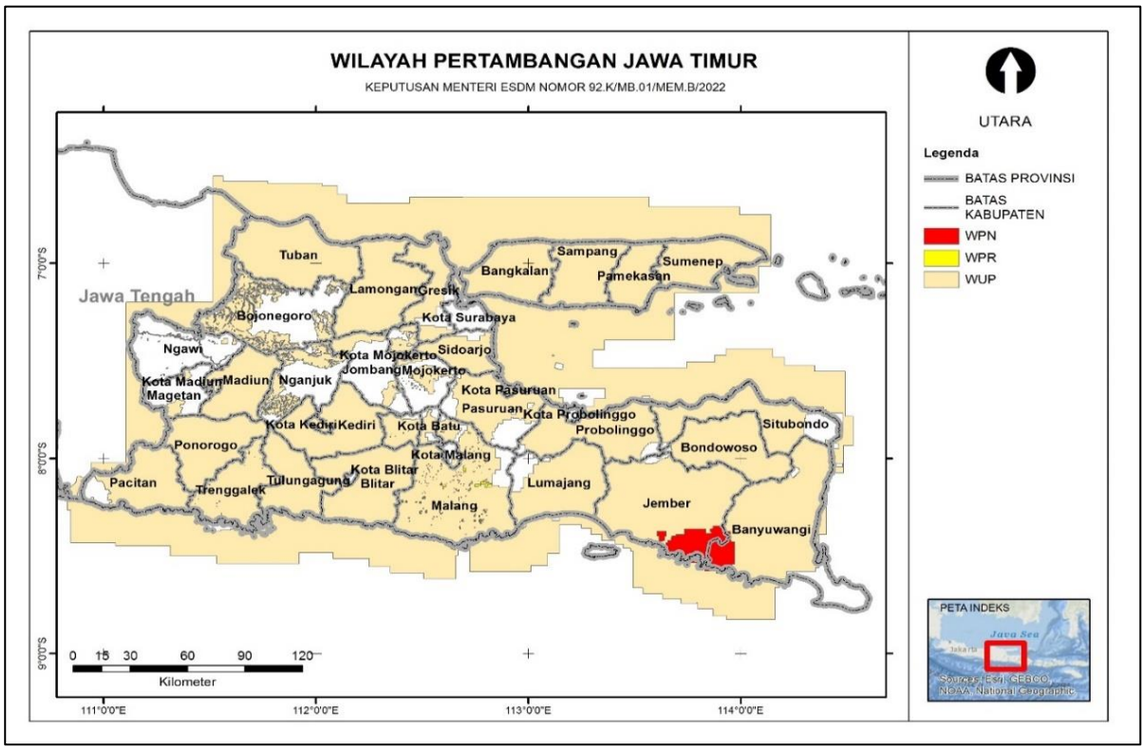


Sumber : BPS Jatim, 2024

2. Potensi Pertambangan

Potensi pertambangan di Jawa Timur tersebar di beberapa Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), yaitu: WUP Batubara yang meliputi wilayah Trenggalek, Pacitan dan Tulungagung; WUP Logam yang meliputi wilayah Banyuwangi, Jember, Lumajang, Malang, Trenggalek, Tulungagung dan Pacitan; sedangkan WUP Non Logam hampir tersebar di seluruh Kabupaten di Jawa Timur yaitu wilayah Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, Malang, Blitar, Tulung-agung, Trenggalek, Ponorogo, Pacitan, Bojonegoro, Nganjuk, Tuban, Jombang, Lamongan, Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep.

Gambar 2. 6 Peta Wilayah Usaha Pertambangan Jawa Timur



Sumber: Keputusan Menteri ESDM No 92.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Jawa Timur

Kawasan pertambangan di Wilayah Provinsi Jawa Timur berada di Wilayah Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jombang, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Tuban, dan Kota Surabaya.

2.1.1.5 Wilayah Rawan Bencana

Secara geografis, Jawa Timur merupakan sebagian wilayah di Indonesia yang rawan bencana dengan dominasi kelompok bencana hidrometeorologi dan kelompok bencana geologi. Kelompok bencana hidrometeorologi yang sering terjadi berupa banjir, gelombang ekstrim, kebakaran lahan dan hutan, kekeringan dan cuaca ekstrim sedangkan untuk kelompok bencana geologi berupa gempa bumi, tanah longsor, letusan gunung api.

Secara klimatologis, pengaruh perubahan iklim seperti fenomena *La Nina* di Jawa Timur yang menjadi fokus kewaspadaan pemerintah dan masyarakat karena potensi bencana seperti angin kencang, hujan badai dan puting beliung cukup besar. Kemudian untuk pengaruh dari fenomena eL Nino di Jawa Timur yang cukup menjadi perhatian untuk mitigasi dan penanggulangan bencananya karena berpotensi seperti bencana kekeringan panjang dan kebakaran hutan dan lahan. Hal ini disebabkan karena Jawa Timur yang merupakan bagian wilayah Indonesia berada di posisi sekitar ekuator yang menjadi tempat pertemuan antara sirkulasi udara *Hadley* dan sirkulasi udara *Walker* sehingga berdampak pada dinamika cuaca dan iklim yang tidak menentu.

1. Tanah Longsor

Berdasarkan hasil Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Jawa Timur Tahun 2022-2026, dalam periode dari Tahun 2010 sampai 2020, Jawa Timur kehilangan 5.370 Ha hutan, menyumbang 11% dari total kehilangan tutupan pohon serta area total hutan primer basah di Jawa Timur berkurang sebanyak 2,3%.

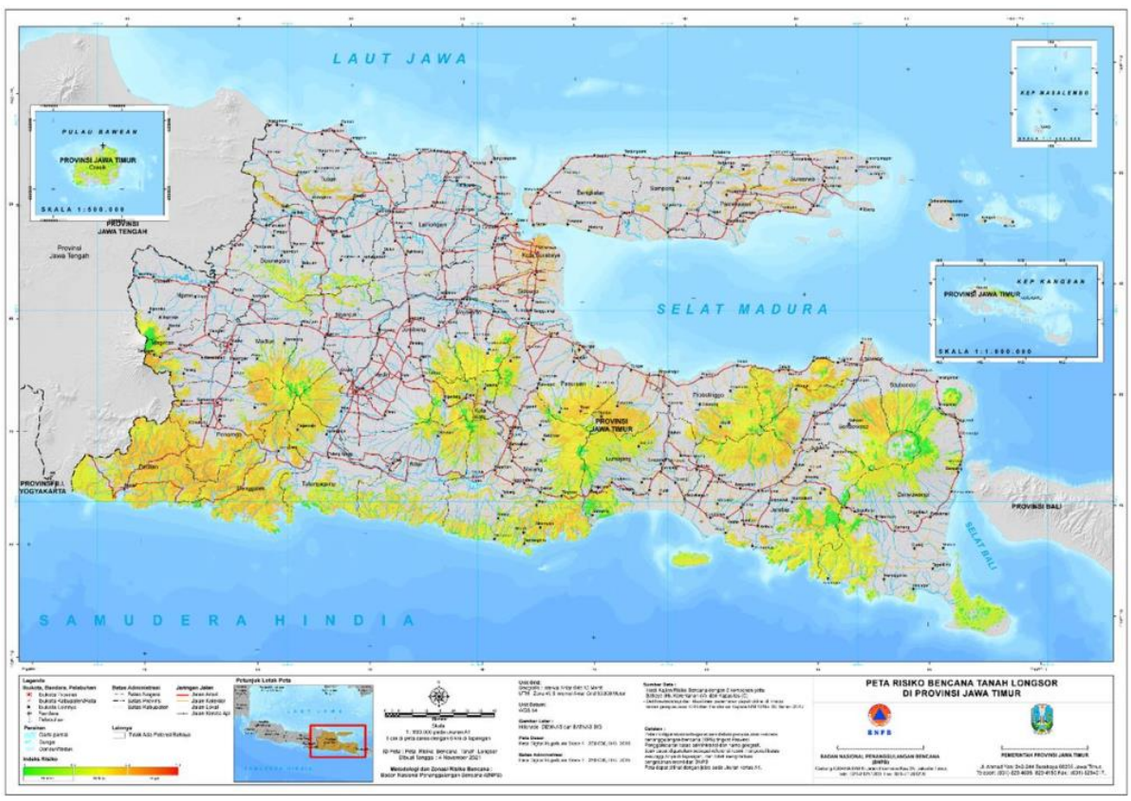
Berdasarkan hasil kajian risiko, yang didapatkan dari komponen kelas bahaya yang dihitung menggunakan data *Digital Elevation Model* (DEM) dan zona gerakan tanah, kelas kerentanan yang dihitung berdasarkan komponen kerentanan sosial, fisik, ekonomi dan lingkungan serta kelas kapasitas yang ditentukan dengan nilai IKD, menjadikan Provinsi Jawa Timur memiliki risiko tinggi terhadap tanah longsor. Tingkat risiko tanah longsor di 31 (tiga puluh satu) Kabupaten Kota di Jawa Timur dirincikan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2. 3 Tingkat Risiko Bencana Tanah Longsor di Provinsi Jawa Timur

No	Kategori	Kabupaten/Kota
1.	Rendah	-
2.	Sedang	Kabupaten Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Kota Kediri dan Kota Malang
3.	Tinggi	Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Kediri, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun, Magetan dan Kota Batu

Sumber: Kajian Risiko Bencana Nasional-Provinsi Jawa Timur Tahun 2022-2026, BNPB, 2021

Gambar 2. 7 Peta Risiko Bencana Tanah Longsor Gelombang Pasang (Gelombang Ekstrim) dan Abrasi



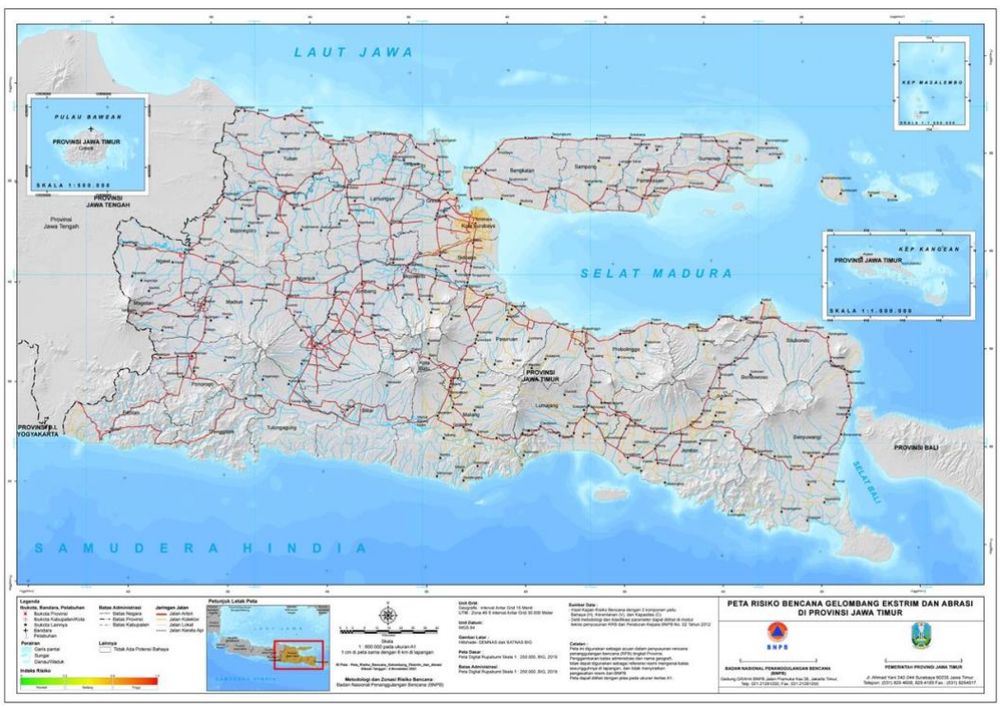
Kelas bahaya bencana gelombang ekstrim dan abrasi ini dipengaruhi oleh kelas bahaya, kelas kerentanan dan kelas kapasitas. Kelas bahaya bencana gelombang ekstrim dan abrasi dihitung menggunakan data DEM, data arus ketinggian gelombang, peta geologi dan peta penutup lahan (peta sawah baku dan area permukiman) serta kelas kerentanan yang terdiri dari kerentanan sosial, politik, ekonomi dan lingkungan. Kondisi tersebut menjadikan Provinsi Jawa Timur memiliki kelas risiko tinggi. Tingkat risiko gelombang ekstrim dan abrasi di 22 Kabupaten Kota di Jawa Timur dirincikan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2. 4 Tingkat Risiko Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Provinsi Jawa Timur

No	Kategori	Kabupaten/Kota
1.	Rendah	Kabupaten Sidoarjo
2.	Sedang	Kabupaten Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Probolinggo, Pasuruan, Tuban, Lamongan, Gresik, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan dan Kota Surabaya
3.	Tinggi	Kabupaten Situbondo

Sumber: Kajian Risiko Bencana Nasional-Provinsi Jawa Timur Tahun 2022-2026, BNPB, 2021

Gambar 2. 8 Peta Risiko Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi



2. Banjir

Berdasarkan hasil Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Jawa Timur Tahun 2022-2026, bencana banjir terjadi di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dengan kelas bahaya dan kerentanan yang beragam. Kelas bahaya risiko bencana banjir dianalisis menggunakan data DEM, peta rawan banjir dan peta morfologi/sistem tanah. Untuk kelas kerentanan dipengaruhi oleh kerentanan sosial, fisik, ekonomi dan lingkungan. Kondisi tersebut menjadikan Provinsi Jawa Timur memiliki kelas risiko tinggi dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2. 5 Tingkat Risiko Bencana Banjir di Provinsi Jawa Timur

No	Kategori	Kabupaten/Kota
1.	Rendah	-
2.	Sedang	Kabupaten Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Kediri, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun, Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kota Surabaya dan Kota Batu
3.	Tinggi	Kabupaten Ponorogo, Malang, Lumajang, Probolinggo, Pasuruan, Sidoarjo, Lamongan, Gresik, Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep

Sumber: Kajian Risiko Bencana Nasional-Provinsi Jawa Timur Tahun 2022-2026, BNPB, 2021

Gambar 2. 9 Gambar Peta Risiko Bencana Banjir



3. Kebakaran Hutan dan Lahan

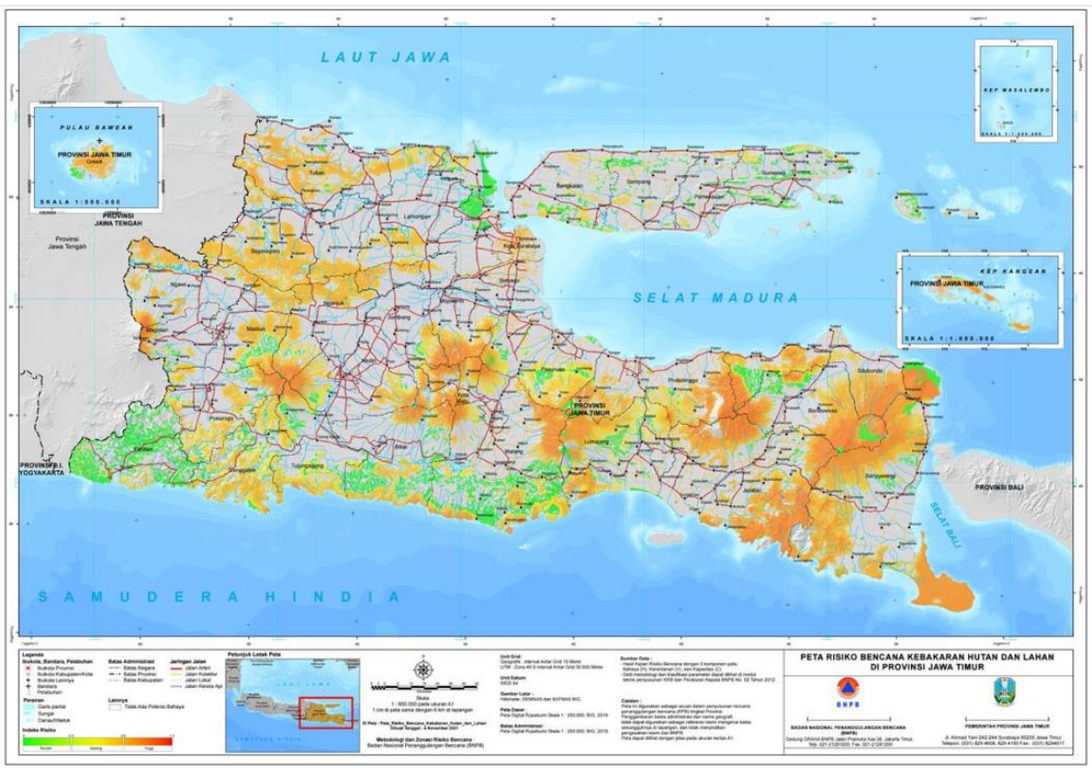
Berdasarkan hasil Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Jawa Timur Tahun 2022-2026, bencana kebakaran hutan dan lahan berpotensi terjadi di 31 (tiga puluh satu) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dengan kelas risiko bervariasi dari rendah, sedang dan tinggi. Kelas risiko kebakaran hutan dan lahan dihitung berdasarkan kelas bahaya, kelas kerentanan dan kelas kapasitas. Kelas bahaya dianalisis menggunakan data berupa peta administrasi, peta area terbakar, DEM, peta penutup lahan, peta jaringan sungai, peta jaringan jalan, peta isohyet curah hujan tahunan dan peta Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan. Klasifikasi tingkat risiko bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jawa Timur disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 6 Tingkat Risiko Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jawa Timur

No	Kategori	Kabupaten/Kota
1.	Rendah	Kabupaten Magetan, Lamongan, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Kota Kediri, Kota Surabaya, dan Kota Batu.
2.	Sedang	Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Jombang, Madiun, Bojonegoro, Tuban, Gresik, dan Sumenep.
3.	Tinggi	Kabupaten Tulungagung, Blitar Kediri, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, Mojokerto, Nganjuk, dan Ngawi.

Sumber: Kajian Risiko Bencana Nasional-Provinsi Jawa Timur Tahun 2022-2026, BNPB, 2021

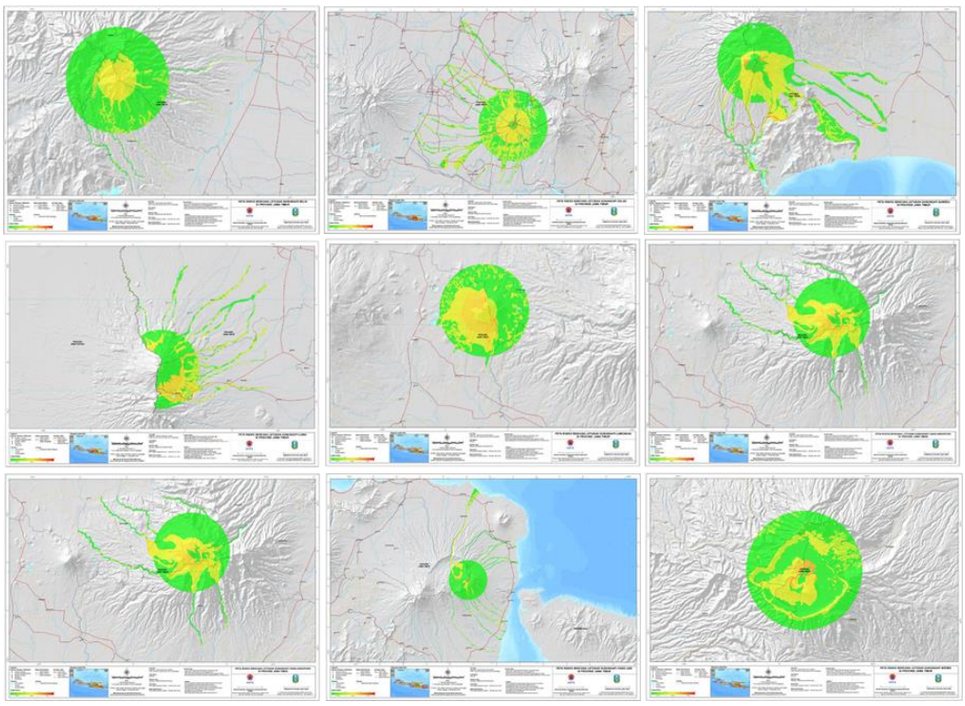
Gambar 2. 10 Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan



4. Letusan Gunung Berapi

Berdasarkan hasil Kajian Resiko Bencana Nasional Provinsi Jawa Timur Tahun 2022-2026, terdapat 10 (sepuluh) risiko bahaya letusan gunung api karena diindikasikan dapat meletus/mengeluarkan lava, asap beracun dan mengeluarkan debu pasir meliputi Gunungapi Ijen, Gunungapi Semeru, Gununapi Bromo, Gunungapi Lamongan, Gunungapi Arjuno-Welirang, Gunungapi Kelud, Gunungapi Raung, Gunungapi Argopuro, Gunungapi Lawu, Gunungapi Wilis.

Gambar 2. 11 Peta Risiko Bencana Letusan Gunung Api



5. Gempa Bumi

Berdasarkan hasil Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Jawa Timur Tahun 2022-2026, bencana gempa bumi berpotensi terjadi di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur termasuk memiliki kelas risiko rendah, sedang dan tinggi. Oleh karena itu, kelas risiko bencana gempa bumi di Provinsi Jawa Timur dikategorikan tinggi dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2. 7 Tingkat Risiko Bencana Gempa Bumi di Provinsi Jawa Timur

No	Kategori	Kabupaten/Kota
1.	Rendah	Kabupaten Tuban, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep dan Kota Pasuruan
2.	Sedang	Kabupaten Pacitan, Kediri, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun, Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Lamongan, Gresik, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kota Surabaya dan Kota Batu
3.	Tinggi	Kabupaten Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang dan Kota Blitar

Sumber: Kajian Risiko Bencana Nasional-Provinsi Jawa Timur Tahun 2022-2026, BNPB, 2021

Gambar 2. 12 Peta Risiko Bencana Gempa Bumi



6. Tsunami

Berdasarkan hasil Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Jawa Timur Tahun 2022-2026, bencana tsunami berpotensi mengancam daerah pesisir di Provinsi Jawa Timur dan memiliki kelas bahaya dan kerentanan tinggi serta kapasitas sedang. Meskipun demikian kelas risiko bencana tsunami di Provinsi Jawa Timur adalah tinggi dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2. 8 Tingkat Risiko Bencana Tsunami di Provinsi Jawa Timur

No	Kategori	Kabupaten/Kota
1.	Rendah	Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Sidoarjo, Lamongan, Gresik, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan dan Kota Surabaya
2.	Sedang	Kabupaten Probolinggo
3.	Tinggi	Kabupaten Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember dan Banyuwangi

Sumber : Kajian Risiko Bencana Nasional-Provinsi Jawa Timur Tahun 2022-2026, BNPB, 2021

Gambar 2. 13 Peta Risiko Bencana Tsunami



7. Kekeringan

Berdasarkan hasil Kajian Resiko Bencana Nasional Provinsi Jawa Timur Tahun 2022-2026, kelas kerentanan bencana kekeringan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tergolong sedang dan tinggi dengan kelas bahaya tinggi dan kelas kapasitas sedang. Kondisi tersebut menjadikan Provinsi Jawa Timur memiliki kelas risiko bencana kekeringan tinggi dengan rincian 34 (tiga puluh empat) kabupaten/kota masuk ke dalam kategori sedang dan sisanya masuk kedalam kategori tinggi. Kabupaten/kota yang masuk kedalam risiko bencana kekeringan tinggi antara lain Kabupaten Banyuwangi, Situbondo, Gresik dan Sumenep.

Gambar 2. 14 Peta Risiko Bencana Kekeringan



8. Banjir Bandang

Berdasarkan hasil Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Jawa Timur Tahun 2022-2026, potensi bencana banjir bandang dapat terjadi pada 28 (dua puluh delapan) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Kelas risiko kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur terdapat pada kelas sedang dan tinggi. Dengan demikian, kelas risiko bencana banjir bandang di Provinsi Jawa Timur adalah tinggi dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2. 9 Tingkat Risiko Bencana Banjir Bandang di Provinsi Jawa Timur

No	Kategori	Kabupaten/Kota
1.	Rendah	-
2.	Sedang	Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Tulungagung, Sidoarjo, Jombang, Nganjuk, Madiun, Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Kota Malang, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto dan Kota Batu
3.	Tinggi	Kabupaten Trenggalek, Blitar, Kediri, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, Mojokerto, Gresik dan Kota Probolinggo

Sumber : Kajian Risiko Bencana Nasional-Provinsi Jawa Timur Tahun 2022-2026, BNPB, 2021

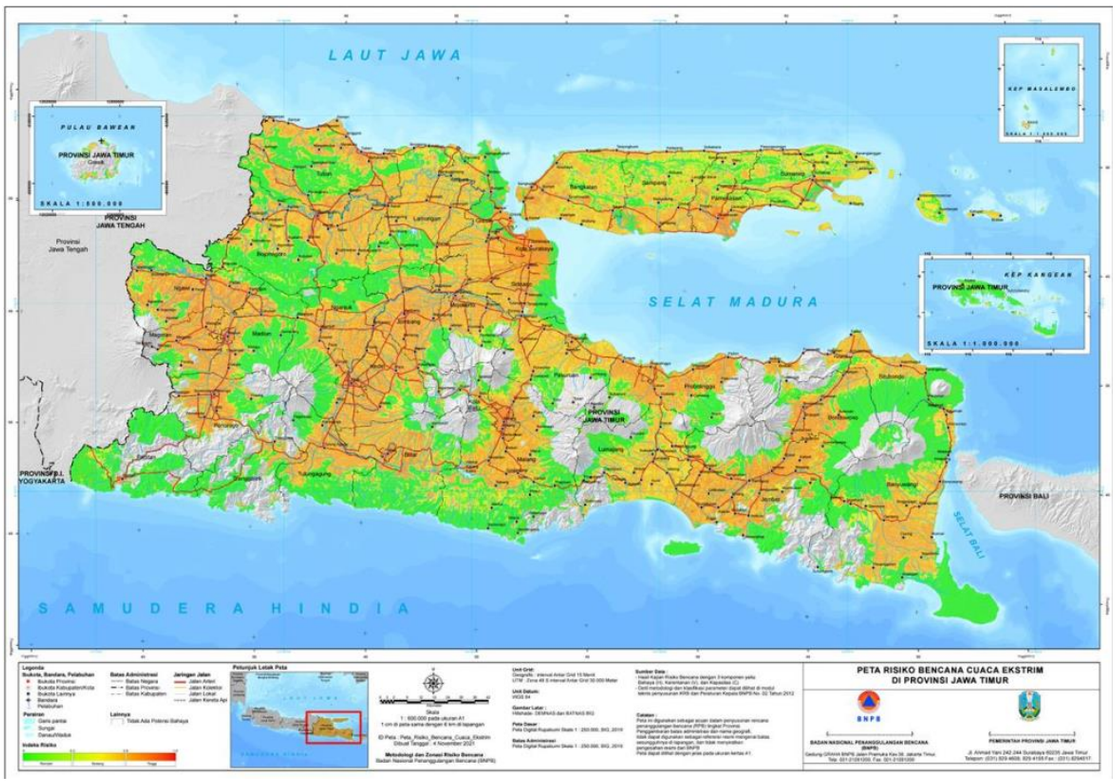
Gambar 2. 15 Gambar Peta Risiko Bencana Banjir Bandang



9. Cuaca Ekstrim

Berdasarkan hasil Kajian Resiko Bencana Nasional Provinsi Jawa Timur Tahun 2022-2026, bencana cuaca ekstrim (angin puting beliung) berpotensi terjadi di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dengan tingkat risiko tinggi kecuali Kabupaten Pacitan dengan kelas sedang. Secara keseluruhan, tingkat risiko bencana cuaca ekstrim di Provinsi Jawa Timur adalah tinggi. Kabupaten Pacitan merupakan kabupaten dengan tingkat risiko kategori sedang. Sementara tingkat risiko kategori tinggi terdiri dari Kabupaten Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Kediri, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun, Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kota Surabaya dan Kota Batu.

Gambar 2. 16 Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrim



10. Likuefaksi

Berdasarkan hasil Kajian Resiko Bencana Nasional Provinsi Jawa Timur Tahun 2022-2026, bencana likuefaksi berpotensi memapar kabupaten/kota dengan kelas bahaya tinggi, kelas kapasitas sedang dan kelas kerentanan sedang. Secara keseluruhan kelas risiko bencana likuefaksi di Provinsi Jawa Timur adalah sedang. Adapun kabupaten/kota yang memiliki tingkat risiko kategori sedang antara lain Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Kediri, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun, Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Kota Kediri, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, Kota Madiun dan Kota Surabaya.

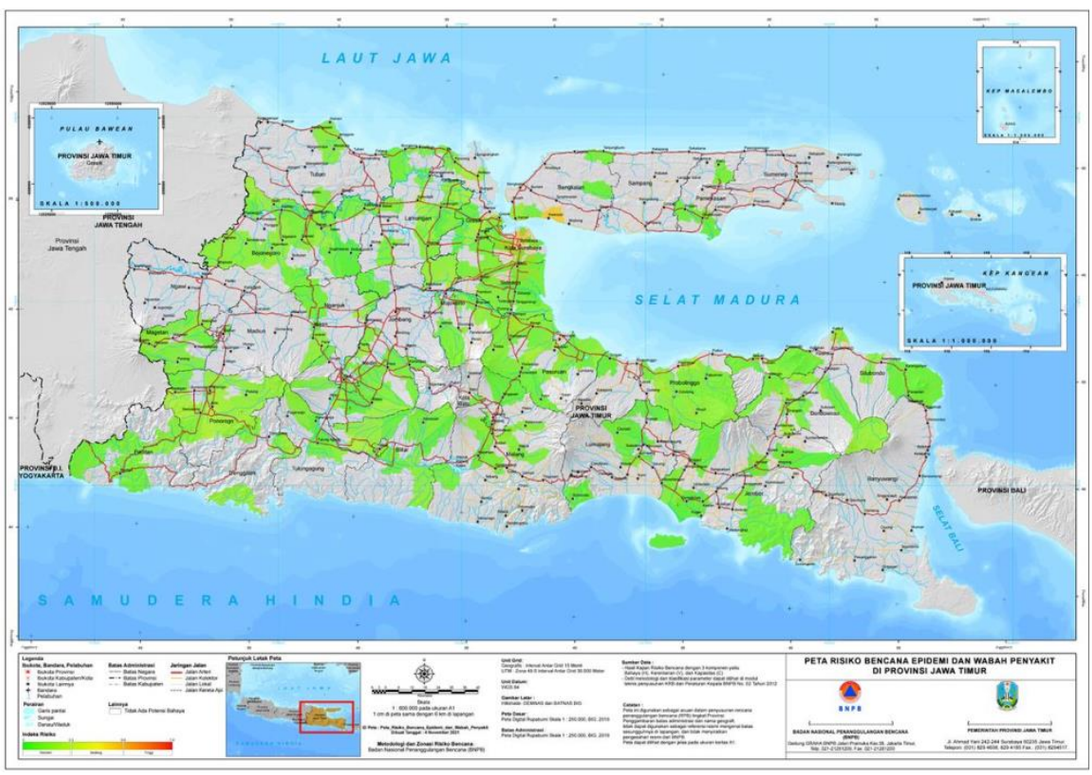
Gambar 2. 17 Gambar Peta Risiko Bencana Likuefaksi



11. Epidemi dan Wabah

Bahaya epidemi dan wabah penyakit berpotensi memapar 30 (tiga puluh) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dengan kelas risiko rendah. Kondisi ini menjadikan kelas risiko bencana epidemi dan wabah penyakit di Provinsi Jawa Timur dalam hasil Kajian Resiko Bencana Nasional Provinsi Jawa Timur Tahun 2022-2026 menjadi rendah.

Gambar 2. 18 Peta Risiko Bencana Epidemi dan Wabah



Gambar 2. 19 Peta Risiko Bencana Multi Bahaya di Provinsi Jawa Timur



Sumber : Kajian Resiko Bencana Nasional Provinsi Jawa Timur Tahun 2022-2026

2.1.2 Demografi

Selama kurun waktu enam tahun terakhir (2018–2023) jumlah penduduk Jawa Timur selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 jumlah penduduk Jawa Timur mencapai 39,5 juta jiwa, kemudian terus meningkat menjadi 41,41 juta jiwa pada Tahun 2023 dengan sex ratio sebesar 99,48%. Artinya, setiap 100 penduduk perempuan terdapat 99-100 penduduk laki-laki. Jika dilihat dari kepadatan penduduk, di wilayah Jawa Timur Tahun 2023 terdapat 862 jiwa setiap km^2.

Tabel 2. 10 Struktur Penduduk Provinsi Jawa Timur

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Penduduk (ribuJiwa)	39.699	40.666	40.878	41.150	41.416
2	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur (ribu jiwa)					
	a. <15 tahun	8.783	8.701	8.646	8.612	8.584
	b. 15 – 64 tahun	27.630	28.571	28.668	28.793	28.902
	c. >64 tahun	3.286	3.394	3.565	3.745	3.930
3	Laju Pertumbuhan Penduduk	5,52	- 2,33^{r}	3,56^{x}	5,34^{xx}	0,65
4	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km^2)	830	851	855	857	862
5	Sex Ratio (L/P) (%)	97,53	99,6	99,56	99,52	99,48
6	Jumlah Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umum					
	a. 15 – 29 tahun	5.159	5.112	5.021	5.055	5.501
	b. 30 – 54 tahun	11.608	11.979	12.050	12.152	12.675
	c. >54 tahun	4.732	5.173	5.249	5.662	5.693

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Tabel 2. 11 Persebaran Penduduk Jawa Timur Berdasarkan Jenis Kelamin

Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur (Jiwa)					
	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Kab. Pacitan	297.014	298.826	295.902	297.823	592.916	596.649
Kab. Ponorogo	481.540	485.603	482.713	486.979	964.253	972.582
Kab. Trenggalek	371.527	373.810	368.142	370.548	739.669	744.358
Kab. Tulungagung	552.835	557.045	552.502	556.928	1.105.337	1.113.973
Kab. Blitar	624.631	629.127	615.691	620.370	1.240.322	1.249.497
Kab. Kediri	836.025	841.629	819.995	825.821	1.656.020	1.667.450
Kab. Malang	1.353.154	1.361.591	1.332.746	1.341.584	2.685.900	2.703.175
Kab. Lumajang	562.257	567.106	574.970	580.155	1.137.227	1.147.261
Kab. Jember	1.279.947	1.288.194	1.287.771	1.296.577	2.567.718	2.584.771
Kab. Banyuwangi	866.723	873.100	865.008	871.714	1.731.731	1.744.814
Kab. Bondowoso	384.676	385.966	396.741	398.226	781.417	784.192
Kab. Situbondo	339.230	340.547	352.030	353.534	691.260	694.081
Kab. Probolinggo	572.137	573.945	587.828	589.914	1.159.965	1.163.859
Kab. Pasuruan	809.968	813.307	809.067	812.722	1.619.035	1.626.029
Kab. Sidoarjo	1.058.552	1.063.973	1.044.849	1.050.615	2.103.401	2.114.588
Kab. Mojokerto	569.966	573.841	563.618	567.675	1.133.584	1.141.516
Kab. Jombang	673.386	678.250	662.586	667.636	1.335.972	1.345.886
Kab. Nganjuk	561.677	565.193	555.356	559.054	1.117.033	1.124.247
Kab. Madiun	375.368	378.994	382.297	386.141	757.665	765.135
Kab. Magetan	333.605	335.566	344.738	346.900	678.343	682.466
Kab. Ngawi	435.470	437.350	441.962	444.043	877.432	881.393
Kab. Bojonegoro	660.216	663.775	654.909	658.699	1.315.125	1.322.474
Kab. Tuban	603.875	606.876	605.668	608.919	1.209.543	1.215.795
Kab. Lamongan	686.117	693.701	685.392	693.240	1.371.509	1.386.941
Kab. Gresik	670.835	676.735	661.829	667.913	1.332.664	1.344.648
Kab. Bangkalan	535.522	542.775	551.098	558.781	1.086.620	1.101.556
Kab. Sampang	488.673	492.572	495.489	499.638	984.162	992.210
Kab. Pamekasan	420.612	422.584	437.206	439.425	857.818	862.009
Kab. Sumenep	548.419	551.524	588.213	591.771	1.136.632	1.143.295
Kota Kediri	144.876	145.556	144.542	145.280	289.418	290.836
Kota Blitar	75.587	76.359	76.373	77.182	151.960	153.541
Kota Malang	420.897	421.340	425.229	425.842	846.126	847.182
Kota Probolinggo	120.545	121.500	122.655	123.674	243.200	245.174
Kota Pasuruan	105.753	106.709	105.744	106.741	211.497	213.450
Kota Mojokerto	66.611	67.125	67.739	68.289	134.350	135.414
Kota Madiun	97.370	98.460	101.822	103.000	199.192	201.460
Kota Surabaya	1.431.041	1.433.967	1.456.182	1.459.731	2.887.223	2.893.698
Kota Batu	109.119	110.138	107.616	108.664	216.735	218.802

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, hasil proyeksi penduduk interim Jawa Timur kondisi Juni 2022, Juni 2023

Tabel 2. 12 Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan KB di Jawa Timur

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Total Fertility Rate	-	-	2,21	1,98	1,96
2	Persentase Cakupan KB aktif (mCPR)	75,72	75,55	60,40	65,60	67,51
3	Persentase Jumlah kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (*un-met need*)	10.03	9,52	14,90	11,1	7,3
4	Angka Fertilitas Menurut Umur/*Age Specific Fertility Rates* (ASFR)	30,35	31	21	31,34	14,30

Sumber: BKKBN

Capaian TFR yang sudah mencapai angka 1,96 poin menunjukkan angka yang berarti setiap keluarga memiliki kurang lebih 2 anak sehingga jumlah penduduk akan tetap stabil. Di tahun 2023, wanita yang berusia 15-19 tahun, dalam satu tahun rata-rata akan melahirkan 14 bayi untuk setiap 1.000 wanita. Menurunnya ASFR merupakan indikasi keberhasilan sosialisasi pencegahan perkawinan anak.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

2.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Gambaran kondisi makro ekonomi Jawa Timur selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan trend positif, dimana pertumbuhan ekonominya selalu diatas Nasional kecuali pada saat pandemi Covid-19 tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar 2,33%. Namun pada tahun selanjutnya pertumbuhan ekonomi Jawa Timur kembali tumbuh positif.

Selama Tahun 2023 dan triwulan I 2024, sektor utama penopang ekonomi Jawa Timur cenderung sama, yaitu didominasi oleh industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian. Sektor perdagangan cenderung mengalami peningkatan sedangkan sektor industri pengolahan dan pertanian cenderung mengalami penurunan. Namun demikian, Provinsi Jawa Timur menjadi penyumbang perekonomian terbesar kedua di Pulau Jawa dan Nasional pada triwulan I 2024, yakni masing-masing sebesar 25,07% dan 14,46%.

Tabel 2. 13 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur dan Nasional

Pertumbuhan Ekonomi	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (TW I y-on-y)
Jawa Timur	5,53	-2,33	3,56	5,34	4,95	4,81
Nasional	5,02	-2,07	3,70	5,31	5,05	5,11

Sumber: BPS Pusat dan BPS Provinsi Jawa Timur

Peningkatan Ekonomi Jawa Timur pada Triwulan I 2024 didorong oleh peningkatan pertumbuhan industri pengolahan, perdagangan, konstruksi yang merupakan sumber pertumbuhan tertinggi. Selain itu, tingginya mobilitas penduduk mendorong peningkatan kinerja lapangan usaha transportasi dan pergudangan. Sedangkan pada sisi pengeluaran, beberapa sub komponen rumah tangga meningkat

karena terdapat momen hari libur besar keagamaan, bulan suci ramadan, serta persiapan Hari Raya Idulfitri, dan pertumbuhan tertinggi adalah konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) dikarenakan meningkatnya aktivitas lembaga keagamaan pada momen ramadan dan kegiatan politik (Pemilu 2024).

2.2.1.2 Indeks Gini

Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh pada suatu daerah yaitu Indeks Gini. Angka gini rasio merupakan suatu ukuran kemerataan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Perhitungan Indeks Gini menggunakan pendekatan pengeluaran, dengan asumsi pengeluaran yang besar maka pendapatannya juga besar.

Tabel 2. 14 Indeks Gini Jawa Timur dan Nasional

Indeks Gini	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023 (Maret)	2024 (Maret)
Jawa Timur	0,364	0,364	0,364	0,365	0,387	0,372
Nasional	0,380	0,385	0,381	0,381	0,388	0,379

Sumber : BPS Pusat dan BPS Provinsi Jawa Timur

Keterangan :

G < 0,3 = Ketimpangan rendah

0,3 ≤ G ≤ 0,5 = Ketimpangan sedang, dan

G > 0,5 = Ketimpangan tinggi

Indeks Gini Provinsi Jawa Timur pada Maret 2024 sebesar 0,372 mengalami penurunan sebesar 0,015 dibandingkan Maret 2023 dan lebih baik dibandingkan dengan capaian Nasional. Penurunan ketimpangan pengeluaran ini salah satunya karena program perlindungan sosial telah tersalur di Jawa Timur pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), seperti realisasi pemanfaatan Program Keluarga Harapan (PKH) sudah mencapai 98,51% pada periode Maret-April 2024, realisasi pemanfaatan program sembako sudah mencapai 95,18% pada periode april 2024, dan penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada triwulan I 2024 mencapai Rp 217,79 Triliun. Selain itu, di Jawa Timur juga terdapat program perlindungan sosial khusus seperti PKH Plus yang telah tersalur 99,8%, Kelompok Usaha Bersama (KUBE) telah tersalur 97%, dan bansos kemiskinan ekstrim tersalur 73%.

2.2.1.3 Angka Kemiskinan

Persentase penduduk miskin Jawa Timur menunjukkan tren yang positif setelah kasus pandemi covid-19 seiring dengan semakin membaiknya perekonomian Jawa Timur. Persentase Penduduk Miskin pada Maret 2024 sebesar 9,79% dan pertama kalinya menyentuh 1 digit. Kemiskinan Jawa Timur mengalami penurunan sebesar 0,56% poin terhadap Maret 2023 dan merupakan penurunan tertinggi di Pulau Jawa. Selain itu, Jawa Timur juga menjadi penyumbang penurunan penduduk miskin tertinggi secara nasional sebesar 206,102 jiwa dan berkontribusi sebesar 30,34% terhadap penurunan kemiskinan nasional. Angka kemiskinan yang turun

signifikan menunjukkan penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi, baik melalui kebijakan makro ekonomi maupun dengan intervensi program.

Tabel 2. 15 Persentase Penduduk Miskin Jawa Timur dan Nasional

Persentase Penduduk Miskin	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023 (Maret)	2024 (Maret)
Jawa Timur	10,20	11,46	10,59	10,49	10,35	9,79
Nasional	9,22	10,19	9,71	9,57	9,36	9,03

Sumber: BPS Pusat dan BPS Provinsi Jawa Timur

Sementara untuk kemiskinan ekstrem juga mengalami penurunan secara signifikan sebesar 3,58% atau 1.480.140 jiwa mulai tahun 2022 – 2023, dari 4,4% atau setara 1.812.210 jiwa pada 2020 menjadi 0,82% atau 331.980 jiwa pada Maret 2023.

Berbagai upaya yang ditempuh pemerintah mengurangi penduduk miskin diantaranya meningkatkan taraf kesejahteraan penduduknya baik dari segi kinerja perekonomiannya maupun penciptaan pemerataan pembangunan serta meningkatkan ketajaman sasaran program pengentasan kemiskinan. Hal ini selaras dengan strategi penanganan kemiskinan Jawa Timur yang antara lain meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, mengurangi pengeluaran masyarakat miskin, dan mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

2.2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka meliputi mereka yang tidak mau bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik (penganggur sukarela) maupun mereka yang mau bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan (penganggur terpaksa). Salah satu ukuran keberhasilan kinerja suatu daerah dalam hal penanganan pengangguran bila diamati dari sisi ketenagakerjaan adalah dengan melihat tinggi rendahnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Tabel 2. 16 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur dan Nasional

Tingkat Pengangguran Terbuka	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (Feb)
Jawa Timur	3,82	5,84	5,74	5,49	4,88	3,74
Nasional	5,23	7,07	6,49	5,86	5,32	4,82

Sumber: BPS Pusat dan BPS Provinsi Jawa Timur

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur setiap tahunnya selalu dibawah Nasional dan pada Tahun 2023 mengalami penurunan yang cukup besar menjadi 4,88%, turun 0,61 poin dibanding tahun 2022. Pada Februari 2024, TPT Jawa Timur mencapai 3,74%, angka ini lebih rendah dibandingkan TPT Nasional yang mencapai angka 4,82%. TPT Jawa Timur Februari 2024 mengalami penurunan sejumlah 0,59 poin dibandingkan Februari 2023. Isu yang masih terjadi dalam pengangguran adalah TPT lulusan SMK yang menunjukkan angka tertinggi dibandingkan penduduk usia kerja dengan jenjang pendidikan lainnya.

2.2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia di Jawa Timur yang ditunjukkan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya dan berada diatas Nasional. Pertumbuhan IPM 2023 mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. Seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan, terutama umur panjang dan hidup sehat dan standar hidup layak. Sejak tahun 2020, status pembangunan manusia Jawa Timur sudah berada di level "tinggi". Selama 2020–2023, IPM Jawa Timur rata-rata meningkat sebesar 0,73% per tahun.

Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada Tahun 2023 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 74,87 tahun. Pada dimensi pengetahuan, Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat menjadi 13,38 tahun, sedangkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat menjadi 8,11 tahun pada Tahun 2023. Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) meningkat 429 ribu rupiah (3,58%) dibandingkan tahun sebelumnya. Sumber data umur harapan hidup saat lahir menggunakan hasil *Long Form* SP2020, sedangkan sumber data HLS, RLS, dan pengeluaran riil per kapita per tahun menggunakan hasil Susenas Maret.

Tabel 2. 17 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur dan Nasional

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jawa Timur	71,50	73,04	73,48	74,05	74,65
Nasional	71,92	72,81	73,16	73,77	74,39

Sumber : BPS Pusat dan BPS Provinsi Jawa Timur

Ket : Perhitungan UHH mulai tahun 2020 menggunakan hasil Long Form SP2020

IPM tertinggi Jawa Timur Tahun 2023 tercatat di Kota Malang sebesar 84,00, hal yang sama juga terjadi untuk tahun sebelumnya. Terdapat sebanyak 7 (tujuh) daerah dengan IPM berkategori "sangat tinggi", yaitu Kota Surabaya, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Blitar, dan Kabupaten Sidoarjo. Di samping itu, daerah dengan kategori IPM "tinggi" sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kabupaten/kota, sedangkan daerah berkategori IPM "sedang" sebanyak 4 (empat) kabupaten/kota. Kabupaten di Jawa Timur yang IPM-nya "naik kelas" tahun ini adalah Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Pamekasan, dari IPM berkategori "sedang" ke "tinggi". Pertumbuhan IPM tertinggi Tahun 2023 terjadi di Kabupaten Pamekasan (1,4%), sementara pertumbuhan terendah terjadi di Kabupaten Lamongan (0,61%).

2.2.1.6 NTP/NTN/NTPI

Nilai Tukar Petani (NTP), Nilai Tukar Nelayan (NTN), dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI) Provinsi Jawa Timur menunjukkan dinamika dan fluktuasi selama lima tahun terakhir. Berdasarkan capaian lima tahun terakhir, NTN dan NTPI masih rendah dibandingkan dengan NTP, hal ini mencerminkan terdapat tekanan ekonomi pada sektor perikanan. Sedangkan NTP menunjukkan tren kenaikan, hal ini kemungkinan disebabkan kenaikan harga gabah yang signifikan pada Tahun 2023.

Tabel 2. 18 NTP/NTN/NTPI di Jawa Timur

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai Tukar Petani (NTP)	108,53	100,77	100,01	102,47	109,44
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	98,44	95,77	101,11	103.75	100,58
Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI)	-	98,74	100,50	101,74	97,92

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan NTP adalah dengan meningkatkan kualitas komoditas yang dihasilkan oleh petani antara lain melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan, bimbingan teknis, mendorong penerapan *Good Agricultural Practices* (GAP), serta penanganan panen dan pascapanen yang benar. Sedangkan upaya yang dilakukan untuk menekan pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh nelayan antara lain dengan pemberian fasilitasi bantuan alat tangkap. Salah satu kendala yang dihadapai oleh nelayan adalah ketersediaan bahan bakar khusus nelayan. Kerjasama dan kolaborasi dengan pihak terkait terus didorong untuk mendapatkan solusi permasalahan tersebut.

2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

2.2.2.1 Indeks Kesehatan

Indeks Kesehatan diperoleh dari hasil olah umur harapan hidup, asumsinya semakin sehat seseorang maka semakin panjang usia hidupnya. Indeks ini terkait pembangunan kesehatan di daerah. Perhitungan Indeks Kesehatan mulai tahun 2020 menggunakan data *Long Form* SP2020.

Tabel 2. 19 Indikator Urusan Kesehatan di Jawa Timur

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kesehatan	0,787	0,834	0,835	0,840	0,844

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, diolah

Pemerintah Jawa Timur perlu meningkatkan kebijakan program kesehatan salah satunya yaitu program pengiriman para penyuluh dan tenaga medis terutama ke daerah-daerah terpencil. Dengan keberadaan para tenaga medis, ibu-ibu hamil di daerah pelosok dapat memanfaatkan jasa tenaga medis khususnya pada saat melahirkan.

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) untuk kesehatan ibu dan anak juga perlu digalakkan dan dimodernisasi, tidak hanya di wilayah perkotaan, tetapi termasuk wilayah perdesaan dan terpelosok. Kualitas manusia dari sisi kesehatan diperlukan konektivitas yang baik antara masyarakat dengan pelayanan kesehatan. Fasilitas kesehatan perlu dibangun tidak hanya di wilayah kota, tetapi menyeluruh hingga wilayah rentan terhadap akses 3T (Tertinggal, Terluar, Terdalam). Masyarakat yang sehat menjadi modal utama bagi suatu daerah untuk menjadi lebih maju. Selain upaya diatas, pada layanan kesehatan rujukan, RSUD Dr. Soetomo meskipun telah memiliki pelayanan berstandar internasional namun masih dibutuhkan peningkatan kualitas pelayanan agar mampu bersaing dengan Rumah Sakit di luar negeri.

2.2.2.2 Indeks Keluarga Sehat

Satu keluarga adalah satu kesatuan keluarga inti (ayah, ibu, dan anak) sebagaimana dinyatakan dalam Kartu Keluarga. Jika dalam satu rumah tangga terdapat kakek dan atau nenek atau individu lain, maka rumah tangga tersebut dianggap terdiri lebih dari satu keluarga. Untuk menyatakan bahwa suatu keluarga sehat atau tidak digunakan sejumlah penanda atau indikator. Dalam rangka pelaksanaaan Program Indonesia Sehat telah disepakati adanya 12 (dua belas) indikator utama untuk penanda status kesehatan sebuah keluarga. Kedua belas indikator utama tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB);
2. Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan;
3. Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap;
4. Bayi mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
5. Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan;
6. Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar;
7. Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur;
8. Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan;
9. Anggota keluarga tidak ada yang merokok;
10. Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
11. Keluarga mempunyai akses sarana air bersih; dan
12. Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat.

Berdasarkan indikator tersebut, dilakukan penghitungan Indeks Keluarga Sehat (IKS) dari setiap keluarga (Sumber: Pedoman Umum Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2016). Tahun 2023, dari data bulan September didapatkan capaian IKS Jawa Timur pada posisi angka 0,257 dengan uraian capaian sebagai berikut:

Tabel 2. 20 Indeks Kualitas Keluarga

No	Indikator IKS	Capaian (%)
1	Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB)	60,31
2	Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan	91,09
3	Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap	94,66
4	Bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif	86,07
5	Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan	93,68
6	Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar	42,22
7	Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur	32,28
8	Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan	16,65
9	Anggota keluarga tidak ada yang merokok	52,09
10	Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	51,65
11	Keluarga mempunyai akses sarana air bersih	96,89
12	Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat	89,18

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

2.2.2.3 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga

Indeks Pembangunan berkualitas keluarga merupakan indikator baru yang tersedia pada RPJPN 2025 – 2045, namun indikator IPKK capaian Tahun 2021 dan Tahun 2022 sebelum belum tersedia. Sedangkan target Tahun 2023 dan Tahun 2024 masukan dari Pemerintah Pusat target untuk Jawa Timur adalah 71,77 (2023) dan 72,03 (2024).

Tabel 2. 21 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga

NO	Indikator	TAHUN				TARGET	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	-	-	-	-	71,77	72,03

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

2.2.2.4 Indeks Perlindungan Anak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan indikator yang dapat menunjukkan komitmen daerah dalam melakukan perlindungan anak. Indikator Perlindungan Anak di dukung 5 (lima) klaster sebagaimana tertuang dalam Konvensi Hak Anak (KHA) meliputi : (1) Hak Sipil dan Kebebasan, (2) Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, (3) Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, (4) Hak Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang serta (5) Hak Perlindungan Khusus Anak. Sehingga pelaksanaan perlindungan anak tidak lagi dilakukan secara sektoral, namun harus dikoordinasikan dan dilakukan secara terpadu dan holistik oleh semua Perangkat Daerah terkait sehingga tidak terjadi tumpang tindih program dan kegiatan.

Tabel 2. 22 Indeks Perlindungan Anak

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Perlindungan Anak (IPA)	71,8	72,25	64,59	66,1	

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuann Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur

2.2.2.5 Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu indikator hasil pengembangan dari penghitungan IPM. Tujuan penghitungan IPG adalah untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah, berimplikasi kepada pembangunan perempuan. IPG merupakan perbandingan IPM perempuan terhadap IPM laki-laki. Perkembangan Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Jawa Timur selama Tahun 2019-2023 menunjukkan kinerja yang semakin membaik. Hal ini dibuktikan dengan capaian IPG Jawa Timur mulai Tahun 2020 berada diatas Nasional. Kesetaraan pembangunan manusia selalu diupayakan di Jawa Timur, dengan mengupayakan kenaikan IPM perempuan. Pemerintah Jawa Timur melalui program pembangunannya, berupaya untuk meningkatkan IPM perempuan, khususnya pada indeks pendidikan dan pengeluaran perkapita yang disesuaikan.

Tabel 2. 23 Indeks Pembangunan Gender

No	Indeks Pembangunan Gender	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jawa Timur	90,91	91,07	91,67	92,86	92,96
2	Nasional	91,07	91,06	91,27	91,63	91,85

Sumber: BPS RI

2.2.2.6 Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah indikator baru yang menyempurnakan indikator ketimpangan gender sebelumnya dan disusun berdasarkan dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. IKG menunjukkan kerugian potensial dalam capaian pembangunan manusia karena tidak setaraan antara laki laki dan perempuan dalam kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. Nilai IKG berkisar 0-1, semakin 91,06 kecil 91,27 IKG 91,63 91,85 menunjukkan ketimpangan yang semakin rendah (kesetaraan yang semakin tinggi). Indeks Ketimpangan Gender di Jawa Timur sejak Tahun 2018 hingga 2023 mengalami tren menurun. Hal ini mengindikasikan ketimpangan gender yang semakin mengecil atau kesetaraan yang semakin membaik. Penurunan IKG Tahun 2023 dipengaruhi oleh perbaikan dimensi kesehatan reproduksi dan dimensi pemberdayaan. Perbaikan dimensi kesehatan reproduksi dipengaruhi oleh perbaikan menurunnya indikator wanita melahirkan tidak di fasilitas kesehatan, sedangkan perbaikan pemberdayaan dipengaruhi indikator dimensi oleh persentase perempuan 25 tahun ke atas yang berpendidikan SMA ke atas yang meningkat lebih tinggi dibanding laki laki.

Dalam rangka menurunkan ketimpangan gender maka dilakukan peningkatan partisipasi perempuan melalui pelatihan ketrampilan dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Berdasarkan data BPS Jawa Timur, IKG Provinsi Jawa Timur pada 2023 mencapai 0,423. Angka ini menurun dibandingkan IKG tahun 2022 sejumlah 0,017.

Tabel 2. 24 Indeks Ketimpangan Gender

Indikator	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Ketimpangan Gender	0,483	0,476	0,449	0,460	0,440	0,423

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

2.2.2.7 Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun SDM yang berkualitas dan berdaya saing serta berperan penting untuk memetik bonus demografi. Keberhasilan pembangunan pemuda dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Dalam kerangka penyusunan IPP, aspek-aspek pembangunan pemuda tersebut dikelompokkan ke dalam 5 (lima) domain. Kelima domain tersebut adalah (i) domain pendidikan, (ii) domain kesehatan dan kesejahteraan, (iii) domain lapangan dan kesempatan kerja, (iv) domain partisipasi dan kepemimpinan, serta (v) domain gender dan diskriminasi.

Tabel 2. 25 Indeks Pembangunan Pemuda

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	52,50	53,00	53,50	55,50	56,50

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur

2.2.2.8 Kebudayaan

Melalui pembangunan lingkungan dan iklim yang mendukung keberlanjutan warisan budaya serta promosi identitas lokal, masyarakat dapat berkembang dengan tetap memegang nilai-nilai budayanya. Terdapat 3 (tiga) aspek kunci dalam kebudayaan yang diharapkan mampu menjaga relevansi dan keberlanjutan budaya di tengah-tengah perubahan zaman yaitu pertama, Jumlah Warisan Budaya yang menunjukkan komitmen wilayah dalam melindungi dan mengakui keberagaman budaya, kedua, Persentase Peningkatan Cagar Budaya yang dilestarikan yang mencerminkan keberhasilan upaya pelestarian serta ketiga, Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan yang mencerminkan investasi dan upaya dalam memajukan keberagaman budaya.

Tabel 2. 26 Indikator Kebudayaan Jawa Timur

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Warisan Budaya yang Ditetapkan	20	6	16	9	12
2	Persentase Peningkatan Cagar Budaya yang Dilestarikan	10,58	8,78	9,62	2,14	15,23
3	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan	5,45	5,99	7,72	10,09	11,49

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur

Terdapat 11 (sebelas) cagar budaya yang masuk dalam pemeringkatan Jawa Timur dan naik dari 514 (lima ratus empat belas) cagar budaya pada Tahun 2021 menjadi 525 (lima ratus dua puluh lima) cagar budaya pada Tahun 2022. Realisasi persentase obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan adalah 10,09% atau terdapat 84 (delapan puluh empat) jenis seni dan 36 (tiga puluh enam) karya seni baru yang merupakan bagian dari objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan menjadi 554 (lima ratus lima puluh empat) OP.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kewajiban yang melekat pada suatu Instansi Pemerintah agar dapat melaksanakan roda pemerintahan dengan baik dan mampu menjadi katalisator dalam pencapaian pembangunan. Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui percepatan Reformasi Birokrasi tentu harus menjadi salah satu perhatian utama.

Ekspektasi masyarakat terhadap birokrasi semakin hari semakin tinggi. Pelaksanaan reformasi birokrasi yang saat ini telah dan sedang dilaksanakan perlu dilakukan penajaman sehingga dapat menghasilkan *multiplier effect* pada sektor

lainnya. Upaya percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa reformasi birokrasi telah berjalan dengan baik. Gambaran reformasi birokrasi telah dilaksanakan dengan baik tentunya tidak hanya menggunakan dasar dokumen perencanaan dan pelaksanaan tertulis saja, akan tetapi lebih dari itu, dapat dilihat implementasi pada setiap pelaksanaan reformasi birokrasi.

Tabel 2. 27 Indeks Reformasi Birokrasi

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Reformasi Birokrasi	73,83	76,38	76,71	80,11	80,56

Sumber: Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur

Indeks reformasi birokrasi di Jawa Timur pada Tahun 2019 sebesar 73,83, kemudian terus meningkat hingga Tahun 2023 menjadi 80,56. Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperoleh kategori A. Hasil evaluasi Tahun 2023 tidak diperbandingkan dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, terdapat perubahan kerangka logis, komponen, indikator, bobot dan kriteria penilaian yang signifikan. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah berupaya untuk mewujudkan perbaikan tata kelola pemerintahan (RB General) dan penyelesaian isu strategis tingkat hilir terkait agenda program Pembangunan Nasional (RB Tematik).

Dalam rangka memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi memberikan dampak nyata dan memberikan kontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja pembangunan dan atau prioritas Presiden Republik Indonesia lainnya, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan antara lain, menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi baik general maupun tematik sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.

2.3.2. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik tersebut adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dimasukkan sebagai indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Jawa Timur.

Tabel 2. 28 Indikator Pelayanan Publik Provinsi Jawa Timur

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,32	84,02	85,44	86,51	86,85

Sumber: Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur

Perkembangan Indeks Kepuasan Masyarakat di Jawa Timur pada Tahun 2019-2023 terus menunjukkan peningkatan. Kondisi ini mencerminkan kepuasan terhadap pelayanan masyarakat di Jawa Timur lebih baik, efisien, dan efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), sehingga dapat mendorong upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. 9 (sembilan) unsur yang terdapat dalam SKM sebagaimana disebutkan dalam Permen PAN Nomor 14 Tahun 2017 adalah Persyaratan; Sistem, mekanisme dan prosedur; Waktu penyelesaian; Biaya/tarif; Produk spesifikasi jenis pelayanan; Kompetensi pelaksana; Perilaku pelaksana; Penanganan pengaduan, saran dan masukan; dan Sarana dan prasarana.

Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan suatu lembaga layanan publik. Sejak Tahun 2022 Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai menggunakan inovasi SuKMa-e Jatim (survei kepuasan masyarakat berbasis elektronik) dalam melakukan survei kepuasan kepada pengguna layanan. SuKMa-e Jatim merupakan aplikasi terintegrasi, realtime, berbasis *QR Code*, dan akuntabel. Adapun dasarnya yaitu Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 26 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Pada Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

2.3.3. Indeks Inovasi Daerah

Inovasi Daerah yang diamanatkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dalam rangka memajukan daerah dan meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakatnya. Inovasi daerah tersebut meliputi inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah; inovasi pelayanan publik; dan/atau inovasi daerah lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Penilaian inovasi daerah dilakukan melalui mekanisme pengukuran Indeks Inovasi Daerah dari beberapa indikator indeks inovasi daerah. Dari hasil indeks inovasi daerah ini selanjutnya dilakukan pemeringkatan/pengelompokan menjadi beberapa kategori, yaitu sangat inovatif, inovatif, dan kurang inovatif.

Tabel 2. 29 Indikator Urusan Penelitian dan Pengembangan di Jawa Timur

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Inovasi Daerah	-	-	63,15	72,82	71,38

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Daerah

2.3.4. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Reformasi birokrasi dapat diwujudkan salah satunya dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE. Di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tabel 2. 30 Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika di Jawa Timur

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks SPBE	3,10	3,40	2,82	3,30	3,62

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur

Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah pada penerapan Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Aspek Layanan Publik Berbasis Eletronik. Dimana pada aspek ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki kelebihan pada layanan administrasi pemerintahan yang meliputi perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, pengelolaan Barang Milik Negara, dan pengawasan internal telah saling terintegrasi dengan penggunaan aplikasi umum yang berbagi pakai, sehingga menjadi kekuatan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Selain itu pada aspek layanan publik berbasis online, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah memiliki Layanan pengaduan layanan publik, serta layanan dokumentasi dan informasi hukum yang mengakomodir fitur transaksional dan terintegrasi. Selanjutnya Layanan publik unggulan seperti implementasi e-Samsat, JOSS, dan PPDB telah bersifat transaksional serta terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi terkait, dan telah dilakukan pengembangan aplikasi layanan secara berkelanjutan, dimana keseluruhan aspek tersebut mejadi kekuatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penerapan SPBE.

2.3.5. Standar Pelayanan Minimum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam Pasal 18 ayat (3) maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Pada Pasal 298 (1) Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal.

Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas: Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat

dan Kawasan permukiman, Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan Sosial.

2.4.1 Pendidikan

Layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Provinsi Bidang Pendidikan terdiri atas SPM Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus. Operasionalisasi SPM Pendidikan berlandaskan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021. Atas dasar peraturan tersebut, pendidikan juga wajib memiliki Standar Pelayanan Minimal yang disahkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan yang mengatur tentang Jenis dan penerima Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar, pencapaian SPM Pendidikan dan pelaporan serta evaluasi. Hal ini mempengaruhi perubahan transformasi SPM Tahun 2018 dan 2021 yang lebih berfokus kepada kualitas pembelajaran dan kualitas lingkungan sekolah. Standar Pelayanan Minimal Tahun 2021 berfokus kepada kualitas pembelajaran, kualitas lingkungan sekolah, partisipasi dan kualitas pendidik, dengan indikator: Literasi, Numerasi, Iklim keamanan, kebinekaan, inklusivitas.

Tabel 2. 31 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan

No.	Indikator	Realisasi		
		2021	2022	2023
1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 16 – 18 Tahun	74,14	74,14	73,40
2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 4 – 18 Tahun	-	32,02	27,52
3	Rerata Kompetensi Literasi SMA	65,43	66,12	64,65
4	Rerata kompetensi Numerasi SMA	52,17	55,44	55,23
5	Rerata Kompetensi Literasi SMK	60,54	60,26	51,14
6	Rerata Kompetensi Numerasi SMK	49,80	51,36	42,38
7	Rerata Kompetensi Literasi SDLB	57,76	64,83	81,34
8	Rerata Kompetensi Numerasi SDLB	56,81	63,62	79,11
9	Rerata Kompetensi Literasi SMPLB	64,12	67,25	66,67
10	Rerata Kompetensi Numerasi SMPLB	57,35	60,10	61,99
11	Rerata Kompetensi Literasi SMLB	62,66	58,48	51,75
12	Rerata Kompetensi Numerasi SMLB	51,69	54,57	49,03
13	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	34,64	86,76	86,76
14	Tingkat kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	65,70	65,70	65,70
15	Indeks Iklim Keamanan SMA	73,97	68,94	68,94
16	Indeks Iklim Kebinekaan SMA	61,67	67,19	67,19
17	Indeks Inklusivitas SMA	53,64	56,28	56,28
18	Indeks Iklim Keamanan SMK	70,62	66,37	66,37
19	Indeks Iklim Kebinekaan SMK	59,75	64,26	64,26
20	Indeks Inklusivitas SMK	52,68	54,86	54,86
21	Indeks Iklim Keamanan SDLB	79,29	77,23	77,23
22	Indeks Iklim Kebinekaan SDLB	59,92	70,68	70,68
23	Indeks Inklusivitas SDLB	58,28	58,28	61,96
24	Indeks Iklim Keamanan SMPLB	80,77	73,46	73,46
25	Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB	60,16	67,46	67,46
26	Indeks Inklusivitas SMPLB	58,35	58,35	64,21

No.	Indikator	Realisasi		
		2021	2022	2023
27	Indeks Iklim Keamanan SMLB	79,19	71,75	71,75
28	Indeks Iklim Kebinekaan SMLB	61,04	66,21	66,21
29	Indeks Inklusivitas SMLB	58,17	58,17	61,75

Sumber : Dapodik Pendidikan

2.4.2 Kesehatan

Operasionalisasi SPM Bidang Kesehatan berlandaskan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar. Adapun SPM bidang Kesehatan adalah:

a. Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan Atau Berpotensi Bencana.
b. Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB).

Seluruh kejadian penyakit potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) harus mendapat penanganan dan respon cepat 1 x 24 jam sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang jenis penyakit potensi KLB/wabah. Hal tersebut salah satunya bertujuan untuk mencegah terjadinya penularan yang lebih luas di wilayah dan tidak sampai terjadi KLB. Berdasarkan laporan di Tahun 2023, total jumlah penduduk yang dilayani dari kejadian KLB yang dilaporkan yaitu 130.131 jiwa yang terdiri dari Suspek KLB campak/KLB campak, KLB difteri, KLB pertusis dan KLB polio.

Kejadian ini merupakan dampak dari capaian imunisasi yang tidak merata sampai tingkat desa terutama saat Pandemi Covid-19. Angka kematian kasus difteri di Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 sebesar 3% dan KLB difteri banyak terjadi pada pasien yang tidak pernah mendapatkan imunisasi difteri sebanyak 62% dari keseluruhan kategori umur.

Tabel 2. 32 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau / atau berpotensi bencana provinsi	100	100	100	100	100
2	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

2.4.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang urusan Pekerjaan Umum kewenangan provinsi terdiri atas Pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota dan Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas daerah kabupaten/kota. Capaian penerapan SPM Pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota yang diukur dengan indikator Persentase Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap demand pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota. Upaya pemenuhan SPM Pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota dilakukan melalui

Pembangunan SPAM Regional Umbulan dan SPAM Mojolagres, dimana dengan kedua pembangunan SPAM Regional ini pada Tahun 2022 ditargetkan memiliki kapasitas air curah sebesar ±3.360 liter/detik dan terealisasi sebesar 2900 liter/detik. Dengan total kapasitas tersebut, telah dimanfaatkan sebesar 2.090,39 liter/detik oleh Kabupaten/ Kota, yang melayani lebih dari 836.156 jiwa (dengan asumsi 1liter/detik dapat melayani 80KK, dan masing-masing KK sejumlah 5 jiwa).

Kemudian untuk penerapan SPM Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota diukur dengan indikator Presentase pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional, sampai dengan Tahun 2022, di Jawa Timur belum memiliki pelayanan pengolahan sistem air limbah terpusat lintas kabupaten/kota. Namun hal ini sudah mulai diinisiasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan menyusun Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (RISPAL) serta melaksanakan Identifikasi Potensi Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Regional sebagai langkah awal dalam inventarisasi potensi pengembangan air limbah regional.

Tabel 2. 33 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pekerjaan Umum

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap demand pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota *)	2,19	23,32	88,82	86,31	96,47
2	Presentase pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional **)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov. Jatim

*Ket: *) Formulasi perhitungan tahun 2021-2024 menggunakan target pertahun*

***) Belum memiliki SPAL Regional,*

2.4.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kewenangan provinsi terdiri atas Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi dengan indikator Persentase jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n terhadap jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n dan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi dengan indikator persentase rumah tangga penerima fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan ditambah rumah tangga penerima subsidi uang sewa ditambah rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni terhadap jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan. Capaian penerapan pada kedua SPM pada Tahun 2022 adalah 100%, hal ini dikarenakan tidak adanya penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan program pemerintah yang berdampak pada relokasi rumah rumah warga.

Tabel 2. 34 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n terhadap jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun (n)	100	100	100	100	100
2	Persentase rumah tangga penerima fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan ditambah rumah tangga penerima subsidi uang sewa ditambah rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni terhadap jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov. Jatim

Untuk mendukung pelaksanaan penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman khususnya terkait Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana juga didukung dengan pelaksanaan BTT sesuai usulan dari kabupaten/kota. Pada Tahun 2022 telah disalurkan dana BTT Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk pembangunan hunian terdampak bencana longsor di Kabupaten Trenggalek sebanyak 50 (lima puluh) unit hunian dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.500.000.000,00.

2.4.5 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Persentase warga negara yang memperoleh pelayanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi Jawa Timur adalah salah satu indikator SPM yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur. Indikator ini merupakan salah satu bagian penting dalam penyampaian informasi yang dapat memberikan gambaran keberhasilan suatu kegiatan. Indikator ini diperoleh dari hasil pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif atas data real kegiatan dengan target/ rencana pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur yang berhubungan erat dengan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Dalam hal pelayanan SPM yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan di Kabupaten/Kota. Indikator dalam SPM sebagai berikut:

Tabel 2. 35 Warga Negara yang Memperoleh Pelayanan Akibat Penegakan Hukum Perda dan Perkada di Provinsi Jawa Timur

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	100	100	100	-	-
Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar	-	-	-	100	100

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar	-	-	-	97,83	97,86

Sumber: Satpol PP Provinsi Jawa Timur

Pada Tahun 2022, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 bahwa perhitungan capaian SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum memiliki perubahan yang sebelumnya hanya terdapat 1 (satu) indikator yaitu Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada menjadi 2 (dua) indikator, yaitu Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (bobot 80%) dan Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (bobot 20%). Perubahan indikator ini mempengaruhi capaian SPM.

Dalam penerapan SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 tidak ada warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian baik materil ataupun fisik. Hal ini dapat dinarasikan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur selaku perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan penegakan Perda dan Perkada telah sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), humanis, persuasif dan edukatif sehingga tidak ada warga negara yang terdampak akibat penegakan hukum atau Perda dan Perkada yang dilakukan.

Untuk SPM sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, tidak terdapat Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran di level Provinsi. Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran hanya terdapat pada kabupaten/kota dan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM daerah kabupaten/kota secara umum dan teknis. Oleh karena itu, di tingkat Pemerintah Provinsi melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis dalam pelaksanaan SPM sub urusan bencana kabupaten/kota.

2.4.6 Sosial

Layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Provinsi Bidang Sosial sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Daerah Provinsi, Bab II pasal 7 (tujuh) SPM Bidang Sosial tersebut mencakup 5 (lima) pelayanan dasar.

Tabel 2. 36 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Penyandang Disabilitas Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	910	940	1.101	968	1.040
2	Jumlah Anak Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	2.809	2.824	1.247	3.029	2.180

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
3	Jumlah Lanjut Usia Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	987	1.050	1169	1.037	992
4	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	350	350	542	530	500
5	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	5.119	24.126	26.862	27.957	23.965

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

Target penanganan Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti setiap tahun mengalami peningkatan, hal ini disebabkan adanya penambahan kapasitas tampung pada UPT yang menangani Penyandang Disabilitas dan adanya penambahan bantuan permakanan pada Lembaga Kesejahteraan Sosial yang menangani Penyandang Disabilitas yang ada di masyarakat.

Target penanganan Anak Terlantar di Dalam Panti setiap tahun mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan adanya penambahan kapasitas tampung pada UPT yang menangani Anak Terlantar dan adanya penambahan bantuan permakanan pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang ada di masyarakat.

Target penanganan Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti setiap tahun mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan adanya penambahan kapasitas tampung pada UPT yang menangani Lanjut Usia Terlantar dan adanya penambahan bantuan permakanan pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia yang ada di masyarakat.

Target penanganan Gelandangan dan Pengemis setiap tahunnya tidak mengalami perubahan. Hal ini disebabkan UPT yang menanganani tidak mengalami penambahan kapasitas tampung, dan belum ada lembaga kesejahteraan sosial yang menangani gelandangan dan pengemis.

Capaian SPM Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bagi Korban Bencana Daerah Provinsi, dicapai melalui Program Penanganan Bencana Berbasis Masyarakat. Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan mendapatkan dukungan psikososial. Peningkatan pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 korban bencana alam dan sosial, disebabkan meningkatnya kasus bencana alam seperti banjir bandang, tanah longsor, Angin Puting beliung, Gempa Bumi, Kekeringan dan erupsi Gunung Merapi serta meningkatnya korban bencana sosial terutama Pandemi Covid-19.

2.4 Aspek Daya Saing

2.4.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

2.4.1.1 Produk Domestik Regional Bruto

Produktivitas suatu Daerah dapat diukur salah satunya menggunakan kinerja Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Selama 5 (lima) tahun terakhir PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) serta

PDRB Per Kapita Jawa Timur selalu mengalami peningkatan, meskipun sempat mengalami penurunan pada Tahun 2020 akibat pandemi Covid-19.

Secara spasial setiap tahunnya, Jawa Timur adalah Provinsi penyumbang perekonomian terbesar kedua di Pulau Jawa dan Nasional setelah DKI Jakarta, dengan kontribusi masing-masing berada di sekitar angka 25% dan 14%. Pada Tahun 2023, Jawa Timur adalah penyumbang perekonomian terbesar kedua di Pulau Jawa dengan berkontribusi sebesar 25,22% terhadap perekonomian pulau Jawa dan sebesar 14,38% terhadap perekonomian Nasional. Dan pada triwulan I 2024 secara konsisten, Provinsi Jawa Timur menjadi penyumbang perekonomian terbesar kedua di Pulau Jawa dan Nasional pada triwulan I 2024, yakni masing-masing sebesar 25,07% dan 14,46%.

Tabel 2. 37 PDRB Provinsi Jawa Timur

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (TW I)
PDRB ADHB (Triliun Rupiah)	2.352,42	2.299,46	2.454,72	2.730,91	2.203,18	764,33
PDRB ADHK 2010 (Triliun Rupiah)	1.650,14	1.610,42	1.668,75	1.757,82	1.379,392	470,63
PDRB Per Kapita (Juta Rp.)	59,02	56,64	59,99	66,25	71,12	-

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Sektor utama penopang ekonomi Jawa Timur cenderung sama, yaitu didominasi oleh Industri Pengolahan di sekitar angka 30 – 31%, Perdagangan di sekitar angka 18% – 19%, dan Pertanian di sekitar angka 11%. Selama tiga tahun terakhir, kontribusi sektor perdagangan cenderung mengalami peningkatan sedangkan kontribusi sektor industri pengolahan dan pertanian cenderung mengalami penurunan.

Tabel 2. 38 Kontribusi Sektor Utama PDRB Jawa Timur menurut Lapangan Usaha

Kategori	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (TW I)
Industri Pengolahan	30,32	30,68	30,72	30,60	30,54	31,54
Perdagangan	18,49	17,92	18,46	18,67	18,91	19,01
Pertanian	11,36	11,89	11,50	11,11	11,04	9,71

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

Struktur PDRB menurut Pengeluaran setiap tahunnya didominasi oleh komponen Konsumsi Rumah Tangga di sekitar angka 60% – 61% dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) di sekitar angka 27% – 28%. Selama tiga tahun terakhir,

komponen konsumsi rumah tangga dan PMTB cenderung mengalami peningkatan sedangkan ekspor barang jasa cenderung mengalami penurunan.

Tabel 2. 39 Kontribusi PDRB Jawa Timur menurut Pengeluaran

Kategori	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (TW I)
Konsumsi Rumah Tangga	59,54	60,82	59,34	59,53	60,79	61,35
PMTB	28,56	28,18	27,11	27,15	27,17	26,96

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

2.4.1.2 Penanaman Modal

Selama 5 (lima) tahun terakhir realisasi investasi Jawa Timur menunjukkan tren positif peningkatan signifikan terjadi di Tahun 2022, yang meningkat 38,8% dibanding Tahun 2021. Dalam kurun waktu tersebut investasi di Jawa Timur didominasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan terus tumbuh kecuali pada Tahun 2021 namun secara total investasi (PMDN dan PMA) mengalami kenaikan. Sampai dengan Bulan September 2023, realisasi investasi di Jawa Timur mencapai Rp100,1 Triliun.

Tabel 2. 40 Indikator Urusan Penanaman Modal di Jawa Timur

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
PMA (Triliun Rupiah)	13	22,6	27	44,9	70,2
PMDN (Triliun Rupiah)	45,5	55,7	52,5	65,4	74,9
Nilai Realisasi Penanaman Modal (Triliun Rupiah)	58,5	78,3	79,5	110,3	145,1

Sumber: Kementerian Investasi/BKPM RI

Hasil perhitungan *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) yang menunjukkan tingkat efisiensi investasi selama 5 (lima) tahun terakhir ICOR Jawa Timur lebih rendah dibanding Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa investasi di Jawa Timur lebih efisien daripada rata-rata nasional dan realisasi investasi menunjukkan tren positif.

Dalam mendukung peningkatan investasi di Jawa Timur, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperoleh amanat Presiden Republik Indonesia dalam mempercepat pembangunan wilayah Jawa Timur, yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik Bangkalan Mojokerto Surabaya Sidoarjo Lamongan (Gerbangkertasusila), dan Kawasan Bromo Tengger Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan. Percepatan tersebut dilakukan melalui proyek proyek strategis yang diharapkan dapat mendukung pembangunan di Jawa Timur dengan fokus pembangunan kewilayahan.

2.4.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia

2.4.2.1 Indeks Pendidikan

Tingkat kemajuan peradaban suatu wilayah dapat dilihat dari kualitas pendidikan di suatu wilayah. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Penduduk dengan pendidikan yang tinggi akan mampu meningkatkan produktivitas ekonomi di wilayahnya, sebaliknya daerah dengan rata-rata pendidikan penduduknya yang rendah, mempunyai produktivitas yang rendah pula.

Tabel 2. 41 Indikator Urusan Pendidikan di Jawa Timur

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks pendidikan	0,619	0,626	0,634	0,639	0,642

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, diolah

Indeks pendidikan merupakan salah satu komponen dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang variabelnya terdiri dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Realisasi Indeks Pendidikan di Jawa Timur sampai dengan Tahun 2023 selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Peningkatan ini, menggambarkan semakin membaiknya kualitas pendidikan di Jawa Timur sehingga berdampak produktivitas ekonomi daerah.
Semakin tinggi nilai indeks pendidikan, maka semakin besar kontribusinya terhadap nilai indeks pembangunan manusia.

2.4.2.2 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar dala mencapai budaya literasi masyarakat dengan pengukuran pada unsur pembangunan literasi masyarakat dan aspek masyarakat. Unsur pembangunan literasi masyarakat terdiri dari 7 (tujuh) komponen, yaitu pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi, ketercukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat per hari, jumlah perpustakaan ber-SNP, keterlibatan dalam kegiatan sosialisasi, dan anggota perpustakaan. Sedangkan unsur aspek masyarakat meliputi jumlah penduduk, jumlah penduduk yang bekerja, jumlah civitas sekolah dan akademika.

Tabel 2. 42 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Provinsi Jawa Timur

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	-	63,97	74,73	15,70	75,18

Sumber: Perpustakaan Nasional

Pencapaian nilai IPLM Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2023 mencapai 75,18 naik sebesar 0,45 dibandingkan tahun 2022. Pencapaian ini masuk dalam kategori sedang. 3 (tiga) kabupaten/kota dengan pencapaian IPLM tertinggi yaitu Kota Malang 94,22; Kota Madiun 93,94; dan Kota Pasuruan 84,38. Sedangkan 3 (tiga)

kabupaten/kota dengan pencapaian IPLM terendah yaitu Kabupaten Probolinggo 35,92; Kabupaten Jember 37,67; dan Kabupaten Sumenep 47,09.

2.4.2.3 Indeks Literasi Digital

Perkembangan digitalisasi di Indonesia yang sangat signifikan beberapa tahun belakangan ini ikut mendorong terciptanya ekosistem digital yang semakin baik. Pemetaan kompetensi digital masyarakat di Indonesia telah dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika selama 3 (tiga) tahun terakhir (2020-2022) melalui survei status literasi digital dan mengukurnya menjadi indeks literasi digital Indonesia. Terdapat 4 (empat) pilar yang menjadi bagian dari kerangka kerja pengembangan kurikulum literasi digital, yaitu kecakapan digital, etika digital, keamanan digital, dan budaya digital. Keempat pilar ini dijadikan acuan untuk pengembangan program literasi digital nasional yang mencakup *digital society, digital economy,* dan *digital government.*

Indeks Literasi Digital Jawa Timur setiap tahun mengalami peningkatan, bahkan Jawa Timur masuk kedalam 15 (lima belas) besar Indeks Literasi Digital berdasarkan Provinsi di Indonesia dan berada diatas skor Nasional.

Tabel 2. 43 Indeks Literasi Digital Provinsi Jawa Timur

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Literasi Digital	-	3,11	3,55	3,58	

Sumber : Kementerian Komunikasi dan Informatika

2.4.2.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Untuk mengetahui banyaknya jumlah angkatan kerja yang dapat diserap oleh pasar kerja, ukuran yang digunakan adalah tingkat partisipasi angkatan kerja yaitu rasio antara jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk usia kerja.

Tabel 2. 44 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Jawa Timur

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (Feb)
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	69,61	70,33	70,00	71,23	72,56	73,02

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dapat juga disebut sebagai indikator ekonomi dalam ketenagakerjaan. Semakin tinggi angka TPAK suatu wilayah, mencerminkan semakin baik tingkat ekonomi masyarakatnya. Jumlah angkatan kerja di Jawa Timur pada Tahun 2023 terdiri dari 22,70 juta orang bekerja dan 1,17 juta orang menganggur. Berdasarkan jenis kelamin, baik TPAK laki-laki maupun TPAK perempuan mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2022. Pada Februari 2024, TPAK Jawa Timur kembali mengalami peningkatan mencapai angka 73,02. Angka ini meningkat sejumlah 1,52% dibandingkan Februari 2023. Meski demikian, masih terdapat perbedaan mencolok diantara TPAK laki-laki dan TPAK perempuan.

Pada Tahun 2023, TPAK laki-laki sebesar 85,90%, sedangkan TPAK perempuan hanya sebesar 59,46%.

2.4.2.5 Angka Ketergantungan

Rasio ketergantungan dihitung dengan perbandingan jumlah penduduk usia < 15 tahun dan > 64 tahun terhadap jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk usia produktif adalah penduduk yang berusia 15-64 tahun, sedangkan yang dikategorikan sebagai penduduk usia non produktif adalah penduduk berusia dibawah 15 (lima belas) tahun (karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya) dan penduduk berusia diatas 65 (enam puluh lima) tahun karena umumnya sudah melewati masa pensiun.

Angka Ketergantungan penduduk Jawa Timur pada Tahun 2018-2022 cenderung fluktuatif. Capaian rasio ketergantungan pada Tahun 2022 sebesar 42,92, yang berarti bahwa dari 100 (seratus) penduduk produktif pada pada Tahun 2022 menanggung usia tidak produktif (usia muda dan usia tua) sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang.

Tabel 2. 45 Angka Ketergantungan Provinsi Jawa Timur

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Ketergantungan	43,68	43,71	37,84	42,92	43,70

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

2.4.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

2.4.3.1 Indeks Aksesibilitas

Indikator Indeks Aksesibilitas di Provinsi Jawa Timur merupakan agregat dari indikator layanan pada seluruh sektor perhubungan meliputi pelayanan angkutan darat, pelayanan angkutan kereta api, pelayanan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP), pelayanan angkutan laut dan pelayanan angkutan udara. Pada Tahun 2022 digunakan metode perhitungan baru yang mencakup layanan Angkutan Jalan dan ASDP.

Tabel 2. 46 Indikator Urusan Perhubungan di Jawa Timur

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Aksesibilitas	51,90	52,52	53,20	76,17	76,65

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur

Indeks Aksesibilitas pada Tahun 2023 mencapai 76,65 atau meningkat sebesar 0,48 poin dari Tahun 2022. Capaian tersebut didukung oleh indeks kinerja angkutan jalan dan indeks kinerja ASDP. Indeks kinerja angkutan jalan Tahun 2023 mencapai 0,89 dengan 154 (seratus lima puluh empat) trayek terlayani. Indeks Kinerja ASDP pada Tahun 2022 sebesar 0,477, dengan 16 (enam belas) trayek lintas penyeberangan yang terdiri dari lintas pelayanan dalam provinsi, yaitu Paciran-Bawean, Gresik-Bawean, Ujung-Kamal, Jangkar-Raas, Jangkar-Kalianget, Jangkar-

Sapudi, Jangkar-Kangean, Kalianget-Sapudi, Kalianget-Raas, Kalianget-Kangean, dan lintas antarprovinsi, yaitu Ketapang-Gilimanuk, Paciran-Bahaur (Kalimantan Tengah), Paciran-Garongkong (Sulawesi Selatan), Kalianget-Poteran (Talango), Ketapang-Lembar (Nusa Tenggara Barat) dan Jangkar-Lembar (Nusa Tenggara Barat).

2.4.3.2 Indeks Konektivitas

Indeks konektivitas adalah indikator untuk mengukur kinerja Jalan Provinsi dalam menghubungkan pusat kegiatan dan/atau kabupaten/kota di Jawa Timur. Indeks konektivitas ini merupakan indeks komposit yang terdiri atas 3 (tiga) variabel yakni Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Services), jalan yang memenuhi persyaratan teknis, dan kondisi kemantapan jalan.

Masing - masing variabel mempunyai tingkat dukungan yang berbeda tetapi memberikan pengaruh yang positif, sehingga semakin tinggi nilai masing-masing variabel akan semakin tinggi nilai indeks konektivitas. Indeks Konektivitas sampai Tahun 2023 mencapai 0,810. Nilai tersebut didukung oleh pemenuhan persyaratan teknis jalan yang mencapai 62,61%, persentase kemantapan jalan provinsi yang mencapai 89,25% dengan Rasio Volume Kendaraan (RVK) < 75% yang mencapai 84,66%. Pemerintah Provinsi Jawa Timur ke depannya akan tetap mengoptimalkan pelaksanaan program prioritas penanganan jalan melalui pelebaran jalan menuju standar, pemeliharaan berkala jalan, dan pemeliharaan rutin jalan.

Tabel 2. 47 Indeks Konektivitas Provinsi Jawa Timur

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Konektivitas	0,713	0,758	0,707	0,810	0,825

Sumber: Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur

2.4.3.3 Jaringan Irigasi

Capaian jaringan irigasi dalam kondisi baik di Jawa Timur pada Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020 cenderung fluktuatif. Namun pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 secara perlahan mulai mengalami peningkatan. Peningkatan capaian jaringan irigasi dalam kondisi baik pada Tahun 2023 tidak terlepas dari adanya upaya penanganan jaringan irigasi yang meliputi rehabilitasi pada 20 (dua puluh) Daerah Irigasi (DI), pemeliharaan pada 125 (seratus dua puluh lima) DI, dan operasional pada 176 (seratus tujuh puluh enam) DI.

Tabel 2. 48 Indikator Jaringan Irigasi Provinsi Jawa Timur

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	69,15	68,79	68,86	68,90	68,95

Sumber : Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur

2.4.3.4 Perumahan Permukiman yang Layak Huni

Kegiatan yang bersifat multi sektor dan sangat berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat, dimana dalam penyelenggaraannya diharapkan

masyarakat dapat bertempat tinggal secara layak di lingkungan yang aman, sehat, harmonis dan berkelanjutan. Ketersediaan sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman meliputi drainase, persampahan, sanitasi, dan air bersih dan PSU merupakan komponen penting dalam mewujudkan hunian yang layak dan berkelanjutan.

Tabel 2. 49 Indikator Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Jawa Timur

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Capaian Pelayanan Infrastruktur Dasar Perumahan Permukiman yang Layak Huni	80,83	82,18	80,97	80 ,82	83,49
Persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni dan terjangkau	65,61	68,08	66,93	66,28	70,74

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov. Jatim
Keterangan: Jumlah rumah tangga mulai tahun 2021 menggunakan hasil SP2020

Dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar menjadi prasyarat utama. Indikator Persentase Capaian Pelayanan Infrastruktur Dasar Perumahan Permukiman yang Layak Huni memberikan gambaran tingkat pemenuhan akses masyarakat terhadap hunian yang layak, aman dan terjangkau; akses air minum layak serta akses sanitasi (air limbah) yang layak di Provinsi Jawa Timur. Adapun kriteria hunian layak berdasarkan SDG's adalah kecukupan luas bangunan, ketahanan bangunan, akses air minum layak, dan akses sanitasi layak. Persentase Capaian Pelayanan Infrastruktur Dasar Perumahan Permukiman Layak Huni pada Tahun 2023 telah mencapai 83,49%. Di sisi lain, capaian persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni pada Tahun 2023 adalah 70,74%. Capaian ini berada di bawah target yang telah ditetapkan Nasional sebesar 69,80%. Upaya yang akan dilakukan dalam pencapaian infrastruktur dasar perumahan permukiman yang layak huni adalah peningkatan akses layanan air minum layak melalui peningkatan kapasitas SPAM regional dan penanganan desa rawan kekeringan, peningkatan akses sanitasi layak melalui pembangunan IPAL komunal, dan peningkatan rumah tinggal layak huni yang bekerjasama dengan *stakeholder* lain.

2.4.3.5 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, yaitu Tahun 2019-2022 cenderung meningkat serta melampaui target yang ditetapkan. Peningkatan IKLH Tahun 2022 dibandingkan Tahun 2021 tidak terlepas dari adanya berbagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara intensif baik melalui kegiatan fisik (penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, rehabilitasi lahan kritis, dan sebagainya) maupun kegiatan non fisik (pengawasan, pembinaan, penyusunan kebijakan, dan sebagainya) dengan turut melibatkan para stakeholder terkait. Namun pada Tahun 2023 terjadi penurunan IKLH dikarenakan belum optimalnya pengelolaan air limbah khususnya pada

kegiatan rumah tangga dan UMKM sehingga masih ditemui pembuangan air limbah yang belum memenuhi baku mutu ke badan air.

Tabel 2. 50 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dan Nasional

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jawa Timur	67,10	67,70	68,49	69,92	69,59
Nasional	66,55	70,27	71,41	72,42	72,54

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

Di sisi lain terkait dengan capaian IKLH kabupaten/kota di Jawa Timur cenderung dinamis namun masih berada di dalam kategori sedang (50≤IKLH<70) sampai dengan baik (70≤IKLH<90). Pada Tahun 2023 terdapat 33 (tiga puluh tiga) kabupaten/kota yang berada dalam kategori sedang dan 5 (lima) kabupaten/kota yang berada dalam kategori baik. Hal ini perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan khususnya bagi kabupaten/kota yang memiliki capaian IKLH dalam kategori sedang sama halnya dengan Provinsi Jawa Timur seiring dengan meningkatnya tekanan terhadap lingkungan karena adanya peningkatan jumlah dan aktivitas penduduk di Jawa Timur.

2.4.4 Daya Saing Iklim investasi

2.4.4.1 Indeks Demokrasi

Pada Tahun 2009 Pemerintah melakukan pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dengan tujuan untuk mengukur demokrasi politik, perkembangan demokrasi di Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota dan mengukur perkembangan demokrasi dua sisi yakni peran negara (pemerintah) dan Masyarakat. Sehingga, memperoleh dasar terukur untuk penyusunan program pembangunan politik baik untuk pemerintah pusat maupun daerah.

Dalam perkembangannya hingga Tahun 2021 pengukuran Indeks Demokarsi Indonesia (IDI) pada level provinsi mengalami perubahan metode pengukuran yang semula pada metode lama mengedepankan demokrasi politik mengalami perubahan dengan fokus pada demokrasi lebih luas dengan melibatkan aspek politik. Senyampang dengan hal tersebut pengukuran yang semula dengan menggunakan metode lama dengan pengukuran 3 (tiga) Aspek, 11 (sebelas) Variabel dan 28 (dua puluh delapan) Indikator dan mulai Tahun 2021 perhitungan IDI diubah dengan menggunakan metode baru dan terformulasikan kedalam 3 (tiga) Aspek dan 22 (dua puluh dua) variabel.

Tabel 2. 51 Persentase Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2019–2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Aspek Kebebasan Sipil	77,21	72.14	80.51	-	-
Aspek Hak-Hak Politik	67,45	80.25	56.43	-	-
Aspek Lembaga Demokrasi	75,97	80.55	81.09	-	-
Aspek Kebebasan	-	-	-	88.11	88.48
Aspek Kesetaraan	-	-	-	81.14	82.12
Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi	-	-	-	74.81	84.77

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	72,86	77.68	70.71	81.31	84.92

Sumber: Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur

Pencapaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Jawa Timur selama Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. IDI tertinggi terjadi di Tahun 2023 yaitu sebesar 84,92 atau meningkat sebesar 3,61 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Selama Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 capaian dari seluruh aspek pengukuran IDI di Provinsi Jawa Timur terus mengalami peningkatan. Peningkatan terbesar terjadi pada aspek kapasitas lembaga demokrasi. Strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan IDI adalah penguatan kapasitas SDM yang mengenai IDI melalui pembekalan atau pelatihan, serta menyusun regulasi dalam mengoptimalkan capaian IDI Provinsi Jawa Timur.

2.4.4.2 Kriminalitas

Kriminalitas adalah segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku serta norma-norma sosial dan agama. Selama rentang Tahun 2019-2023, kriminalitas di Jawa Timur memiliki kecenderungan menurun. Angka kriminalitas diperoleh dari Data Polda Jatim melalui jumlah tindak kriminal yang terjadi selama 1 tahun per 10.000 penduduk. Risiko penduduk terjadi tindak pidana per 10.000 penduduk di Tahun 2023 sebesar 21 (dua puluh satu) menunjukkan bahwa terjadi 21 (dua puluh satu) tindak pidana di antara 10.000 penduduk per tahunya.

Tabel 2. 52 Kriminalitas

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan	31.419	24.186	24.844	60.236	21.046
2	Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 10.000 Penduduk	80	62	61	148	21

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

2.4.4.3 Ketenteraman,Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

Persentase penanganan gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat merupakan suatu indikator kinerja sebagai bentuk pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur, yang diperoleh dari hasil rata-rata pengukuran secara kuantitatif atas perbandingan data realisasi dengan target yang telah ditentukan pada kegiatan:

1. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibum);
2. Penegakan peraturan daerah (Perda)/peraturan kepala daerah (Perkada);
3. Keterlibatan Anggota Pelindungan Masyarakat (Linmas) dalam perlindungan masyarakat;
4. Peningkatan SDM; dan
5. Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran.

Realisasi kinerja diatas menggambarkan upaya menciptakan kondisi tenteram, tertib, dan teratur melalui kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Satuan

Polisi Pamong Praja. Berdasarkan data realisasi kinerja diatas dapat dijelaskan bahwa terdapat peningkatan realisasi kinerja pertahunnya yang diperoleh dari realisasi di setiap indikator kinerja program secara keseluruhan telah melampaui target dan terjadi peningkatan dari sisi kuantitas pelaksanaan kegiatan.

Tabel 2. 53 Indikator Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat	-	-	99,47	99,57	100,55

Sumber: Satpol PP Provinsi Jawa Timur

2.4.4.4 Indeks Kerukunan Umat Beragama

Perhitungan Indeks Kerukunan Umat Beragama terdiri dari 3 (tiga) dimensi, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Kenaikan Indeks kerukunan beragama Jawa Timur menjadi cerminan suasana Jawa Timur yang selalu menjaga interaksi sosial guyub rukun dan harmonis. Kestabilan kondisi masyarakat Jawa Timur, sebagai salah satu Episentrum Indonesia di Wilayah Timur tentu sangat berpengaruh secara nasional.

Tabel 2. 54 Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Jawa Timur

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kerukunan Umat Beragama	73,69	-	73,57	72,32	77,55

Sumber: Kementerian Agama

2.4.4.5 Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah merupakan instrumen pengukuran yang bertujuan untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif dan dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Kerangka pengukuran indeks daya saing daerah mulai Tahun 2022 terdiri dari empat komponen pembentuk daya saing, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi. Keempat komponen tersebut ditopang oleh 12 (dua belas) pilar daya saing. Indeks Daya Saing Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 dan 2023 lebih baik dibandingkan dengan nasional serta berada pada peringkat ke-5 secara nasional.

Tabel 2. 55 Indeks Daya Saing Daerah

No	Indeks Daya Saing Daerah	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jawa Timur				3,74	3,78
2	Nasional				3,26	3,44

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional

2.4.4.6 Indeks Risiko Bencana

Mulai Tahun 2019 Indeks Resiko Bencana dihitung di 38 (tiga puluh delapan) kabupaten/kota di Jawa Timur, sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya hanya sebagian dari kabupaten/kota yang dijadikan sebagai sampel. Capaian Indeks Risiko Bencana (IRB) terus menurun hingga Tahun 2022 sebesar 108,69 dan masuk dalam kelas sedang.

Hal ini dikarenakan indeks kapasitas daerah, yang merupakan salah satu komponen perhitungan IRB, terus mengalami kenaikan. Selanjutnya pada tahun 2023, terdapat pemutakhiran data bencana (H) dan kerentanan (V) terbaru menggunakan baseline Kajian Risiko Bencana Tahun 2021, sehingga capaian berdasarkan launching Indeks Risiko Bencana terbaru, capaian IRB Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023 adalah sebesar 121,05 dengan kategori sedang. Klasifikasi Indeks Risiko Bencana adalah: (a) Tinggi (>144); (b) Sedang (13 – 144); (c) Rendah (<13).

Tabel 2. 56 Indeks Risiko Bencana Provinsi Jawa Timur

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Risiko Bencana	137,88	126,42	117,26	108,69	121,05*

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur

*Catatan *) : Data capaian menggunakan pemutakhiran data bencana (H) dan kerentanan (V) terbaru berdasarkan baseline kajian risiko bencana Tahun 2021 (Sumber: BNPB)*

2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

Hasil evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 Provinsi Jawa Timur tidak sepenuhnya berpijak dari data dan capaian kuantitatif namun ada beberapa indikator yang bersifat kualitatif namun dikuantitatifkan sesuai petunjuk Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 600.2.1/1570/SJ tentang Penyusunan Evaluasi terhadap Hasil Pelaksanaan RPJPD Tahun 2005-2025. Hal ini dimaksudkan agar dapat ditentukan kriteria penilaian secara umum. Hasil evaluasi RPJPD didasarkan atas akumulai hasil rerata penilaian capaian RPJMD yang menghasilkan nilali 89,00 atau dengan predikat Baik.

Tabel 2. 57 Hasil Penilaian RPJMD

Periode RPJMD	Tahun	Nilai Rata-rata	Kriteria
RPJMD I	2006 – 2008	80	Baik
RPJMD II	2009 – 2014	96	Sangat Baik
RPJMD III	2014 – 2019	88	Baik
RPJMD IV	2019 – 2024	91	Sangat Baik
Nilai		89	Baik

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Timur

Evaluasi terhadap hubungan atau keselarasan antara visi, misi, tujuan sasaran RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 menghasilkan beberapa kesimpulan berikut:

1. Pada dokumen RPJPD, belum tersusun logika yang membantu *cascading* visi (pokok visi) ke dalam misi, kemudian ke tujuan, sasaran pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Timur yang tersedia adalah *cascading* arah kebijakan untuk setiap sasaran, baik secara umum maupun per periode/tahapan lima

tahunan. *Cascading* juga akan mempermudah pemerintah daerah untuk memastikan sebuah pokok visi dapat dicapai melalui misi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan yang mana. Implikasi dari ketiadaan *cascading* ini adalah sasaran pokok dan arah kebijakannya belum sepenuhnya terkelompokkan dengan baik, terdapat pengulangan dan tumpang tindih. Selain itu, terdapat hanya satu tujuan untuk lima penyelenggaraan misi pembangunan jangka panjang.

2. Terdapat arah kebijakan yang harus dilakukan namun sepenuhnya bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah, seperti pembangunan urusan agama, kepastian hukum dan HAM. Hal tersebut akan mempersulit implementasi arah kebijakan tersebut dalam proses pembangunan.

Evaluasi terhadap capaian indikator kinerja makro pembangunan daerah selama periode 2005 hingga 2022 menghasilkan beberapa kesimpulan berikut:

1. Secara umum, capaian atau realiasi indikator kinerja pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 memperlihatkan kondisi yang lebih baik dibandingkan Tahun 2005 atau 2010 pada beberapa indikator.
2. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja indikator yang sama di Provinsi Jawa Timur yang bisa diidentikkan dengan rata-rata kinerja kabupaten/kota se-Jawa Timur, maka Provinsi Jawa Timur masih memiliki permasalahan sendiri yang harus diselesaikan di masa mendatang.
3. Interpertasi perubahan indikator kinerja makro adalah:
   a. Pasca pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi mulai pulih, namun tetap saja berada di bawah pertumbuhan ekonomi di Tahun 2005 maupun capaian nasional;
   b. Meskipun ada kecenderungan penurunan, namun angka kemiskinan tetap relatif stagnan;
   c. Ketimpangan antar kelompok masyarakat berkategori sedang di tahun sampai dengan 2021 dan rendah di Tahun 2022; lebih rendah (baik) dari capaian nasional. Harus tetap dijaga /diturunkan karena indikator ini merupakan indikator penting pembangunan makro nasional dan daerah;
   d. IPM masih berkategori sedang, berada di ranking menengah secara Nasional.
   e. Tingkat Pengangguran Terbuka masih menjadi indikator penting yang perlu diperhatikan.

Berdasarkan temuan atau kesimpulan hasil evaluasi maka berikut ini adalah rekomendasi untuk tindak lanjutnya:

a. Rekomendasi Sumber Daya Manusia
   1) Pemenuhan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pemenuhan kebutuhan sosial dasar lainnya secara berkelanjutan.
   2) Penguatan karakteristik SDM melalui internalisasi nilai-nilai luhur agama dan budaya serta kearifan lokal ke dalam kurikulum sekolah.
   3) Penguatan daya saing SDM melalui peningkatan kompetensi, peningkatan etos dan kerja keras sebagai watak dasar masyarakat Provinsi Jawa Timur.
   4) Inovasi program yang fokus pada daerah dengan tingkat IPM terendah, yaitu kabupaten dan kota di Pulau Madura serta Tapal Kuda.

5) Menjadikan “Pengembangan Daya Saing SDM” sebagai Proyek Strategis (*Cross Cuting Program*) Daerah yang didukung dengan koordinasi lintas Perangkat Daerah.
6) Akselerasi pencapaian “Jawa Timur Santri” melalui integrasi pemerintah daerah dengan pesantren, organisasi kemasyarakat dan lembaga strategis lainnya.
7) Penguatan kesetaraan gender dan keadilan melalui pelibatan kelompok strategis masyarakat.
8) Meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah dengan mengoptimalkan Program Wajib Belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).
9) Memastikan semua Tenaga Kerja Jawa Timur terdaftar sebagai Peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dengan mengoptimalkan tugas dan fungsi pengawasan terhadap perusahaanperusahaan di Jawa Timur.
10) Meningkatkan koordinasi dan mendorong 17 (tujuh belas) kabupaten/kota di Jawa Timur yang belum UHC (*Universal Health Coverage*) agar mampu masuk dalam kategori UHC.

b. Rekomendasi Pembangunan Sosial
1) Kemiskinan perlu perhatian serius dari Provinsi Jawa Timur, mengingat capaian Tahun 2022 sebesar 10,49% yang menempatkan Jawa Timur menduduki peringkat ke-19 (sembilan belas) secara nasional serta berada di bawah capaian nasional sebesar 9,57%. Percepatan pengurangan penduduk miskin kurang efektif, hal ini dibuktikan dengan daerah yang selama 5 (lima) tahun terakhir tetap pada kategori kemiskinan sangat tinggi dan 10 (sepuluh) daerah pada klaster tinggi: Klaster kemiskinan sangat tinggi, yaitu Sampang, Sumenep, Bangkalan, Tuban, Probolinggo; Klaster kemiskinan Tinggi: Ngawi, Bondowoso, lamongan, Bojonegoro, Situbondo, Gresik, Trenggalek, Kediri, Madiun, dan Nganjuk.
2) Pemutakhiran data kemiskinan ekstrem secara berkala dan sistematis, agar tidak hanya tergantung dari data dari pemerintah pusat (*given*) yang tingkat validitasnya rendah.
3) Mengevaluasi pendekatan pengentasan kemiskinan yang selama ini kurang efektif dan membangun pola pengentasan kemiskinan yang terpadu antara pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan kabupaten/kota.
4) Melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial dan pemerintah kabupaten/kota secara optimal agar semua masyarakat miskin di Jawa Timur bisa masuk dalam Program JKN.

c. Rekomendasi Pembangunan Ekonomi
1) Penyusunan integrasi pembangunan perdagangan, industri dan pertanian yang terintegrasi sebagai upaya hilirisasi pengolahan komoditas strategis melalui konsep agrobisnis/agropolitan.
2) Implementasi *pentahelix* untuk percepatan aspek penelitian dan pengembangan di setiap Perangkat Daerah untuk menciptakan inovasi pembangunan daerah yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3) Pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk membuka akses konektivitas antar wilayah sebagai pendorong pengembangan agrobisnis, parisiwata, sentra industri dan perdagangan.
4) Perumusan kebijakan investasi baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri yang bersifat inklusif, yaitu berdampak pada pemerataan ekonomi, pembukaan lapangan kerja dan pananggulangan kemiskinan.
5) Percepatan penyusunan satu data, khususnya yang terkait dengan data kemiskinan ekstrim, *stunting* dan pemerlu kesejahteraan lainnya agar intervensi program dapat dilakukan lebih tepat sasaran dan efisien.
6) Mendorong sektor pertanian sebagai penyumbang PDRB terbesar ketiga setelah industri pengolahan dan perdagangan di Jawa Timur agar mampu menjadi faktor pendorong peningkatan Pengeluaran Perkapita masyarakat Jawa Timur yang masih mencapai 11,9 Juta pada Tahun 2022.

d. Rekomendasi Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan
1) Merumuskan masterplan pembangunan infrastruktur daerah yang sesuai dengan arah dan kebijakan penataan ruang dan kebijakan pembangunan jangka Panjang.
2) Implementasi pembangunan berwawasan lingkungan.
3) Pembangunan infrastruktur kebinamargaan, permukiman yang sesuai dengan arahan pola ruang dan struktur ruang dalam dokumen RTRW Provinsi Jawa Timur.
4) Peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup melalui peningkatan kerjasama dengan para stakeholder terkait.
5) Menekan laju alih fungsi lahan pertanian dan kehutanan yang masih terjadi sebagai dampak dari pembangunan sektor perumahan dan perindustrian melalui kebijakan daerah yang efektif dan berkelanjutan.

e. Rekomendasi Pembangunan Daya Saing
1) Sesuai dengan strategi RPJPD Provinsi Jawa Timur *people centered development*, maka ke depan perlu menempatkan pembangunan SDM sebagai kebijakan penguatan daya saing Jawa Timur, mengingat investasi SDM merupakan tindakan yang paling strategis ke depan.
2) Mengintegrasikan kebijakan investasi (kemudahan usaha) antara pemerintah provinsi Jawa Timur dengan kabupaten dan kota, agar birokrasi menjadi cepat, murah dan transparan.
3) Pembangunan infrastruktur yang mendukung daya saing daerah, antara lain berfungsi sebagai stimulus industri, perdagangan, pariwisata dan pengembangan potensi lokal lainnya.
4) Inovasi dan pengembangan pelayanan publik berbasis *Information and Communication of Technology* (*ICT).*
5) Meningkatkan pola koordinasi lintas *stakeholder* pembangunan Jawa Timur.
6) Agar suasana yang aman, tertib dan harmonis dapat terus dipertahankan.

f. Rekomendasi Peningkatan Tatakelola dan Pelayanan Publik
1) Kebijakan penguatan kualitas tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik ini menjadi “gerakan” yang bertenaga dan berjalan berkelanjutan, maka perlu dukungan politik (*good will*) yang sungguh-sungguh dari pimpinan daerah

(Bupati, Walikota, DPRD) yang diwujudkan dengan pembentukan "*task force*" reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

2) Satuan Kerja (*task force*) peningkatan reformasi birokrasi dan pelayan public ini secara teknis harus dipimpin oleh Lembaga yang levelnya diatas eselon II (Kepala Dinas) dan memiliki kewenangan yang relevan dan dapat mengkoordinasi lintas perangkat daerah.

3) Gerakan peningkatan kualitas tatakelola dan pelayanan public harus didukung dengan mekanisme perencanaan (*planning*), pelaksanaan (*act*) dan evaluasi (*evaluation*) yang kuat dan konsisten.

g. Rekomendasi Pembangunan Kesalehan dan Harmoni Sosial

1) Internalisasi nilai-nilai kesalehan dan toleransi ke dalam kurikulum sekolah.

2) Menempatkan program kepemudaan dan keolahragaan sebagai media untuk membangkitkan rasa persaudaraan, sportivitas dan menangkal permasalahan-permasalahan pemuda dengan kegiatan yang positif.

3) Merevitalisasi pesantren sebagai pusat pendidikan dan sumber nilai (akhlak) bagi para pemuda dan masyarakat melalui berbagai kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan.

2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

2.6.1. Proyeksi Kependudukan

2.6.1.1. Proyeksi Penduduk

Penduduk Provinsi Jawa Timur dari waktu ke waktu terus bertambah. Pertambahan penduduk ini sudah tentu membawa konsekuensi penyediaan fasilitas publik yang memadai dan juga kesempatan kerja yang menjamin kelangsungan hidup dan kesejahteraan penduduk. Sebagaimana tabel 2.58 dibawah ini, dapat dilihat bahwa pada Tahun 2025 penduduk Provinsi Jawa Timur berjumlah 42.089,27 ribu jiwa, dan Tahun 2030 akan meningkat menjadi 43.279,08 ribu jiwa. Pada Tahun 2035 menjadi 44.145,66 ribu jiwa, pada Tahun 2040 menjadi 44.669,90 ribu jiwa, pada Tahun 2045 menjadi 44.860,79 ribu jiwa.

Tabel 2. 58 Proyeksi Penduduk Provinsi Jawa Timur

Indikator	Kondisi Tahun 2020	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Penduduk Laki-laki (ribu)	20.259,66	20.978,46	21.522,76	21.891,83	22.087,50	22.125,00
Penduduk Perempuan (ribu)	20.341,72	21.110.82	21.756,32	22.253,83	22.582,40	22.735,79
Penduduk Total (ribu)	40.601,37	42.089,27	43.279,08	44.145,66	44.669,90	44.860,79
Komposisi Umur (%)						
0-14	21,40	20,59	19,78	19,2	18,28	17,63
15-64	70,26	69,29	68,1	66,58	65,57	64,51
65+	8,35	10,11	12,13	14,23	16,15	17,87
Dependency Ratio (%)	42,34	44,31	46,85	50,21	52,52	55,02

Sumber: BPS RI

Proyeksi Penduduk Provinsi Jawa Timur menurut usia produktif - tidak produktif dapat digambarkan bahwa untuk kelompok tidak produktif kategori usia muda (0-14) ada kecenderungan menurun, sebaliknya kelompok usia tidak produktif

kategori usia tua (65+) ada kecenderungan meningkat. Sedangkan penduduk usia produktif usia 15-64 ada kecenderungan menurun, karena sudah mulai menurun Bonus Demografinya, hingga habis masa bonusnya Tahun 2035. Masa bonus demografi sudah dan sedang dialami Provinsi Jawa Timur pada periode 2000-2030 dan masa puncak pada Tahun 2020.

2.6.1.2. Proyeksi Fertilitas

Kelahiran (Fertilitas) adalah salah satu faktor penting dalam mempengaruhi jumlah penduduk. Fertilitas dapat diartikan sebagai kemampuan seorang wanita untuk menghasilkan kelahiran hidup. Sementara itu, fekunditas berarti potensi seorang wanita untuk menjadi hamil. Berbeda dengan fertilitas, fekunditas berkaitan dengan potensi untuk melahirkan tanpa memperhatikan apakah seorang wanita benar-benar melahirkan seorang anak atau tidak.

Tabel 2. 59 Proyeksi Kelahiran Provinsi Jawa Timur

Indikator	Kondisi Tahun 2020	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Total Fertility Rate (TFR)	1,98	1,94	1,92	1,88	1,85	1,84
Crude Birth Rate (CBR)	14,99	13,87	13,00	12,25	11,70	11,47
Jumlah Kelahiran (ribu)	608,74	583,60	562,50	540,73	522,76	514,39

Sumber: BPS RI

Untuk mengetahui tingkat kelahiran hidup antara lain dengan menggunakan rumus *Cride Birth Rate* (*CBR*). *CBR* adalah banyaknya kelahiran hidup pada setiap seribu orang penduduk. Proyeksi pada Tahun 2025 *CBR* Provinsi Jawa Timur sebesar 1,94 yang artinya terdapat 1,94 kelahiran per 1000 penduduk. Angka tersebut diprediksi menurun pada Tahun 2045 menjadi 1,84.

Total Fertility Rate (TFR) adalah rata rata jumlah anak (laki-laki dan perempuan) yang dilahirkan oleh perempuan selama masa reproduktifnya. *Total Fertility Rate (TFR)* Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2025 diproyeksikan sebesar 1,94, artinya rata-rata sebanyak 1,9 anak dilahirkan oleh wanita selama masa reproduktifnya.

Provinsi Jawa Timur telah mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan TFR < 2,1 anak. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk konkret pengendalian penduduk. Capaian tersebut berpengaruh terhadap masa lamanya bonus demografi. Selain itu, pencapaian tersebut dapat meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak salah satunya dalam upaya pencegahan *stunting*.

2.6.1.3. Proyeksi Mortalitas

Peristiwa mortalitas (kematian) pada dasarnya merupakan kejadian akhir dari peristiwa morbiditas (kesakitan). Dengan demikian upaya pencegahan (preventif) terhadap morbiditas jauh lebih efisien dan efektif daripada upaya pengobatan (kuratif) dalam menurunkan kejadian mortalitas. Morbiditas dan mortalitas penduduk adalah kejadian yang selalu berubah-ubah. karena dipengaruhi oleh banyak faktor baik medis maupun non-medis.

Tabel 2. 60 Proyeksi Mortalitas Provinsi Jawa Timur

Indikator	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Usia Harapan Hidup Laki-Laki	71,77	72,30	72,81	73,37	73,68	73,80
Usia Harapan Hidup Perempuan	76,38	77,57	78,46	79,24	79,70	79,93
Usia Harapan Hidup Total	74,02	74,87	75,57	76,23	76,62	76,79
IMR Laki-Laki	16,55	12,79	10,99	9,30	8,30	7,86
IMR Perempuan	11,83	9,28	8,13	7,05	6,41	6,13
IMR Laki-Laki + Perempuan	14,25	11,08	9,60	8,20	7,38	7,02
Crude Death Rate (CDR)	6,94	7,43	8,18	9,03	10,09	11,26
Jumlah Kematian (ribu)	281,85	312,74	353,83	398,44	450,93	505,07

Sumber: BPS RI

Adapun proyeksi Usia Harapan Hidup (UHH) Provinsi Jawa Timur. Usia Harapan Hidup merupakan jumlah rata-rata usia yang diperkirakan pada seseorang atas dasar angka kematian pada masa tersebut. Pada Tahun 2025, UHH Provinsi Jawa Timur berjumlah sebesar 74,87 dan angka tersebut mengalami peningkatan pada Tahun 2045 yang menjadi sebesar 76,79 tahun.

Angka Kematian Bayi (AKB)/*Infant Mortality Rate (IMR)* merupakan jumlah kematian dari bayi yang dilahirkan per 1000 kelahiran hidup. AKB Provinsi Jawa Timur diproyeksikan mengalami penurunan. Pada Tahun 2025, AKB berjumlah sebesar 11,08 kematian bayi per 1000 kelahiran hidup. Sedangkan pada Tahun 2045, angka tersebut menurun menjadi 7,02 kematian. Rendahnya tingkat kematian bayi disebabkan oleh semakin meningkatnya pengetahuan dan kesadaran penduduk dalam melaksanakan pola hidup sehat dan meningkatnya gizi keluarga serta diimbangi dengan peningkatan pelayanan kesehatan dengan jangkauan yang lebih luas.

2.6.2. Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana mengacu pada data proyeksi penduduk yang telah dilakukan oleh BPS. Dinamika kependudukan perlu diperhatikan untuk dilayani dan dipenuhi kebutuhan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah. Penentuan kebutuhan sarana dan prasarana mengacu SNI 03-1733-2004 tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan.

2.6.1.1 Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal

Asumsi dasar lingkungan perumahan yang digunakan berdasarkan SNI 03-1733-2004 adalah jumlah penghuni rumah rata-rata 5 jiwa, sehingga kebutuhan rumah di Tahun 2045 sebesar 8,97 juta unit rumah berdasarkan proyeksi penduduk yang telah dilakukan oleh BPS.

Tabel 2. 61 Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Provinsi Jawa Timur

Indikator	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	41.519.841	42.089.271	43.279.076	44.145.661	44.669.897	44.860.792
Proyeksi Kebutuhan Rumah (unit)	8.303.968	8.417.854	8.655.815	8.829.132	8.933.979	8.972.158

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Timur, diolah

2.6.1.2 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih

Jenis-jenis elemen perencanaan pada jaringan air bersih yang harus disediakan pada lingkungan perumahan adalah kebutuhan air bersih, jaringan air bersih, kran umum, dan hidran kebakaran. Dalam penyediaan kran umum, kapasitas minimum untuk kran umum adalah 30 liter/orang/hari. Dengan proyeksi penduduk pada Tahun 2045 sebesar 44,86 juta jiwa maka kebutuhan air bersih sebesar 491 juta meter kubik.

Tabel 2. 62 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Provinsi Jawa Timur

Indikator	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	41.519.841	42.089.271	43.279.076	44.145.661	44.669.897	44.860.792
Proyeksi Kebutuhan Air Bersih (Liter/Tahun)	454.642.258.950	460.877.517.450	473.905.882.200	483.394.987.950	489.135.372.150	491.225.672.400

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Timur, diolah

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 8 (MDN, 2006) menyatakan bahwa: “Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebesar 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari”.

Tabel 2. 63 Proyeksi Kebutuhan Air Minum Provinsi Jawa Timur

Indikator	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	41.519.841	42.089.271	43.279.076	44.145.661	44.669.897	44.860.792
Proyeksi Kebutuhan Air Minum (Liter/Hari)	2.491.190.460	2.525.356.260	2.596.744.560	2.648.739.660	2.680.193.820	2.691.647.520

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Timur, diolah

2.6.1.3 Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Air Limbah

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD), timbulan air limbah domestik dapat diperoleh berdasarkan data pemakaian air bersih, dengan menggunakan dasar perencanaan timbulan air limbah domestik berkisar 60 – 80% pemakaian air minum.

Proyeksi produksi air limbah domestik yang termasuk air limbah domestik *black water* dan *grey water*. Selain itu, menurut Peraturan Menteri PUPR yang sama menyebutkan bahwa rata-rata jumlah timbulan lumpur tinja yang dihasilkan manusia perhari yaitu 0,5-liter/orang/hari sesuai dengan Standar laju produksi lumpur tinja berada pada rentang 0,25 L/orang/hari - 0,5 L/jiwa/hari.

Tabel 2. 64 Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Air Limbah Domestik Provinsi Jawa Timur

Indikator	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	41.519.841	42.089.271	43.279.076	44.145.661	44.669.897	44.860.792
Proyeksi Timbulan Air Limbah (m^3/Hari)	570.281*)	942.510	1.726.596	2.219.240	2.219.240	3.579.891
Proyeksi Timbulan Lumpur Tinja (m^3/Hari)	20.575	21.045	21.637	22.073	22.335	22.430

Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Timur, diolah
*Keterangan: *) Data tahun 2022*

2.6.1.4 Proyeksi Kebutuhan Energi/Listrik

Setiap lingkungan perumahan harus mendapatkan daya listrik dari PLN atau dari sumber lain dan setiap unit rumah tangga harus dapat terpenuhi kebutuhan atas listrik dengan daya minimum sebesar 450 VA . Penduduk Jawa Timur pada Tahun 2045 diproyeksikan sebesar 44,86 juta jiwa sehingga daya listrik minimum yang dibutuhkan total sebesar 20 juta KVA yang dapat dipenuhi dari berbagai sumber energi meliputi energi yang tidak dapat diperbaharui (*nonrenewable*) dan energi baru terbarukan (*renewable*).

Tabel 2. 65 Proyeksi Kebutuhan Listrik Provinsi Jawa Timur

Indikator	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	41.519.841	42.089.271	43.279.076	44.145.661	44.669.897	44.860.792
Jumlah Rumah (unit)	8.303.968	8.417.854	8.655.815	8.829.132	8.933.979	8.972.158
Proyeksi Kebutuhan Listrik (KVA)	18.683.928	18.940.172	19.475.584	19.865.547	20.101.454	20.187.356

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Timur, diolah

2.6.1.5 Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan

Prakiraan jumlah timbulan sampah akan terus meningkat seiring dengan adanya peningkatan jumlah penduduk dan perubahan perilaku masyarakat. Salah satu prasarana persampahan adalah TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) namun seiring adanya kebijakan *zero emission* maka keberadaan TPA sebagai sumber penghasil emisi Gas Rumah Kaca (GRK) harus dilengkapi dengan kegiatan pengolahan sampah terpadu. Keberadaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) diharapkan dapat mengurangi tingginya timbulan sampah.

Kebutuhan TPST di Jawa Timur dihitung dengan merujuk pada SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan dengan diasumsikan setara kebutuhan TPA yang dilengkapi sistem daur ulang skala kota untuk > 480.000 jiwa. Untuk perhitungan jumlah timbulan sampah mengacu pada *tier-1* dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2022 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN).

Tabel 2. 66 Proyeksi Kebutuhan Prasarana Persampahan Provinsi Jawa Timur

Indikator	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	41.519.841	42.089.271	43.279.076	44.145.661	44.669.897	44.860.792
Proyeksi Timbulan Sampah	10.251.503.997	10.392.099.765	10.685.869.934	10.899.835.098	11.029.272.189	11.076.405.339
Proyeksi Jumlah Kebutuhan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	86	88	90	92	93	93

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Timur, diolah

2.6.1.6 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan

Penyediaan sarana kesehatan didasarkan pada jumlah penduduk yang dilayani oleh sarana tersebut. Beberapa jenis sarana kesehatan yang dibutuhkan adalah rumah sakit, tempat tidur rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, rumah sakit bersalin, praktek dokter, apotek, dan posyandu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan, ketersediaan temapt tidur rawat inap pada rumah sakit umum kelas A paling sedikit memiliki 250 tempat tidur. Adapun rasio standar minimal menurut *World Health Organization (WHO)*, 1 tempat tidur rumah sakit per 1.000 penduduk. Mengacu dua dasar tersebut sehingga diperoleh kebutuhan rumah sakit kelas A di Jawa Timur Tahun 2045 sebanyak 179 unit.

Adapun dasar yang digunakan dalam menentukan kebutuhan sarana kesehatan lain menurut SNI 03-1733-2004 adalah:

1. Puskesmas melayani kurang lebih 120.000 penduduk.
2. Puskesmas pembantu, klinik bersalin/BKIA, dan apotik melayani kurang lebih 30.000 penduduk.
3. Praktek dokter melayani kurang lebih 5.000 penduduk.
4. Posyandu melayani kurang lebih 1.250 penduduk.

Tabel 2. 67 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Indikator	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	41.519.841	42.089.271	43.279.076	44.145.661	44.669.897	44.860.792
Proyeksi Fasilitas Kesehatan (unit)						
1. Tempat Tidur Rumah Sakit	41.520	42.089	43.279	44.146	44.670	44.861
2. Rumah Sakit kelas A	166	168	173	177	179	179
3. Puskesmas	346	351	361	368	372	374
4. Puskesmas Pembantu	1.384	1.403	1.443	1.472	1.489	1.495
5. Klinik Bersalin / BKIA	1.384	1.403	1.443	1.472	1.489	1.495

Indikator	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
6. Praktek Dokter	8.304	8.418	8.656	8.829	8.934	8.972
7. Apotek	1.384	1.403	1.443	1.472	1.489	1.495
8. Posyandu	33.216	33.671	34.623	35.317	35.736	35.889

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Timur, diolah

2.6.1.7 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan

Dalam menentukan sarana Pendidikan maka terlebih dahulu dilakukan proyeksi sesuai kategori usia sehingga dapat ditentukan jumlah sekolah yang ideal. Diasumsikan pada tingkat Pendidikan TK berusia 5 – 6 tahun, tingkat pendidikan SD/MI berusia 7 – 12 tahun, tingkat pendidikan SMP/MTs berusia 13-15 tahun, dan tingkat pendidikan SMA/MA/SMK berusia 16 – 18 tahun.

Kebutuhan ruang kelas berdasarkan daya tampung paling efektif dan efisien berdasarkan kondisi lingkungan untuk tingkat pendidikan TK adalah 35 – 40 siswa, sedangkan pada tingkat pendidikan SD, SMP/MTs, dan SMA/ MA/SMK sebanyak 40 (empat puluh) siswa. Proyeksi kebutuhan ruang kelas ini dapat menentukan banyaknya sekolah pada setiap tingkat pendidikan dengan rincian sebagai berikut:

1. Tingkat pendidikan TK minimum memiliki 2 (dua) ruang kelas.
2. Tingkat pendidikan SD/MI memiliki 12 (dua belas) rombongan belajar untuk tipe A, 9 (sembilan) rombongan belajar untuk tipe B, dan 6 (enam) rombongan belajar untuk tipe C. Dalam perhitungan proyeksi jumlah sekolah SD/MI diasumsikan setiap sekolah memiliki 6 (enam) ruang kelas.
3. Tingkat pendidikan SMP/MTs dan SMA/MA/SMK memiliki 27 (dua puluh tujuh) rombongan belajar untuk tipe A, 18 (delapan belas) rombongan belajar untuk tipe B, dan 9 (sembilan) rombongan belajar untuk tipe C. Namun minimum 6 (enam) ruang kelas sehingga dalam perhitungan proyeksi jumlah sekolah SMP/MTs dan SMA/MA/SMK diasumsikan setiap sekolah memiliki 6 (enam) ruang kelas.

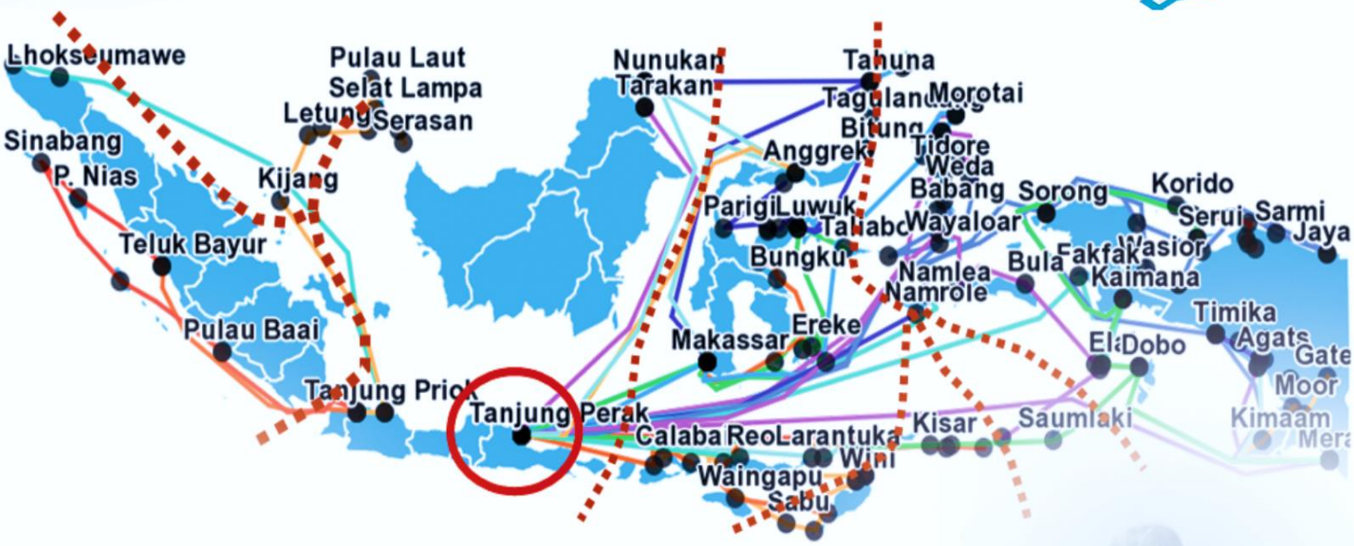
Tabel 2. 68 Proyeksi Fasilitas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Indikator	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk Usia 5 – 6 tahun (jiwa)	1.127.935	1.102.836	1.157.909	1.116.091	1.074.656	1.038.869
Jumlah Penduduk Usia 7 – 12 tahun (jiwa)	3.485.306	3.450.932	3.436.122	3.449.146	3.324.582	3.204.117
Jumlah Penduduk Usia 13 – 15 tahun (jiwa)	1.773.723	1.766.562	1.720.070	1.737.107	1.717.478	1.657.003
Jumlah Penduduk Usia 16 – 18 tahun (jiwa)	1.784.315	1.766.251	1.758.394	1.677.869	1.757.394	1.691.070
Proyeksi Fasilitas Pendidikan (unit)						

Indikator	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
1. TK						
- Kelas	32.227	31.510	33.083	31.888	30.704	29.682
- Sekolah	16.114	15.755	16.542	15.944	15.352	14.841
2. SD/MI						
- Kelas	87.133	86.273	85.903	86.229	83.115	80.103
- Sekolah	14.522	14.379	14.317	14.372	13.853	13.351
3. SMP/MTs						
- Kelas	44.343	44.164	43.002	43.428	42.937	41.425
- Sekolah	7.391	7.361	7.167	7.238	7.156	6.904
4. SMA/MA/SMK						
- Kelas	44.608	44.156	43.960	41.947	43.935	42.277
- Sekolah	7.435	7.359	7.327	6.991	7.323	7.046

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Timur, diolah

JAWA TIMUR SEBAGAI CENTER OF GRAVITY EKONOMI KAWASAN TIMUR INDONESIA



2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Berdasarkan RPJPN Tahun 2025-2045, bahwa wilayah Jawa berkontribusi pada perekonomian Indonesia sebesar 56,5% pada tahun 2022. Selanjutnya, Wilayah Jawa diproyeksikan memiliki pertumbuhan ekonomi rata-rata sekitar 5,9%-6,5% per tahun, dengan kontribusi wilayah pada kisaran 48,3% pada Tahun 2045. Provinsi Jawa Timur sendiri berkontribusi sebesar 14,22% terhadap total perekonomian nasional pada Tahun 2023. Pada Tahun 2045, Provinsi Jawa Timur ditargetkan berkontribusi sebesar 12,36% terhadap PDRB Nasional.

Dengan meluasnya wilayah perkotaan di Pulau Jawa, pada Tahun 2045 diproyeksikan kurang lebih 70% penduduk di Wilayah Jawa bertempat tinggal di wilayah perkotaan. Kawasan strategis aglomerasi penduduk tersebut menjadi suatu kekuatan *market* yang sangat potensial dan menjadi *demand generator* bagi kawasan lainnya. Aglomerasi penduduk juga memungkinkan terjadinya diversifikasi aktivitas ekonomi secara signifikan, dengan aktivitas ekonomi penumpu utama di kawasan perkotaan adalah sektor jasa *(tertiary sector).*

Kawasan perkotaan juga menjadi tempat interaksi multikultural yang harus diiringi dengan penguatan ketahanan sosial. Signifikansi peran kawasan perkotaan dan pesatnya aktivitas ekonomi perkotaan tersebut perlu diperkuat dan didukung dengan tetap menjaga kualitas lingkungan, serta menguatkan ketahanan kawasan perkotaan terhadap bencana dan perubahan iklim. Dalam konsep kawasan strategis, kawasan fungsional perkotaan di Jawa tumbuh secara generik menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu megapolitan, metropolitan, dan pusat aglomerasi.

Wilayah Jawa telah tumbuh sejak lama menjadi kawasan strategis bagi industri skala nasional karena kekuatan pasarnya (*market strength*). Industri yang tumbuh pesat di Jawa adalah industri manufaktur dan *consumer goods*, agroindustri, pengolahan petrokimia, dan pengolahan material/metalurgi. Modal basis industri ini tetap perlu diperkuat melalui pengembangan *multi-infrastructure, maritime backbone, dan global/major port* yang mumpuni guna menurunkan *logistic* dan *production cost* serta meningkatkan daya saing industri di Jawa. Selain itu, industri di Jawa perlu ditransformasikan menuju industri yang berbasis *green energy* dan/atau menggunakan teknologi yang ramah lingkungan.

Dengan demikian, Wilayah Jawa diarahkan menjadi wilayah "Megalopolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi, dan Berkelanjutan", melalui 5 (lima) prioritas sebagai berikut:

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia berdaya saing global (talenta global); serta percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem pada kawasan afirmasi Tertinggal, Terpencil, dan Terluar (3T).
2. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan seperti: kawasan strategis perkotaan, kawasan strategis industri ramah lingkungan, industri berbasis inovasi riset dan teknologi, kawasan strategis pariwisata, dan kawasan strategis pertanian mendukung kemandirian pangan.
3. Percepatan pembangunan berbasis pengembangan pembangunan hijau dan sirkular, serta penguatan kawasan konservasi strategis pada kawasan lindung dan *geopark*; termasuk optimalisasi potensi energi baru dan terbarukan, guna menjamin ketahanan energi, air, dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan.

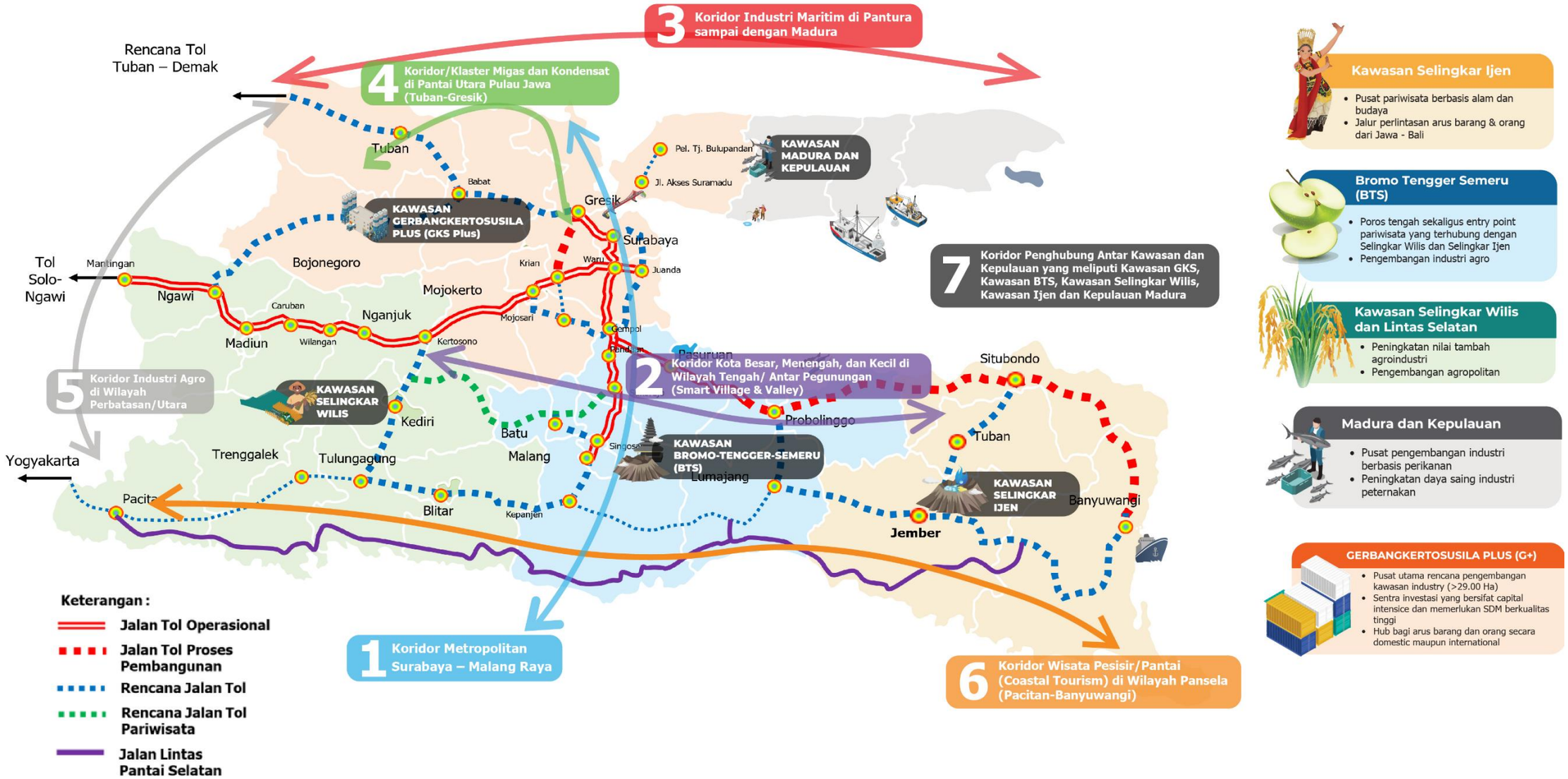
4. Pengembangan infrastruktur pendukung, seperti pengembangan infrastruktur konektivitas *multi-infrastructure backbone* dan *feeder*, serta *maritime backbone*, yang menginterkoneksikan antar kawasan strategis; pengembangan jalur konektivitas antar wilayah dan jalur khusus logistik; pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan dan digital; penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan; serta peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar.
5. Penuntasan RDTR kabupaten/kota, perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, terutama mitigasi risiko pada wilayah perkotaan dan pedesaan, serta penguatan ketangguhan bencana dan perubahan iklim, terutama pada kawasan-kawasan perkotaan dan kawasan strategis.

Mendukung lima prioritas nasional, Provinsi Jawa Timur merumuskan kebijakan kewilayahan berdasarkan faktor sosial, ekonomi dan lingkungan yang meliputi pendidikan, kesehatan, jumlah penduduk miskin, dan kondisi ekonomi. Kebijakan kewilayahan ini merupakan keterpaduan pembangunan antar sektor guna menciptakan daya saing daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara umum, kebijakan pembangunan kewilayahan di Provinsi Jawa Timur diarahkan pada:

1. Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat melalui peningkatan kompetensi dan pemerataan distribusi tenaga kesehatan dan pendidikan.
2. Pengembangan dan peningkatan sektor unggulan industri, pariwisata, pertanian, kelautan, perikanan, serta kehutanan dalam mengembangkan perekonomian yang produktif, efisien dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Pemerataan pembangunan antar wilayah melalui peningkatan layanan transportasi dalam rangka mendukung mobilitas orang dan barang, peningkatan layanan dasar permukiman, peningkatan layanan infrastruktur sumber daya air, dan peningkatan jaringan prasarana lainnya.
4. Peningkatan jaringan infrastruktur perkotaan yang terintegrasi dengan sistem permukiman serta peningkatan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk mendukung pembangunan dan kegiatan sektor produktif.
5. Penguatan peran kawasan metropolitan terintegrasi dengan kawasan agropolitan, kawasan industri dan gugusan kawasan pegunungan.
6. Percepatan keseimbangan pembangunan antara koridor pertumbuhan wilayah utara-selatan dan kepulauan sebagai upaya mengurangi disparitas antar wilayah di Provinsi Jawa Timur.
7. Peningkatan preservasi dan konservasi pada kawasan lindung dengan prinsip pelestarian *geodiversity*, *biodiversity*, *culture diversity* dan pembangunan berkelanjutan serta peningkatan kapasitas ketangguhan terhadap penanggulangan bencana.
8. Optimalisasi peran kawasan budidaya yang produktif dan kompetitif dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi sesuai potensi serta daya dukung daya tampung lingkungannya.
9. Perlindungan terhadap alih fungsi lahan produktif pertanian dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional.

10. Pemaduserasian antara koridor pertumbuhan wilayah ruang darat, ruang laut, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, sebagai bentuk nilai tambah sinergitas, disertai Kawasan pertahanan keamanan melalui pengaturan kelembagaan, pengendalian terhadap pemanfaatan ruang dan memperhatikan kerawanan terhadap bencana serta adaptasi perubahan iklim.
11. Perwujudan kawasan strategis provinsi yang terpadu dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi, perlindungan terhadap kepentingan sosial budaya, serta perlindungan terhadap kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan.
12. Harmonisasi dan penyelarasan pengembangan wilayah perbatasan Jawa Timur dengan Jawa Tengah dan Bali melalui kerja sama antardaerah utamanya untuk pengembangan di bidang ekonomi, sosial, budaya dan penyediaan sarana prasarana.
13. Pengintegrasian antara koridor pertumbuhan wilayah daratan dengan sentra pertumbuhan kelautan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (WP3K) bagi terselenggaranya nilai tambah sinergi antar wilayah dan mengurangi disparitas wilayah melalui integrasi konektivitas pada tujuh koridor pengembangan wilayah yang meliputi:
    a. Koridor Metropolitan Surabaya – Malang Raya;
    b. Koridor kota besar, menengah dan kecil di wilayah tengah/antar pegunungan (*Smart Village Valley*);
    c. Koridor industri maritim di Pantura sampai dengan Madura;
    d. Koridor/klaster migas dan kondensat di pantai utara pulau jawa (Tuban – Gresik);
    e. Koridor industri agro di wilayah perbatasan/utara;
    f. Koridor wisata pesisir/pantai (*coastal torism*) di Wilayah Pansela (Pacitan – Banyuwangi);
    g. Koridor penghubung antar kawasan dan kepulauan yang meliputi Kawasan Gerbangkertasusila (GKS), Kawasan Bromo Tengger Semeru (BTS), Kawasan Selingkar Wilis, Kawasan Ijen dan Kepulauan Madura.

Gambar 2. 20 Koridor Pengembangan Wilayah Provinsi Jawa Timur



2.7.1 Pusat Pertumbuhan Wilayah (PKN & PKW)

Secara geografis pusat pertumbuhan dapat diartikan sebagai suatu lokasi yang memiliki berbagai macam fasilitas dan kemudahan sehingga menjadi pusat daya tarik (*pole of attraction*). Selain itu pusat pertumbuhan wilayah dapat juga diartikan sebagai sebuah kawasan perkotaan yang dijadikan sebagai pusat pertumbuhan sehingga merangsang pertumbuhan kegiatan ekonomi di seluruh kawasan sekitarnya (*hinterland*).

Kebijakan pusat pertumbuhan wilayah Jawa Timur disusun mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 – 2043. Dalam RTRW Provinsi Jawa Timur, tujuan penataan ruang telah diintegrasikan dengan dokumen materi teknis perairan pesisir sehingga berdasarkan prinsip tersebut, maka tujuan penataan ruang wilayah Provinsi Jawa Timur adalah untuk:

"Mewujudkan ruang wilayah Provinsi yang berdaya saing tinggi, terintegrasi, aman, dan berkelanjutan melalui pengembangan sistem agrominapolitan, sistem metropolitan serta pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil."

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 terdapat kawasan perkotaan yang berfungsi menjadi Pusat Kegiatan. Adapun pusat kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

Gambar 2. 21 peta Persebaran Pusat kegiatan Provinsi Jawa Timur



1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN)

PKN merupakan kawasan permukiman yang diklasifikasikan sebagai pusat kegiatan dengan fungsi melayani kegiatan skala internasional, lingkup nasional, atau melayani beberapa provinsi. PKN berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, lingkup nasional atau melayani beberapa provinsi. PKN di Provinsi Jawa Timur berada di:

a. Kawasan Perkotaan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan (Gerbangkertosusila). Potensi pengembangan pusat kegiatan nasional (PKN) Gerbangkertosusila dapat dilihat melalui nilai strategis dari Kawasan tersebut. Potensi nilai strategis PKN Gerbangkertosusila dijabarkan sebagai berikut:
   1) Prioritas pembangunan ekonomi Jawa Timur dalam pengembangan kawasan industri strategis berada pada utara Koridor Jawa Timur.
   2) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik dan KEK lainnya, industri halal, industri modern dan berorientasi ekspor, integrasi infrastruktur akses hub, pelabuhan lengkap dan akses tol logistik pasar domestik dan internasional.
   3) Pengembangan Pasar Puspa Agro menjadi *Jatim Food Hub* dengan fungsi stabilisasi stok dan harga komoditas strategis.
   4) Industri strategis dan berkelas dunia (industri migas, industri kimia, industri smelter logam, industri perikanan, industri maritim, industri komponen elektrik modern) Pesisir Benowo – Krembangan (Kota Surabaya), Pesisir Gresik – Manyar (Kab. Gresik), Pesisir Lamongan (Brondong – Paciran) dan Pesisir Tuban (Palang, Tuban, Jenu, Bancar).
   5) Integrasi kawasan perikanan, agropolitan dan wisata pantai di Gresik Utara (Ujungpangkah – Panceng) dengan Wilayah Paciran – Brondong (Perikanan Tangkap dan Pelabuhan).
   6) Industri di Wilayah Gempol pada lintasan koridor strategis ke arah Malang dan Pasuruan.
   7) Pengembangan industri bukan padat karya untuk meningkatkan efisiensi produksi pada kawasan industri di Mojokerto.
   8) Pengembangan industri hijau ramah lingkungan seperti pengembangan industri kimia hijau (*green chemistry*), dan teknologi nano hijau (*green nanotechnology*), didukung dengan pengembangan energi terbarukan (*renewable energy*).
   9) Pengembangan kawasan strategis pariwisata berbasis atraksi budaya lokal yang unik, didukung amenitas, aksesibilitas, dan *ancillary* yang memadai, serta kawasan strategis perkotaan yang memiliki potensi *heritage*, *urban* dan *health/ medical*.
   10) Pengembangan keanekaragaman geologi *(geodiversity),* hayati *(biodiversity)* dan budaya (*culturediversity)* melalui pilar konservasi, edukasi, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat
   11) Pengembangan transportasi aglomerasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal perkotaan (berbasis rel dan jalan) di Wilayah Metropolitan Surabaya.
   12) Pengembangan prasarana pendukung kegiatan industri (transportasi dan jaringan energi meliputi gas, air, serta telekomunikasi).

13) Hub pendidikan tinggi global (*Global Higher Education Hub*) peningkatan partisipasi pendidikan tinggi, serta pengadaan prodi Perguruan Tinggi *Science, Technology, Engineering, Art, and Math* (*STEAM*) yang sesuai dengan kebutuhan wilayah, serta penguatan kualitas pusat-pusat pendidikan tinggi, riset, dan inovasi berkelas dunia.
14) Pengembangan sentra industri maritim dan pelabuhan perikanan sebagai pusat perikanan tangkap serta dukungan pengembangan Ekonomi Biru.
15) Pengembangan wisata pada Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP) Surabaya – Ziarah Waliullah – Trowulan dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) antara lain Trowulan – Jombang dan sekitarnya, dan lain-lain.
16) Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Kawasan Industri (KI) dan Sentra Industri Kecil Menengah (IKM).
17) Pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan pengembangan pendidikan vokasi bidang maritim dan migas.
18) Pengembangan dan pemanfaatan jaringan puskesmas guna memperluas jangkauan dan mutu pelayanan bagi masyarakat di wilayah kerja puskesmas yang belum terjangkau.
19) Pemerataan pembangunan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) berdasarkan kebutuhan, pemerataan distribusi rumah sakit, distribusi dokter spesialis dasar sesuai dengan program pengampuan layanan prioritas.

b. Kawasan Perkotaan Malang

Potensi pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kawasan Perkotaan Malang dapat dilihat melalui nilai strategis dari kawasan tersebut. Potensi nilai strategis PKN Perkotaan Malang dijabarkan sebagai berikut:

1) Pengembangan kawasan yang memiliki potensi ekonomi kreatif yang didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi berbasis produk unggulan;
2) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari untuk pengembangan pendidikan, ekonomi kreatif dan lain-lain;
3) Hub pendidikan tinggi global (*Global Higher Education Hub*) peningkatan partisipasi pendidikan tinggi, serta pengadaan prodi Perguruan Tinggi *Science, Technology, Engineering, Art, and Math* (*STEAM*) yang sesuai dengan kebutuhan wilayah, serta penguatan kualitas pusat-pusat pendidikan tinggi, riset, dan inovasi berkelas dunia;
4) Pengembangan kawasan strategis pariwisata yang mengedepankan budaya lokal, amenitas, aksesibilitas, dan *ancillary* yang memadai;
5) Pengembangan transportasi aglomerasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan raya dan rel di Wilayah Metropolitan Malang;
6) Pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
7) Pengembangan wisata pada Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP) Malang Raya - Bromo dan Sekitarnya serta Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) Pantai Malang Selatan dan sekitarnya serta Singosari dan sekitarnya;

8) Pengembangan Kawasan Industri (KI) dan Sentra Industri Kecil Menengah (IKM);
9) Pelaksanaan Integrasi Layanan Primer (ILP) di puskesmas berkolaborasi dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);
10) Optimalisasi pengelolaan layanan kesehatan yang bermutu, efektif, dan efisien melalui pedoman praktik klinis rumah sakit yang standar serta pelaksanaan sistem rujukan berbasis kompetensi;

2. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

PKW merupakan kawasan permukiman yang berfungsi untuk melayani lingkup kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota disekitarnya. PKW di Provinsi Jawa Timur berada di:

a. Kabupaten Banyuwangi di Perkotaan Banyuwangi;
b. Kabupaten Bojonegoro di Perkotaan Bojonegoro;
c. Kabupaten Jember di Perkotaan Jember;
d. Kabupaten Pacitan di Perkotaan Pacitan;
e. Kabupaten Pamekasan di Perkotaan Pamekasan;
f. Kabupaten Sumenep di Perkotaan Sumenep;
g. Kabupaten Trenggalek di Perkotaan Trenggalek;
h. Kabupaten Tuban di Perkotaan Tuban;
i. Kabupaten Tulungagung di Perkotaan Tulungagung;
j. Kota Blitar;
k. Kota Kediri;
l. Kota Madiun;
m. Kota Pasuruan; dan
n. Kota Probolinggo.

Pengembangan pusat kegiatan Wilayah (PKW) di Provinsi Jawa Timur dapat dilihat melalui nilai strategis dari Kawasan tersebut. Potensi strategis pusat kegiatan Wilayah (PKW) Jawa Timur dijabarkan sebagai berikut:

1) Pengembangan komoditas unggulan berbasis pertanian, perhutanan, dan perikanan yang menjadi hulu Agropolitan dan Minapolitan antara lain pada Selingkar Bromo - Tengger - Semeru (BTS), Selingkar Wilis (termasuk Kelud dan Lawu), Selingkar Ijen, wilayah Tuban-Bojonegoro dan Pulau Madura.
2) Pengembangan sentra produksi dengan outlet pengumpul dan distribusi komoditas unggulan berupa pasar agribisnis yang menjadi input industri Agro.
3) Pengembangan daya Tarik wisata di Kawasan Bromo – Tengger – Semeru dan Kawasan Selingkar Ijen dan Kawasan Selingkar Wilis dengan konsep ekowisata. Selanjutnya di wilayah-wilayah perkotaan perlu mengadopsi pengembangan pariwisata antara lain melalui penyelenggaraan *Meeting, Incentives, Conférences, and Exhibitions* (MICE).
4) Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif dan global pada pusat aglomerasi Madiun, Kediri, dan Jember.
5) Pengembangan sentra industri maritim dan pelabuhan perikanan sebagai pusat perikanan tangkap serta dukungan pengembangan ekonomi biru.

6) Pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan pengembangan pendidikan vokasi bidang maritim dan migas.
7) Pengembangan wisata pada Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP) dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP).
8) Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Kawasan Industri (KI) dan Sentra Industri Kecil Menengah (IKM).
9) Pengembangan Kawasan Geopark (Taman Bumi) guna mendukung pengembangan kawasan strategis Provinsi serta memperkuat pencapaian pembangunan berkelanjutan melalui pilar konservasi, edukasi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
10) Optimalisasi pengelolaan layanan kesehatan yang bermutu, efektif, dan efisien melalui pedoman praktik klinis rumah sakit yang standar serta pelaksanaan sistem rujukan berbasis kompetensi.

2.7.2 Indikasi program/proyek strategis

A. Indikasi Program/Proyek Strategis Infrastruktur

Penyusunan Indikasi program/proyek strategis di Provinsi Jawa Timur mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 dan kebijakan strategis sektoral lainnya. Hal ini dilakukan guna mewujudkan adanya keselarasan pembangunan serta harmonisasi pemanfaatan ruang di Provinsi Jawa Timur.

Dalam sistem jaringan transportasi darat terdiri dari jaringan jalan dan rel kereta api serta moda transportasi berbasis jalan dan rel. Dalam pengembangan jaringan jalan terdapat program pemantapan dan pengembangan jalan umum (untuk meningkatkan konektivitas dari dan ke pusat kegiatan), jalan khusus (untuk meningkatkan akses menuju kawasan strategis) dan jembatan (pemantapan jalur/jembatan/*flyover/underpass* pada jalan perpotongan). Kemudian didukung dengan pemantapan dan pengembangan jalan tol serta infrastruktur pendukungnya. Untuk mendukung moda transportasi darat berbasis jalan maka perlu pengembangan sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas angkutan jalan serta pengembangan dan pemantapan prasarana terminal penumpang tipe A dan tipe B. Dalam mendukung moda transportasi berbasis rel kereta api, terdapat pengembangan sistem jaringan kereta api melalui pembangunan dan pengembangan jaringan jalur kereta api (reaktivasi dan *doubletrack*), pengembangan jaringan jalur kereta api menuju kawasan strategis, pembangunan sarana prasarana pendukung operasi dan keselamatan perkeretaapian, pengembangan jaringan dan layanan kereta api cepat, serta pengembangan transportasi massal perkotaan berbasis kereta.

Sebagai upaya mendukung integrasi pergerakan orang dan barang antar sistem jaringan transportasi baik darat, laut, maupun udara, maka perlu dikembangkan terminal barang berdasar pada kajian kebutuhannya. Selain itu perlu mendorong pemanfaatan dan pengembangan jembatan timbang sebagai upaya untuk menekan muatan truk yang melebihi ketentuan. Selanjutnya juga perlu dilakukan pemantapan dan peningkatan peran Unit Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor.

Selanjutnya, sistem transportasi yang berbasis perairan terdiri dari sistem jaringan transportasi angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP) serta sistem jaringan transportasi laut. Dalam sistem jaringan transportasi angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP) perlu dilakukan perencanaan sebagai upaya untuk pemantapan dan pengembangan pelabuhan pelayanan penyeberangan Kelas I, Kelas II dan Kelas III, pembangunan dan pengembangan pelabuhan sungai dan danau, serta pengembangan industri pelabuhan. Untuk sistem jaringan transportasi laut juga perlu dilakukan perencanaan sebagai upaya untuk pemantapan dan pengembangan pelabuhan utama, pengumpul, pengumpan, terminal-terminal umum dan khusus, pemantapan dan pengembangan alur pelayaran laut nasional dan/atau internasional dari dan/atau ke Provinsi Jawa Timur, serta melakukan monitoring dan pemeliharaan alur-pelayaran masuk pelabuhan dalam rangka mendukung transportasi laut dan penyeberangan.

Dalam melengkapi sistem jaringan transportasi yang ada, terdapat pengembangan sistem jaringan transportasi udara berupa pengembangan bandar udara umum dan khusus melalui pengembangan bandar udara pengumpul, pengumpan dan khusus, pembangunan bandar udara perairan untuk mendukung akses ke kepulauan. Selain itu terdapat identifikasi kebutuhan pengembangan potensi bandar udara baru dalam mendukung pengembangan wilayah.

Pada aspek infrastruktur sumber daya air, dalam upaya mendukung pengelolaan sumber daya air di Provinsi Jawa Timur terdapat program pengelolaan sumber daya air berupa pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi kewenangan provinsi. Di samping itu, upaya mendukung pengelolaan sumber daya air juga dilakukan melalui pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.

Pada aspek infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang mendukung kebutuhan penyediaan air minum domestik di Provinsi Jawa Timur, terdapat program pengembangan jaringan SPAM berupa SPAM Regional Kabupaten/kota dan pemantapan pipa air bersih bawah laut. Dalam pengembangan SPAM regional dilakukan Identifikasi kebutuhan dan pengembangan SPAM Regional didukung kajian teknis dan lingkungan. Selain penyediaan air minum untuk kebutuhan domestik, terdapat rencana pengembangan jaringan air baku untuk industri.

Pada aspek pengelolaan limbah, terdapat rencana Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3). Pada Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) terdapat program penyusunan kajian kelayakan potensi Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Skala Provinsi, Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Regional Kewenangan Provinsi, dan Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) industri dan rumah tangga sesuai kebutuhan. Selanjutnya pada Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) terdapat program pengembangan, pemantapan, serta percepatan dan operasionalisasi sistem pengelolaan limbah B3.

Selanjutnya pada aspek jaringan persampahan terdapat program pengembangan sistem jaringan persampahan berupa TPA regional dan penggunaan teknologi tepat guna pada pengelolaan sistem jaringan persampahan pada TPA regional.

Untuk mendukung pelaksanaan pengembangan TPA regional dilakukan peningkatan kualitas kesehatan, lingkungan fisik dan sosial di sekitar sistem jaringan persampahan TPA regional serta monitoring dan evaluasi pada kualitas lingkungan dan kualitas kesehatan masyarakat di sekitar sistem jaringan persampahan TPA Regional.

Pada aspek infrastruktur jaringan energi di Provinsi Jawa Timur, perwujudan pengembangan infrastruktur jaringan energi dijabarkan dalam berbagai program. Adapun program-program yang mendukung perwujudan infrastruktur jaringan energi dilakukan melalui program pengembangan dan pemantapan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung berupa Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU), dan Pembangkit Listrik Lainnya. Selain itu, penyediaan energi juga didukung melalui program pengembangan dan pembangunan pembangkit listrik menggunakan sumber energi baru dan terbarukan, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH), dan pembangkit listrik lainnya.

Selain itu, untuk mewujudkan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung, terdapat program berupa pengembangan dan pemantapan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem, pembangunan jaringan baru transmisi tenaga listrik antarsistem, pengembangan dan pemantapan jaringan distribusi tenaga listrik antarsistem, pemeliharaan dan pemantapan gardu listrik eksisting serta pembangunan gardu listrik baru sesuai kebutuhan yang sesuai kajian teknis dan lingkungan. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan listrik antar pulau terdapat program pembangunan jaringan energi berupa pipa/kabel bawah laut sebagai media penyaluran tenaga listrik ke Pulau Madura, Pulau Bali, maupun pulau lain dalam wilayah Provinsi Jawa Timur.

Pada sisi infrastruktur jaringan pipa minyak dan gas bumi di provinsi Jawa Timur diwujudkan melalui program Pengembangan dan pemantapan jaringan pipa minyak dan gas bumi. Selain itu, infrastruktur jaringan pipa minyak dan gas bumi juga didukung melalui pengembangan dan pemantapan sumber dan prasarana minyak dan gas bumi serta pengembangan biofuel dari metanol dan etanol.

Pada aspek infrastruktur sistem jaringan telekomunikasi, guna meningkatkan kemudahan arus telekomunikasi di Provinsi Jawa Timur maka diwujudkan ke beberapa program. Adapun program yang mendukung perwujudan infrastruktur jaringan telekomunikasi dilakukan melalui pengembangan dan pemantapan jaringan serat optik, pengembangan jaringan kabel telekomunikasi bawah laut yang memperhatikan aktivitas perhubungan laut dan kegiatan hankam, pengembangan jaringan terestrial melalui sistem kabel, pengembangan jaringan sistem nirkabel atau BTS (*Base Transceiver Station*) terpadu, pengembangan jaringan satelit menggunakan tower dan non tower, serta pemeliharaan jaringan telekomunikasi *eksisting*.

Dalam kawasan permukiman, terdapat program yang dikembangkan guna mendukung perwujudan kawasan tersebut. Beberapa program yang mendukung perwujudan kawasan permukiman dilakukan melalui pengembangan kawasan permukiman perkotaan dengan memperhitungkan daya tampung perkembangan

penduduk, sarana, dan prasarana yang dibutuhkan, pengembangan dan pengelolaan rumah susun yang dikelola pemerintah provinsi, penanganan kawasan permukiman kumuh, percepatan penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (RP3KP), penyediaan dan peningkatan kualitas rumah swadaya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), penanganan mitigasi bencana serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di kawasan perumahan dan permukiman serta pengembangan dan optimalisasi implementasi desa tangguh bencana terutama pada desa rawan bencana di kawasan rawan bencana Jawa Timur.

B. Indikasi program/proyek strategis sektor prioritas

Pembangunan wilayah tidak terlepas dari peran berbagai sektor secara terintegrasi. Untuk mendukung terselenggaranya tujuan pembangunan wilayah di Jawa Timur perlu adanya indikasi program/proyek sektor prioritas yang menjadi fokus pembangunan di Jawa Timur dalam 20 tahun mendatang.

Pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan sentra hulu produksi agro meliputi berbagai sektor seperti pertanian pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Program ini didukung dengan pengembangan linkage sentra melalui hub logistik serta pengembangan hilir industri agro dan pasar (mengingat peran perkotaan sebagai pasar konsumen komoditas agro). Selain itu, terdapat program konservasi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) yang menjadi fokus untuk menjaga keberlanjutan produksi. Di samping itu, upaya untuk meningkatkan pasar agribisnis juga tercermin melalui pengembangan Pasar Induk Agribisnis Puspa Agro menjadi *Jatim Food Hub*. Program ini juga dilengkapi dengan peningkatan infrastruktur pendukung produksi agro, seperti jalan produksi/usaha tani, embung tani, dan daerah serta saluran irigasi. Lokasi indikasi program terfokus pada wilayah selingkar Bromo - Tengger - Semeru (BTS), Selingkar Wilis (termasuk Kelud dan Lawu), Selingkar Ijen, wilayah Gresik-Lamongan-Tuban-Bojonegoro, dan Pulau Madura.

Untuk mendukung kegiatan industri di Jawa Timur dilakukan pengembangan Kawasan Industri (KI), Kawasan Peruntukan Industri (KPI), dan sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) pada Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) dan wilayah potensial lainnya serta pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pengembangan ini juga mencakup program pelengkapan infrastruktur untuk melayani kebutuhan wilayah industri, termasuk akses jalan, jembatan, air baku, energi, pengolahan limbah, Ruang Terbuka Hijau (RTH), pelayanan kesehatan, dan seterusnya.

Pada aspek energi sumber daya mineral terdapat pengembangan energi dan sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Perwujudan kawasan pertambangan dan energi didukung dengan identifikasi lokasi potensial kawasan pertambangan dan energi serta pengembangan kawasan pertambangan dan energi yang memperhatikan kelestarian lingkungan.

Dalam upaya mengembangkan potensi pariwisata Jawa Timur, fokus utama terletak pada pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) dengan mengoptimalkan daya tarik wisata yang dimiliki oleh Jawa Timur, seperti keindahan alam, budaya, maupun hasil buatan manusia.

Selain itu, pengembangan infrastruktur pendukung pariwisata juga menjadi kunci dalam memfasilitasi pertumbuhan sektor pariwisata. Infrastruktur tersebut mencakup peningkatan aksesibilitas, (jalan dan jembatan pendukung daya tarik wisata), pengembangan fasilitas akomodasi yang berkualitas, (hotel, homestay, dan lain-lain) untuk menampung jumlah wisatawan yang meningkat. Selain itu untuk memudahkan perjalanan wisatawan di seluruh Wilayah Jawa Timur, maka diperlukan pengembangan terminal tipe A dan tipe B, jaringan kereta api, penyediaan *feeder* menuju kawasan pariwisata.

Selain itu, terdapat rencana pengembangan kawasan *geopark* yang merupakan wilayah geografis dengan warisan geologi bernilai tinggi termasuk di dalamnya keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya. Kawasan Geopark merupakan bagian dari Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dikembangkan melalui pelestarian potensi warisan geologi, hayati dan budaya baik yang bernilai lokal, nasional maupun global.

Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur dan mendukung capaian kemiskinan pada Indonesia Emas sebesar 0,21% - 0,46% (Tahun 2045) maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan 15 wilayah kantong kemiskinan Jawa Timur (Kabupaten Sampang, Sumenep, Bangkalan, Probolinggo, Tuban, Ngawi, Bojonegoro, Lamongan, Pamekasan, Malang, Jember, Kediri, Gresik, Bondowoso, Pasuruan). Penetapan tersebut berdasarkan pada persentase dan jumlah penduduk miskin Tahun 2023. Upaya penanggulangan kemiskinan diberikan dalam bentuk pemberian bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat dan UKM serta program lainnya dalam upaya mengurangi wilayah-wilayah kantong kemiskinan. Selanjutnya, kemiskinan sebagai permasalahan yang multidimensi diselesaikan secara lebih komprehensif dari berbagai aspek di antaranya peningkatan kualitas SDM melalui pemenuhan pelayanan dasar (kesehatan dan pendidikan), peningkatan kompetensi tenaga kerja dan kesempatan kerja, peningkatan akses terhadap infrastruktur dasar (sanitasi layak dan elektrifikasi), serta peningkatan ketahanan pangan dan ketersediaan bahan pangan yang terjangkau dan stabil.

Berdasarkan data P3KE 2024 (Kemenko PMK) bahwa jumlah penduduk Jawa Timur dengan status kesejahteraan 40% terbawah sebanyak 18.466.847 jiwa. Wilayah kabupaten dengan penduduk status kesejahteraan 40% terbanyak adalah Kabupaten Jember yaitu sebanyak 1.265.178 jiwa dan Kabupaten Malang dengan jumlah terbanyak kedua yaitu sebanyak 1.236.863 jiwa.

Berdasarkan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Tahun 2022, bahwa jumlah penduduk Jawa Timur dengan status kesejahteraan 10% terbawah sebanyak 3.072.366 jiwa, dengan rincian laki-laki sebanyak 1.426.981 jiwa dan perempuan sebanyak 1.645.164 jiwa. Wilayah kabupaten dengan penduduk status kesejahteraan 10% terbanyak adalah Kabupaten Malang yaitu sebanyak 219.702 jiwa dan Kota Surabaya dengan jumlah terbanyak kedua yaitu sebanyak 197.563 jiwa. Sedangkan kabupaten/kota dengan penduduk status kesejahteraan 10 persen terbawah sebanyak adalah Kota Mojokerto dengan jumlah penduduk sebanyak 8.773 jiwa.

Dalam rangka Upaya peningkatan pendidikan yang berkualitas untuk mendukung keberhasilan generasi muda agar lebih produktif, unggul, dan berkualitas sehingga dapat menyambut Indonesia emas serta mencapai target Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun) sebesar 11,2 - 11,23 dan Harapan Lama Sekolah sebesar 15,09 - 15,11 pada Tahun 2045 pada Indonesia emas, maka pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan upaya melalui :

1. Peningkatan Tata Kelola Pendidikan dengan penguatan pemenuhan SPM pendidikan,
2. Peningkatan Kualitas dan Pembelajaran melalui kurikulum berbasis kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, pengintegrasian softskill dalam pembelajaran,
3. Penjaminan Mutu Pendidikan melalui penguatan kapasitas akselerasi akreditasi dan perluasan budaya mutu pendidikan,
4. farmasi Akses (Berbagai Jenjang) dan Percepatan wajib belajar Pendidikan 13 tahun melalui penanganan anak tidak sekolah, peningkatan ketrampilan bagi peserta kejar paket dengan menambahkan muatan vokasional sehingga siap secara skill untuk bekerja dan peningkatan sarana prasarana pendidikan,
5. Peningkatan Pengelolaan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui Pendidikan profesi guru dan peningkatan kualitas pendidik serta peningkatan kesejahteraan pendidik berbasis kinerja

Sedangkan peningkatan kualitas SDM melalui penguatan aspek kesehatan, masih dibutuhkan peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat melalui peningkatan kompetensi dan pemerataan distribusi tenaga kesehatan. Pada sektor kesehatan dimulai dengan pengembangan dan pemanfaatan jaringan puskesmas guna memperluas jangkauan dan mutu pelayanan bagi masyarakat serta diimbangi dengan penguatan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) berdasarkan kebutuhan menuju optimalisasi pengelolaan layanan kesehatan yang bermutu, efektif, dan efisien. Selain itu terdapat penguatan transformasi kesehatan melalui transformasi layanan primer dalam promotif preventif, transformasi layanan rujukan rumah sakit, transformasi sistem ketahanan kesehatan melalui obat-obatan, alat-alat kesehatan, tenaga kesehatan surveilan terhadap penyakit menular, transformasi sistem Pembiayaan Kesehatan, Transformasi SDM Kesehatan dan Transformasi Teknologi Kesehatan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Permasalahan

Penyelenggaraan pembangunan Provinsi Jawa Timur telah membuahkan hasil sesuai dengan yang diharapkan, tetapi masih terdapat permasalahan dan tantangan yang perlu diantisipasi dari berbagai dimensi pembangunan. Permasalahan yang dihadapi Provinsi Jawa Timur dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal yang terjadi sebagai dampak interaksi dan dinamika perkembangan berbagai sektor baik pada skala lokal kabupaten/kota, provinsi maupun nasional. Permasalahan–permasalahan tersebut timbul karena kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, adanya kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Berdasarkan hasil evaluasi gambaran umum kondisi di Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah disajikan pada bab 2 (dua), terdapat berbagai bidang pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi melalui serangkaian kebijakan secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Permasalahan pembangunan daerah yang ada di Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sumber Daya Lokal Dalam Pengembangan Perekonomian Daerah.

   Tidak meratanya distribusi ekonomi di wilayah Jawa Timur, dimana ekonomi Jawa Timur masih didominasi oleh wilayah Gerbangkertosusila Plus dengan kontribusi di atas 50% yaitu Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan serta Bojonegoro, Tuban dan Jombang. Sedangkan wilayah Madura Kepulauan berkontribusi kurang dari 5 persen, Kawasan Selingkar Ijen berkontribusi kurang dari 10% serta Kawasan Bromo Tengger Semeru (BTS) dan Kawasan Selingkar Wilis kontribusinya kurang dari 20%. Kawasan yang memiliki potensi agro masih terbatas produktivitas serta nilai tambahnya dalam pengembangan ekonomi wilayahnya.
2. Belum Meratanya Kemandirian Pangan dan Pemanfaatan Potensi Energi Baru Terbarukan

   Di berbagai belahan dunia, terutama di beberapa negara berkembang, terdapat tantangan serius terkait belum meratanya kemandirian pangan dan pemanfaatan potensi energi. Permasalahan ini menciptakan dampak yang signifikan pada ketahanan pangan dan ketahanan energi, mengakibatkan kerentanan masyarakat terhadap fluktuasi harga pangan global dan ketergantungan pada sumber energi yang tidak berkelanjutan.

   Beberapa permasalahan yang muncul diantaranya ketergantungan pada impor pangan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Ketergantungan ini membuat negara tersebut rentan terhadap fluktuasi harga global dan perubahan kebijakan perdagangan internasional, praktek-praktek pertanian yang tidak berkelanjutan, seperti penggunaan lahan pertanian untuk perumahan sehingga mempengaruhi penurunan produktivitas pertanian sehingga hal ini mengancam ketersediaan pangan dalam jangka panjang.

Dan salah satu upaya yang harus dilakukan adalah pemanfaatan potensi energi baru terbarukan (EBT) yang di Jawa Timur belum termanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

3. Belum Meratanya Sarana Prasarana Pelayanan Dasar Publik Serta Konektivitas Terhadap Pusat-Pusat Pertumbuhan Wilayah.
   Belum meratanya sarana prasarana pelayanan dasar publik berdampak terhadap perkembangan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan distribusi manfaat pembangunan secara keseluruhan. Selain itu masih belum seimbangnya perkembangan dan pertumbuhan ekonomi antara wilayah bagian utara dan wilayah bagian selatan Provinsi Jawa Timur disebabkan oleh ketersediaan infrastruktur yang belum merata baik infrastruktur pelayanan dasar, sumber daya air, maupun transportasi.
4. Terdapatnya Potensi Konflik Sosial dan Relatif Tingginya Angka Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Perkawinan Anak
   Diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang pekerjaan, pendidikan, dan akses terhadap sumber daya dapat menciptakan ketimpangan gender yang dapat menjadi pemicu konflik sosial. Kurangnya program pemberdayaan ekonomi untuk perempuan dan pemuda guna mengurangi ketergantungan ekonomi yang menjadi faktor penyebab perkawinan anak, kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan dan anak serta rendahnya tingkat pendidikan dapat menciptakan lingkungan di mana kekerasan dapat dianggap wajar.
5. Masih Rendahnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat
   Salah satu permasalahan mendasar adalah tingginya tingkat kemiskinan. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, kesehatan, pendidikan dan tempat tinggal dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini harus menjadi salah satu perhatian utama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, meskipun secara prosentase kemiskinan di Jawa Timur masuk dalam kategori menengah tetapi secara jumlah absolut Provinsi jawa Timur termasuk salah satu yang tertinggi di Indonesia.
6. Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia
   Rendahnya kualitas sumber daya manusia sangat erat dengan kualitas dan fasilitas pendidikan disebabkan kurangnya akses dan kualitas pendidikan, tingginya angka putus sekolah, terutama di tingkat pendidikan dasar dan menengah.
7. Rendahnya Kesadaran Masyarakat untuk Melestarikan Nilai-Nilai Budaya Lokal.
   Beberapa kompleksitas tantangan dan permasalahan dalam upaya pelestarian warisan budaya antara lain:
   a. Ancaman globalisasi dan digitalisasi yang berpotensi menyebabkan hilangnya warisan budaya;
   b. Lemahnya pendidikan formal dan informal tentang warisan budaya;
   c. Rendahnya kesadaran, partisipasi serta minat masyarakat terhadap pelestarian nilai-nilai budaya lokal; dan
   d. Terbatasnya pelaku budaya.

Kondisi diatas banyak dipengaruhi atas kondisi kurangnya pendidikan formal dan informal tentang nilai-nilai budaya lokal, sehingga dapat mengakibatkan minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya melestarikan warisan budaya. Kondisi tersebut dapat juga dipengaruhi kondisi teknologi global dan media sosial yang dapat menciptakan tren dan norma global yang merata, mengaburkan perbedaan budaya lokal, dan mengurangi keinginan untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional.

8. Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup dan Keterbatasan Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana

   Tekanan terhadap lingkungan hidup semakin meningkat seiring dengan terjadinya peningkatan pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, perubahan pola hidup masyarakat, serta perubahan iklim. Kondisi kualitas lingkungan hidup yang menurun sangat erat kaitannya dengan peningkatan kejadian bencana terutama bencana hidrometeorologi yang meningkat seiring dengan adanya perubahan iklim. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas masyarakat terhadap risiko bencana merupakan aspek penting dalam meminimalisir dampak kejadian bencana.

9. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Adaptif Serta Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.

   Seiring dengan kompleksitas tuntutan masyarakat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih memiliki beberapa proses bisnis dalam pelayanan yang birokrasinya begitu panjang. Selain itu masih banyak terdapat duplikasi tugas dan fungsi pada Organisasi Perangkat Daerah dan kurang efisiennya Unit Organisasi. Perlunya menciptakan aparatur pemerintah yang memiliki kapasitas, integritas dan profesionalitas sehingga dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dan meminimalisir resiko pemberian gratifikasi/suap/pemerasan di lingkup pemerintahan. Seiring berkembangnya waktu, pemerintahan juga memerlukan sistem kerja yang dinamis dan adaptif, sehingga dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu memfokuskan untuk peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan serta menyederhanakan prosedur administratif dan regulasi yang berlebih serta meningkatkan pengendalian internal Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

   Penguatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik tentunya beriringan dengan kondisi Trantibumlinmas, dimana tata kelola pemerintahan dan pelayanan Publik yang bersih dan adaptif menciptakan lingkungan pada masyarakat yang aman dan reponsif pada kebutuhan masyarakat. Pelayanan terkait penanganan gangguan trantibum masih belum optimal. Kondisi ini dipicu karena belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaporan, dan pengolahan data terkait penanganan gangguan Trantibumlinmas. Diharapkan dengan stabilnya kondisi Trantibumlinmas dapat menurunkan resiko konflik antar masyarakat dalam segala aspek, terutama pada saat momentum demokrasi. Hal ini dipicu kurangnya pemahaman masyarakat akan fungsi dari demokrasi.

3.2. Isu Strategis Daerah

Isu strategis daerah dirumuskan dengan berdasarkan pada permasalahan pembangunan daerah yang telah teridentifikasi serta dengan memperhatikan isu strategis yang berkembang di tataran global, nasional, maupun regional. Isu strategis daerah ini menjadi rujukan dalam merumuskan Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Jawa Timur selama 20 (dua puluh) tahun kedepan.

3.2.1. Isu Strategis Global

Isu strategis global didasarkan pada megatren global yang tertuang dalam Rancangan Akhir RPJPN Tahun 2025-2045 dan isu yang berkembang pada KTT G-20 di Bali.

1. Isu Strategis dan Tantangan Megatren Global penting dalam 20 (dua puluh) tahun kedepan yang akan merubah paradigma pembangunan global, meliputi:
   a. Perkembangan Demografi Global
      Populasi dunia diperkirakan akan tumbuh dari 7,6 miliar saat ini menjadi 9,8 miliar pada Tahun 2050 (PBB, 2017). Pertumbuhan ini akan didistribusikan secara tidak merata antarwilayah dan masing-masing negara. Jumlah penduduk berusia 60 tahun ke atas diperkirakan akan meningkat di seluruh dunia karena menurunnya tingkat kematian dan meningkatnya angka harapan hidup saat lahir.
   b. Geopolitik dan Geoekonomi
      Adanya dinamika geopolitik global kedepan akan menjadi tantangan bagi setiap negara tak terkecuali Indonesia. Perang antara Rusia dan Ukraian meningkatkan kewaspadaan global terhadap potensi konflik geopolitik kedepan dikawasan lainnya. Persaingan geopolitik terutama di kawasan Indo-Pasifik yang dekat dengan Indonesia semakin meningkat dan meluas.
      Pada Tahun 2050, kontribusi ekonomi negara-negara berkembang diperkirakan meningkat mencapai 71%. Sektor komoditas tidak lagi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Dengan kebijakan yang tepat, negara berkembang mempunyai peluang mengejar ketertinggalan teknologi dan ekonomi dari negara maju.
   c. Perkembangan Teknologi
      Pandemi Covid-19 telah mendorong akselerasi disrupsi teknologi di berbagai sektor. Perkembangan teknologi menyebabkan jenis pekerjaan tergantikan oleh teknologi dan berdampak pada sektor yang tidak mampu beradaptasi sehingga perkembangan teknologi memerlukan kesiapan yang adaptif dari masyarakat.
   d. Peningkatan Urbanisasi Dunia
      Menurut *United Nations Department of Economic and Social Affairs* (UN-DESA), dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di kawasan perkotaan pada Tahun 2050. Urbanisasi berdampak pada peningkatan jumlah penduduk perkotaan dan ukuran kota. Tekanan penduduk dan pembangunan perkotaan yang tidak memadai dan kurang terencana dengan baik dapat memperburuk pelayanan masyarakat dan kegiatan ekonomi secara menyeluruh sehingga perlu dibarengi dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang

cepat untuk memacu inovasi di kawasan perkotaan, khususnya dalam mengatasi masalah yang timbul sehari-hari.

e. Konstelasi Perdagangan Global
Pertumbuhan perdagangan negara berkembang akan didorong oleh perdagangan Intra-Asia yang menunjukkan tren yang berlanjut terutama dari Tiongkok, India, dan negara-negara ASEAN. Selain itu, peningkatan pendapatan serta proyeksi peningkatan demografi penduduk di Kawasan Afrika, Nigeria, dan beberapa negara di Afrika Selatan, mendorong perdagangan internasional bergerak ke kawasan tersebut untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang tinggi.
Kerja sama kawasan negara-negara dengan kekuatan ekonomi yang signifikan, sumber daya alam yang melimpah, dan posisi geografis yang strategis, akan menciptakan peluang perdagangan yang lebih besar di kawasan Asia Pasifik yang mendorong ketersediaan rantai pasok global, investasi, serta inovasi dan teknologi. Dengan demikian, perdagangan internasional akan berpusat di Asia terutama Kawasan lndo-Pasifik.

f. Tata Kelola Keuangan Global
Pergeseran kebijakan fiskal, *Central Bank Digital Currency* (CBDC) dan *FinTech*.

g. Pertumbuhan Kelas Menengah (*Middle Class*)
Jumlah kelas menengah dunia pada 2045 diperkirakan akan mencapai 8,8 miliar atau lebih dari 90% terhadap populasi dunia.

h. Peningkatan Persaingan Pemanfaatan Sumberdaya Alam
Bertambahnya populasi penduduk dan aktivitas ekonomi yang menyebabkan peningkatan kebutuhan SDA di antaranya air, pangan, energi, mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah.

i. Perubahan Iklim
Dengan adanya krisis peningkatan suhu global disertai cuaca ekstrem dan bencana akan mendorong perubahan tren dalam dinamika pembangunan global, seperti meningkatnya urgensi untuk meninggalkan paradigma pembangunan lama secara *business-as-usual* (BaU) menuju ke praktik yang lebih berkelanjutan. Melalui penerapan ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon merupakan arah pembangunan global di masa mendatang. Stimulus hijau dan paket-paket stimulus lainnya menjadi tren kebijakan global ke depan.

j. Pemanfaatan Luar Angkasa (*Space Economy*);
Perekonomian antariksa secara global akan tumbuh secara signifikan untuk jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu, negara-negara diharapkan dapat meningkatkan kapasitas untuk mengeksplorasi luar angkasa secara khusus dalam hal pengembangan teknologi mutakhir dan kompetensi SDM.

2. Isu utama yang diusung Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 2022 adalah:
a. Transisi Energi Berkelanjutan
Memberikan akses energi yang terjangkau dan dapat diandalkan untuk semua tujuan.

b. Transformasi Digital

Tujuan dari transformasi digital adalah menciptakan pemulihan ekonomi global yang lebih inklusif terutama melalui integrasi digital Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

c. Arsitektur Kesehatan Global

Tema penguatan arsitektur global itu dibagi lagi ke dalam tiga subtema terdiri dari (1) membangun ketahanan sistem kesehatan global, (2) harmonisasi standar protokol kesehatan global, dan (3) memperluas manufaktur global serta pusat pengetahuan untuk pencegahan pandemi, mitigasi, dan respons. Saat ini akses terhadap solusi medis masih tidak setara, utamanya di negara-negara berkembang, sehingga diperlukan mekanisme permanen untuk mendorong akses setara terhadap solusi medis.

3.2.2. Isu Strategis Nasional

Isu strategis dan tantangan pembangunan nasional terhadap upaya pencapaian sasaran pembangunansebagaimana tertuang dalam Rancangan Akhir RPJPN Tahun 2025-2045, antara lain :

a. Rendahnya Tingkat Produktivitas Di Tengah Persaingan Global Yang Semakin Meningkat.

Kondisi produktivitas yang rendah dibandingkan negara-negara yang menuju negara maju lainnya di antaranya disebabkan oleh kualitas SDM yang jauh tertinggal terlebih pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi yang tertinggal, dan kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum yang masih lemah.

b. Lemahnya Kapasitas Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi (IPTEKIN).

Kapasitas IPTEKIN untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 sangat penting untuk meningkatkan daya saing bangsa melalui peningkatan efisiensi dan penciptaan produk-produk berkualitas dan berteknologi tinggi.

c. Deindustrialisasi Dini dan Produktivitas Sektor Pertanian yang Masih Rendah.

Beberapa faktor penyebab kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB terus mengalami penurunan antara lain adalah karena terjadinya pelemahan sektor manufaktur (*dutch diseases*), rendahnya produktivitas faktor-faktor produksi, terbatasnya kemampuan adopsi teknologi serta pemanfaatan hasil riset dan inovasi, keterbatasan dukungan ekosistem industri di luar Jawa, dan terjadinya ekonomi biaya tinggi akibat biaya logistik dan tingkat suku bunga. Selain itu, produktivitas sektor pertanian yang rendah disebabkan oleh lambatnya regenerasi petani dan nelayan, kurangnya tingkat keterampilan petani dan nelayan, terbatasnya adopsi teknologi dan akses keuangan, belum adanya standar proses, semakin berkurangnya daya dukung lahan pertanian, serta masih lemahnya kelembagaan ekonomi petani dan nelayan yang berbadan hukum.

d. Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi Pariwisata.
   Kinerja pariwisata masih berada di bawah potensinya disebabkan terutama oleh masih terbatasnya atraksi, aksesibilitas, dan amenitas, serta kapasitas pengelolaan dan penerapan pariwisata berkelanjutan cenderung masih rendah serta belum optimalnya inovasi dan akses ke pasar internasional.
e. Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi Ekonomi Laut.
   Indonesia memiliki potensi ekonomi laut yang tinggi, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal untuk penciptaan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan juga peningkatan kesejahteraan secara inklusif dan berkelanjutan.
f. Rendahnya Kontribusi UMKM dan Koperasi Pada Penciptaan Nilai Tambah Ekonomi.
   UMKM dan koperasi berkontribusi tinggi pada penyerapan tenaga kerja, tetapi kontribusinya terhadap perekonomian relatif rendah. Hal ini disebabkan karena sebagian besar UMKM memiliki pekerja berkeahlian rendah (*low-skilled workers*) dan juga banyak bergerak di sektor bernilai tambah rendah, rendahnya penggunaan teknologi, inovasi, dan investasi untuk pengembangan usaha, rendahnya kapasitas pengelolaan, rendahnya partisipasi UMKM dalam rantai nilai produksi, dan rendahnya jumlah koperasi yang bergerak di sektor riil.
g. Di Tengah Kecepatan Perkembangan Teknologi Digital, Infrastruktur dan Literasi Digital Masih Terbatas.
   Kapasitas dan kapabilitas TIK yang dimiliki Indonesia saat ini belum memadai baik dari sisi penawaran maupun permintaan dalam mempercepat pemanfaatannya secara optimal untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
h. Pembangunan Belum Sepenuhnya Menerapkan Prinsip-Prinsip Berkelanjutan.
   Untuk menjaga keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan, pembangunan perlu menerapkan ekonomi hijau secara menyeluruh. Hambatan dalam penerapan ekonomi hijau salah satunya yaitu penggunaan energi fosil yang masih tinggi. Di samping itu, pencemaran dan kerusakan lingkungan masih menjadi tantangan untuk mencapai ekonomi hijau.
i. Belum Optimalnya Integrasi Ekonomi Domestik Sehingga Keterkaitan Ekonomi Antarwilayah Masih Relatif Terbatas.
   Pusat-pusat pertumbuhan lebih berkembang di Pulau Jawa, infrastruktur konektivitas yang belum memadai dan belum terintegrasi sepenuhnya menyebabkan tingginya biaya logistik, masih banyaknya regulasi yang menghambat, serta kuantitas dan kualitas SDM yang belum merata, terutama di luar Pulau Jawa.
j. Produktivitas Tenaga Kerja Indonesia Selama Kurun Waktu 2010-2022 Masih Relatif Tertinggal.
   Ketertinggalan produktivitas terjadi pada tenaga kerja Indonesia masih didominasi oleh lulusan SMP ke bawah, ketidaksesuaian keahlian (*mismatch*) antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan pasar tenaga

kerja, informasi pasar tenaga kerja belum mampu menjadi intelijen pasar kerja yang baik, dan pasar kerja Indonesia belum mampu merespons perubahan cepat jenis lapangan kerja, kebutuhan keahlian, struktur penduduk, serta pola budaya kerja.

k. Tata Kelola Pemerintahan Belum Optimal
   Kelembagaan instansi publik masih dicirikan dengan struktur yang terfragmentasi dan tidak efektif karena proses bisnis dan tata kelola urusan pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak adaptif.
l. Kepastian dan Penegakan Hukum Masih Lemah
   Regulasi yang berlebih (*hyper regulation*) dan kualitas regulasi yang rendah telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih dan disharmoni regulasi, baik di pusat maupun daerah. Selain itu, sistem hukum belum mampu sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan.
m. Demokratisasi Belum Optimal
   Demokrasi masih terbatas pada hal-hal prosedural seperti teknis kepemiluan dan hubungan formal kelembagaan. Selain itu Partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan dan demokratisasi belum optimal dan prinsip keterbukaan pemerintah belum sepenuhnya terarus utamakan dalam pelaksanaan pembangunan.
n. Ketimpangan Antar Jawa dan Luar Jawa Masih Cukup Tinggi.
   Secara umum dikarenakan masih kurangnya ketersediaan SDM yang berkualitas dan penyebarannya belum merata di seluruh wilayah Indonesia, belum memadainya ketersediaan infrastruktur di wilayah-wilayah yang tertinggal khususnya di bagian timur Indonesia, serta masih terbatasnya anggaran pemerintah daerah dan belum optimalnya pemanfaatan anggaran. Kondisi tersebut telah menyebabkan rendahnya minat investasi di luar Pulau Jawa terutama di KTI.

3.2.3. Isu Strategis Regional

Isu strategis regional didasarkan pada hasil penelaahan isu strategis tematik pulau pada dokumen Rancangan Akhir RPJPN Tahun 2025-2045 dan isu strategis pada dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD Provinsi Jawa Timur, antara lain :

Isu dan Potensi Kewilayahan Pulau Jawa yang tertuang pada dokumen Rancangan Akhir RPJPN Tahun 2025-2045

1. Isu Utama Ekonomi Wilayah Jawa
   - Padatnya jumlah penduduk menyebabkan tingginya alih fungsi lahan, tingginya kebutuhan pangan, tingginya tenaga kerja informal dan pengangguran;
   - Rendahnya penggunaan teknologi tinggi pada industri; dan
   - Permasalahan banjir, kemacetan, dan permukiman kumuh di wilayah metropolitan yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi.

2. Isu Utama Sosial Wilayah Jawa
   - Masih terbatasnya perkembangan sumber daya manusia di Wilayah Jawa. Hal ini disebabkan karena belum meratanya akses masyarakat terhadap layanan dasar;
   - Tingkat kemiskinan pada beberapa provinsi di Pulau Jawa masih berada di atas rata-rata nasional; dan
   - Provinsi di Wilayah Jawa masuk dalam 5 (lima) provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi secara nasional. Hal ini disebabkan ketatnya persaingan pencari kerja di perkotaan serta kualifikasi lulusan sekolah kejuruan dan vokasi belum sesuai dengan kebutuhan industri.
3. Isu Utama Sarana dan Prasarana Wilayah Jawa
   - Produksi tenaga listrik didominasi oleh sumber energi fosil;
   - Pemanfaatan infrastruktur TIK belum sepenuhnya dimanfaatkan;
   - Kebutuhan untuk air baku dan irigasi masih terbatas; dan
   - Kebutuhan rumah tangga layak huni dan terjangkau juga masih belum dapat terpenuhi.
4. Isu Utama Terkait Desentralisasi dan Otonomi Daerah Wilayah Jawa
   - Penegakan hukum;
   - Antisipasi pembangunan perkotaan dan peningkatan pelayanannya untuk menghadapi perkiraan peningkatan persentase penduduk wilayah perkotaan;
   - Kapasitas fiskal Provinsi di Jawa sudah tinggi, terutama di wilayah barat dan timur.
5. Isu Utama Terkait Sosial Budaya dan Ekologi Wilayah Jawa
   - Masih rendahnya persentase penduduk yang pernah terlibat (baik sebagai pelaku/pendukung) dalam pertunjukkan seni, kegiatan organisasi, serta menghadiri atau menyelenggarakan upacara adat;
   - Belum optimalnya peran dan fungsi keluarga dalam mewujudkan sumber daya manusia berkualitas;
   - Masih tingginya ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan di berbagai bidang pembangunan;
   - Masih rendahnya pengakuan dan penghormatan hak-hak anak, perempuan, penyandang disabilitas dan lansia;
   - Penurunan kualitas lingkungan hidup, utamanya banjir rob yang terjadi pada pesisir utara Wilayah Jawa serta pencemaran udara dan air; dan
   - Kondisi rawan bencana di Pulau Jawa.
6. Sedangkan Isu Strategis yang Tertuang Pada Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur, Adalah :
   - Penurunan daya dukung pangan dan air;
   - Peningkatan risiko bencana;
   - Peningkatan tuntutan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM);
   - Belum optimalnya pengembangan investasi lokal;
   - Disparitas kawasan pesisir Jawa Timur; dan
   - Masih tingginya angka kemiskinan.

3.2.4. Isu Strategis Daerah

Kriteria penentuan isu-isu strategis pembangunan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

a. Merupakan permasalahan utama yang sering dikemukakan dan menjadi prioritas bagi mayoritas pemangku kepentingan utama pembangunan di Provinsi Jawa Timur;
b. Merupakan permasalahan atau isu utama yang jika ditangani atau dipecahkan secara simultan hasilnya saling mempengaruhi untuk menyelesaikan permasalahan Provinsi Jawa Timur lainnya;
c. Merupakan permasalahan yang memiliki dampak luas pada pencapaian target-target pembangunan Provinsi Jawa Timur di berbagai bidang;
d. Merupakan pernyataan isu utama yang memiliki pengaruh besar atau signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan utama di Provinsi Jawa Timur;
e. Merupakan faktor utama yang memiliki daya ungkit signifikan terhadap pencapaian bidang pembangunan lainnya di Provinsi Jawa Timur;
f. Merupakan tugas dan tanggung jawab utama Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mana permasalahan utama memang memerlukan intervensi kewenangan, kebijakan dan implementasi.

Berikut adalah identifikasi isu strategis di Jawa Timur dalam rentang waktu pembangunan di Tahun 2025-2045 :

1. Penguatan Ekonomi Daerah Melalui Peningkatan Produktivitas, Daya Saing dan Nilai Tambah Sumber Daya Lokal

   Isu strategis mengenai penguatan ekonomi daerah meliputi peningkatan produktivitas dan nilai tambah sumber daya lokal dalam rangka menggerakkan perekonomian regional, memanfaatkan potensi lokal secara maksimal, serta mengoptimalkan sumber daya ekonomi melalui peningkatan akses pembiayaan, kapasitas sumber daya manusia, dan perluasan akses pasar.

   Langkah-langkah holistik dan berkelanjutan diperlukan untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang kuat, inklusif, dan berdaya saing, serta memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi regional dan nasional secara keseluruhan.
2. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur yang Berkelanjutan

   Ketersediaan Infrastruktur di Jawa Timur masih memerlukan peningkatan dari aspek kualitas maupun pemerataan. Infrastruktur pelayanan dasar, sumber daya air, maupun transportasi yang terintegrasi dengan penataan ruang termasuk mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pengurangan risiko bencana dan krisis iklim dibutuhkan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sumber daya lokal guna mendukung penguatan ekonomi daerah.
3. Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Sosial Dasar

   Pemenuhan kebutuhan sosial dasar, khususnya pemenuhan layanan pendidikan, kesehatan, perumahan serta peningkatan lapangan kerja, penanganan *stunting*, dan penanggulangan kemiskinan, menjadi isu strategis karena memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan suatu masyarakat.

4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, Kepedulian Sosial dan Nilai-Nilai Budaya Lokal

   Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dengan menciptakan insan yang berkualitas dimulai dari usia dini hingga usia kerja dengan peningkatan relevansi serta daya saing pendidikan dan pelatihan, pelibatan dunia Industri dan dunia usaha dalam pengembangan vokasi, serta penguasaan adopsi teknologi dan penciptaan inovasi.

   Kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal mencerminkan pentingnya memahami, menghargai, dan memelihara identitas budaya suatu masyarakat dalam konteks globalisasi dan perubahan sosial. Kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal membentuk fondasi kuat untuk membangun masyarakat yang beragam namun tetap kokoh dalam solidaritas, menciptakan keseimbangan antara globalisasi dan keberlanjutan budaya lokal.

5. Pemerataan Kemandirian Pangan dan Pemanfaatan Potensi Energi Baru Terbarukan

   Pemerataan kemandirian pangan dan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan diperlukan untuk mendukung ketahanan nasional dan daerah serta menjawab tantangan krisis pangan global dan perubahan iklim. Pemerataan kemandirian pangan mengacu pada upaya untuk menyediakan akses yang merata terhadap pangan yang cukup, bergizi, dan aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Kemandirian dan ketahanan pangan ditopang oleh 3 (tiga) pilar: ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan.

   Hilirisasi produksi pangan dari pertanian dan perikanan menjadi kebutuhan Jawa Timur ke depan, terutama mengingat bahwa Jawa Timur merupakan provinsi lumbung pangan nasional. Produksi pangan Jawa Timur dikembangkan dengan melakukan hilirisasi melalui penguatan kelembagaan (korporasi) dan diversifikasi usaha petani-nelayan, dan penguatan *linkage* dan logistik (*supply-value chain*) dan hub pangan (*food hub*). Ke depan diperlukan *upgrading* PIA Puspa Agro menjadi Jatim *Food Hub* dengan didukung oleh pengembangan kelembagaan sesuai kebutuhan ke depan (BUMD Pangan atau kelembagaan usaha lain yang relevan). Selain hilirisasi pangan lokal, upaya diversifikasi pangan lokal harus terus dilakukan dalam mewujudkan kemandirian pangan. Upaya-upaya dalam mencegah dan mengurangi timbulan susut dan sisa Pangan/*Food Loss and Waste* (FLW) harus terus dilakukan mengingat masih tingginya tingkat FLW.

   Pemerataan kemandirian pangan juga perlu diupayakan melalui pengembangan kawasan sentra produksi agro (hulu) dan pengembangan SDM agro. Hal ini penting untuk menjaga keberlanjutan dan meningkatkan produksi pangan, serta mengoptimalkan input hilirisasi pangan/agro yang akan meningkatkan kesejahteraan petani.

   Pemanfaatan potensi energi mencakup optimalisasi penggunaan sumber daya energi yang tersedia, termasuk energi terbarukan, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa merusak lingkungan. Untuk itu dalam rangka mendukung komitmen antisipasi perubahan iklim dan Pembangunan berkelanjutan, maka ketahanan energi, transisi energi serta penguatan Kerjasama untuk pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) menjadi perhatian khusus di Jawa Timur.

Penting untuk menciptakan kebijakan dan strategi pembangunan yang mempertimbangkan interkoneksi antara produksi pangan dan sumber daya energi. Dengan demikian, dapat tercipta lingkungan yang berkelanjutan, mandiri, dan berdaya saing mendunia bagi masyarakat lokal dan wilayah secara keseluruhan.

6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kapasitas Penanggulangan Bencana.

   Ancaman terhadap penurunan daya dukung dan daya tampung cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya tekanan terhadap lingkungan yang berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penduduk serta aktivitas perekonomian termasuk pertumbuhan kawasan perumahan dan permukiman, serta industri dan perdagangan. Hal ini tidak terlepas bahwa setiap aktivitas perekonomian akan menghasilkan limbah baik yang bersifat B3 maupun non B3 yang berpotensi menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan hidup baik air, tanah, maupun udara. Di sisi lain, peningkatan aktivitas perekonomian merupakan penyumbang peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebagai salah satu penyebab terjadinya perubahan iklim yang perlu diantisipasi.

   Indikasi terjadinya perubahan iklim saat ini secara langsung mulai terasa dan ditandai dengan adanya kenaikan temperatur serta curah hujan yang ekstrem. Perubahan iklim merupakan ancaman besar bagi keberlangsungan berbagai sektor kehidupan termasuk sektor perekonomian, kesehatan, sosial, dan sebagainya. Laju emisi Gas Rumah Kaca (GRK) akan terus meningkat secara eksponensial jika intervensi kebijakan terhadap perubahan iklim tidak dilakukan atau *Business As Usual* (BAU). Empat sektor prioritas diperkirakan bisa mengalami kerugian yang cukup signifikan akibat perubahan iklim adalah yaitu sektor pesisir dan laut, sektor pertanian, sektor kesehatan, serta sektor sumber daya air. Kejadian bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, gelombang pasang, dan puting beliung sebagai ancaman dari perubahan iklim mendominasi kejadian bencana di Indonesia termasuk di Jawa Timur.

   Peningkatan kapasitas dalam hal kesiapsiagaan dengan melibatkan pengembangan sistem peringatan dini yang efektif dan merata, pelatihan masyarakat untuk merespon cepat ketika bencana terjadi, serta simulasi dan latihan evakuasi sangat dibutuhkan. Peningkatan kapasitas ketangguhan terhadap bencana dan kesiapsiagaan dalam pengurangan risiko bencana pada pembangunan berkelanjutan juga perlu dilaksanakan dengan mengintegrasikan rencana penanggulangan bencana ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

7. Optimalisasi Penanganan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat serta Penguatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

   Isu ini menitik beratkan upaya untuk meningkatkan pelayanan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat dan pada saat yang sama memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik.

Penguatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah dan pelayanan publik difokuskan untuk perbaikan kualitas tata kelola pemerintahan dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan serta menyederhanakan prosedur administratif dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Proses birokrasi yang rumit dapat menjadi sumber ketidakpuasan masyarakat, sehingga penyederhanaan prosedur, pemantauan dan evaluasi regulasi dan pelayanan yang efisien menjadi sangat penting. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pengembangan SDM di sektor publik juga menjadi sangat penting. Pendidikan, pelatihan, dan bentuk pengembangan kompetensi lainya bagi pegawai pemerintah dapat meningkatkan kapasitas dan profesionalisme sehingga dapat memberikan pelayanan yang berkualitas.

Optimalisasi penanganan gangguan Trantibumlinmas sejalan dengan penguatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik merupakan langkah esensial untuk menciptakan lingkungan sosial yang aman dan adil agar tidak terjadi konflik sosial.

Penguatan Trantibumlinmas tentunya terfokus pada pemusatan data gangguan dan kegiatan dengan menggunakan sistem informasi, serta melibatkan peran serta masyarakat dalam memberikan informasi melalui saluran pengaduan, sehingga integrasi data dan penanganan gangguan Trantibumlinmas di Jawa Timur dapat dioptimalkan. Potensi terjadinya gangguan Trantibumlinmas juga menjadi perhatian khususnya dalam proses demokrasi sehingga peran pemerintah dalam hal peningkatan pelembagaan dan pembudayaan nilai – nilai pancasila.

BAB IV
VISI DAN MISI DAERAH

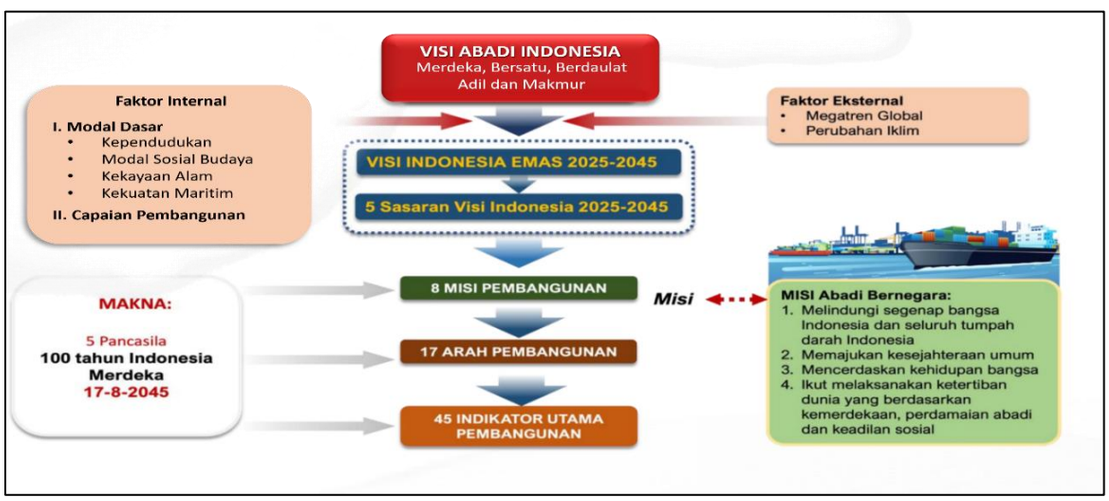
4.1. Visi

Visi dan Misi pembangunan jangka panjang didasarkan pada permasalahan dan isu strategis pembangunan jangka panjang daerah. Sebagai upaya untuk menyelaraskan antara Visi Misi Jangka Panjang Provinsi Jawa Timur dengan Visi Misi Nasional, maka dilakukan telaah terhadap cita-cita Indonesia Emas Tahun 2045, dan Misi Jangka Panjang Nasional sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045. Secara detail, penjabaran Visi dan Misi Pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Timur sebagaimana disajikan dalam uraian di bawah ini.

4.1.1. Telaah Visi Dan Misi RPJPN 2025-2045

Sebagaimana disajikan dalam dokumen RPJPN bahwa rumusan Visi Indonesia Emas 2045: Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan, menjadi titik tolak bagi seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia dalam penyusunan misi pembangunan jangka panjangnya. Terkait dengan hal tersebut, maka pada sub bab selanjutnya akan dilakukan telaah terhadap visi dan misi pembangunan jangka panjang nasional dan provinsi. Penyusunan RPJPN 2025-2045 dimulai dengan landasan pemikiran bahwa Visi Abadi Indonesia dalam Pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 adalah acuan utama dalam setiap pembangunan, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Visi ini dijabarkan menjadi Visi Indonesia Emas 2045 dengan mempertimbangkan modal dasar, megatren global, perubahan iklim, daya tampung, dan daya dukung serta pencapaian pembangunan pada periode sebelumnya. Kerangka konseptual Visi Indonesia Emas sebagaimana disajikan dalam bagan di bawah ini.

Gambar 4. 1 Visi Indonesia Emas Tahun 2045



Sumber: RPJPN 2025-2045

Selanjutnya, Visi Indonesia Emas 2045 dicerminkan ke dalam lima sasaran visi yang memberikan unsur imperatif pencapaian pembangunan. Kelima sasaran utama tersebut adalah; (1) pendapatan per kapita setara negara maju, (2) Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, (3) kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, (4) daya saing sumber daya manusia meningkat, dan (5) intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju *net zero emission*.

Gambar 4. 2 Lima Sasaran Utama Visi Indonesia 2045



Sumber: RPJPN 2025-2045

Selanjutnya, lima sasaran utama Visi RPJPN tersebut di atas menjadi acuan dalam perumusan sasaran dan target pembangunan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia.

4.1.2. Visi RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045

Rumusan Visi dan Misi Rencana Pembangungan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 merupakan rujukan penting dalam perumusan Visi dan Misi RPJPD kabupaten/kota. Berdasarkan pada hasil identifikasi permasalahan dan isu strategis pembangunan jangka Panjang, maka dirumuskan Visi Rencana Pembangungan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 adalah Jawa Timur Berakhlak, Maju, Mendunia, dan Berkelanjutan.

“Jawa Timur Berakhlak, Maju, Mendunia, dan Berkelanjutan”

Pada Visi tersebut mengandung pengertian bahwa dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang, Jawa Timur diharapkan menjadi provinsi yang memiliki karakter masyarakat yang berakhlak, maju, mampu bersaing secara kompetitif di pasar internasional dan mampu tumbuh menjadi tulang punggung perekonomian nasional dalam rangka mengurangi kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan antar wilayah serta mewujudkan kesejahteraan Masyarakat. Pada Visi ini memiliki 4 (empat) pokok visi yang memiliki arti dan makna penting dalam menggambarkan cita-cita luhur masyarakat Jawa Timur di Tahun 2045. Empat pokok-pokok Visi tersebut adalah:

Jawa Timur Berakhlak

Berakhlak merupakan perwujudan masyarakat berkesalehan sosial yang berkepedulian sosial dan lingkungan, diimplementasikan dalam kehidupan sehari - hari agar mampu mengembangkan kerukunan hidup antar-umat beragama, memahami dan mengamalkan prinsip-prinsip kebersamaan, kesediaan menolong sesama, sehingga tercipta harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Jawa Timur Maju

Diksi “maju” ini merupakan komitmen sekaligus semangat (spirit) yang menegaskan bahwa provinsi Jawa Timur harus mencapai kemajuan dari tahun ke tahun. Kemajuan tersebut meliputi seluruh aspek pembangunan seutuhnya. Hal ini sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa hakikat dalam pembangunan nasional adalah: mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi.

Pada konteks Jawa Timur, kemajuan ini ditandai dengan terpenuhinya segala kebutuhan pokok, pendidikan yang layak, terpenuhi jaminan Kesehatan, jaminan sosial utamanya saat memasuki usia tidak produktif (lansia), rendahnya tingkat kriminalitas, serta tingkat kebahagiaan relatif lebih tinggi. Selain itu, juga ditandai dengan kesempatan yang merata dalam segala aspek kehidupan seperti dalam hal distribusi sumber daya, akses terhadap layanan publik, perlakuan yang sama di hadapan hukum, kesempatan bekerja, dan pendidikan serta kesehatan. Kondisi tersebut merupakan penggambaran kondisi masyarakat Jawa Timur yang sejahtera *baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur*.

Jawa Timur Mendunia

Mendunia, mengandung pengertian bahwa Jawa Timur dikenal dan diketahui oleh masyarakat dunia, baik dalam hal pariwisata kelas dunia, maupun stabilitas ekonomi makro terutama kinerja industri, perdagangan dan ekonomi syariah yang kuat untuk melakukan ekspansi perdagangan luar negeri, didukung melalui potensi sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global, serta sumber daya alam yang melimpah sehingga produksi dalam negeri memenuhi pasar internasional.

Jawa Timur Berkelanjutan

Berkelanjutan, mengandung makna bahwa pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu pengelolaan sumber daya dengan efektif dan efisien tanpa merusak lingkungan, sehingga dapat mempertahankan kualitas kehidupan manusia. Pembangunan berkelanjutan dilaksanakan dengan prinsip kesejahteraan ekonomi, keadilan sosial, dan berwawasan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan memuat serangkaian proses yang harus implementasikan di masa kini maupun masa yang akan datang. Hal tersebut penting untuk menjaga konsistensi dari satu masa dan antar periode pemerintahan. Kebijakan pembangunan yang senantiasa berkesinambungan merupakan kekuatan utama untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPD) Tahun 2025-2045, dan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), perumusan Visi RPJPD harus diselaraskan dengan Visi RPJPN. Keselarasan Visi RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 dengan Visi RPJPN adalah sebagaimana pada gambar 4.3.

Gambar 4. 3 Keselarasan Visi RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 dengan Visi RPJPN



4.2. Sasaran Visi

Mengacu pada gambar 4.3 di atas maka Visi RPJPD Jawa Timur telah selaras dengan Visi RPJPN yang selanjutnya untuk mewujudkan pencapaian target Sasaran Utama Visi pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Timur, ditetapkan Lima Sasaran Utama Visi Jawa Timur 2045 sebagaimana tercantum dalam tabel 4.1.

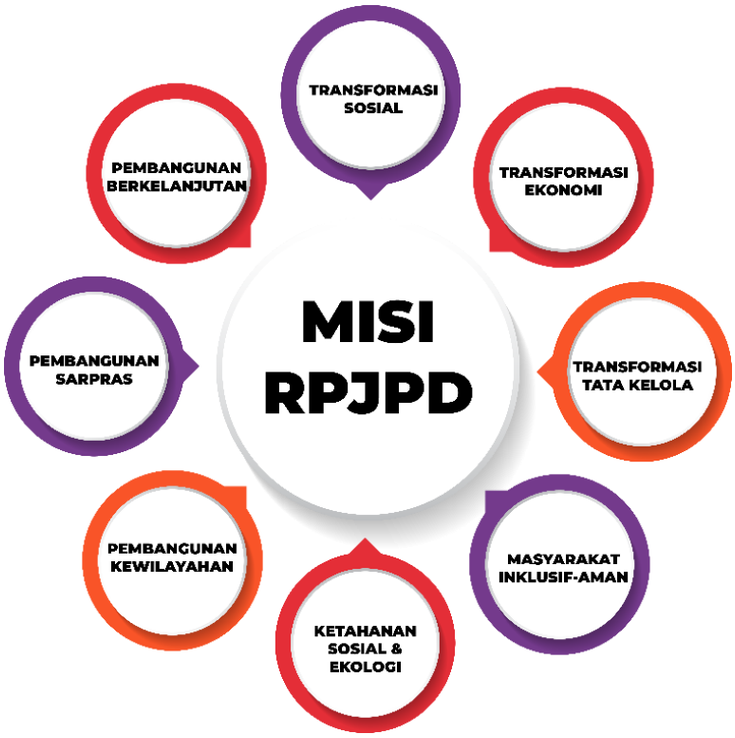
Tabel 4. 1 Lima Sasaran Utama Visi Jawa Timur 2045

Sasaran Visi		Indikator	Baseline 2025	Target 2045
1	Peningkatan Pendapatan per Kapita	PDRB per kapita (Rp Juta)	78,00 -78,39	396,86 - 475,84
		Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	63,17	243,87
		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	30,60 - 30,66	36,27 - 36,88
2	Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan	Tingkat Kemiskinan (%)	8,90 – 9,40	0,21 - 0,71
		Rasio Gini (Indeks)	0,381 – 0,386	0,319-0,370
		Kontribusi PDRB Provinsi	14,31	12,36
		Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,10-5,41	4,57-5,65
3	Kepemimpinan dan Pengaruh Jawa Timur di Kancah Nasional Meningkat	Indeks Daya Saing Daerah	3,80	4,00
4	Produktivitas & Daya Saing SDM Meningkat	Indeks Modal Manusia	0,62	0,78
5	Penurunan emisi GRK menuju *net zero emission*	Penurunan intensitas emisi GRK (%)	1,00	83,71
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,17	78,75

4.3. Misi

Berdasarkan karakteristik dan potensi yang dimiliki oleh pemerintah provinsi Jawa Timur, maka dirumuskan 8 (delapan) Misi Pembangunan Provinsi Jawa Timur yang selaras dengan Misi RPJPN.

Gambar 4. 4 Kata Kunci Misi RPJPD Provinsi Jawa Timur 2025-2045



Berdasarkan 8 (delapan) kata kunci (*Key Word*) sebagaimana disajikan dalam gambar 4.4 di atas, maka selanjutnya dirumuskan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045. Misi tersebut merupakan penjabaran dari visi pembangunan jangka panjang daerah, yang selanjutnya dirumuskan dalam statement/kalimat misi, untuk memberi kejelasan implementasi dalam Arah Kebijakan.

Rumusan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045, sebagai berikut:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial dalam Menunjang SDM Berkualitas;
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan;
3. Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Pelayanan Publik Inovatif;
4. Mewujudkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah;
5. Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
6. Memantapkan Pembangunan Kewilayahan yang Mendorong Titik Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Memperkuat Pemerataan Pembangunan;
7. Mewujudkan Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; dan
8. Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan.

Selanjutnya, penjabaran lebih detail mengenai ke delapan Misi (agenda) pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045, adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial dalam Menunjang SDM Berkelanjutan

   Misi ini meliputi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan peningkatan perlindungan sosial dalam mewujudkan masyarakat Jawa Timur yang maju, sehat, unggul, dan inovatif. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dicapai melalui peningkatan kualitas pendidikan, penyediaan literasi ilmu pengetahuan, peningkatan kesehatan, dan pengendalian penduduk. Peningkatan jaminan kesejahteraan sosial dicapai melalui pengentasan kemiskinan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan kesejahteraan keluarga.

   Sebagai perwujudan pencapaian visi Jawa Timur Berakhlak dan Jawa Timur Mendunia, peningkatan kualitas SDM ditekankan pada persiapan SDM yang kompeten untuk bersaing secara global disertai dengan pendidikan karakter sebagai fondasi dalam membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga bermoral dan beretika. Memulai pendidikan budi pekerti sejak usia dini memiliki dampak yang sangat signifikan pada pembentukan karakter anak. Penekanan pendidikan karakter melalui pendidikan budi pekerti melalui pembentukan karakter sejak usia dini, mengintegrasikan pendidikan karakter sebagai bagian penting pada aspek pembelajaran, meningkatkan peran Keluarga dan masyarakat dalam mendukung pendidikan karakter, serta mengajarkan pemahaman dan kesadaran akan keragaman budaya. Persiapan SDM yang kompeten untuk bersaing secara global melalui peningkatan keterampilan Abad 21 dengan kemampuan berpikir kritis, kreatifitas, literasi digital serta metode pembelajaran yang interaktif dan partisipatif.

2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan

   Misi ini meliputi peningkatan nilai tambah ekonomi melalui akselerasi industri pengolahan dan perdagangan, perluasan pasar domestik serta internasional, optimalisasi pertanian (dalam arti luas) melalui pengembangan agrominapolitan, pengembangan pariwisata berkelanjutan, pemberdayaan UKM, Koperasi dan BUMDesa, implementasi ekonomi biru dan ekonomi hijau, penguatan stabilitas ekonomi, penerapan ekonomi syariah dan ekonomi kreatif yang didukung transformasi digital dan infrastruktur/konektivitas pendukung ekonomi, sebagai perwujudan pencapaian visi Jawa Timur Mendunia.

3. Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Pelayanan Publik Inovatif

   Misi ini meliputi penguatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam hal tata kelola pemerintahan, menyederhanakan prosedur administratif dan proses birokrasi rumit yang dapat menjadi sumber ketidakpuasan masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi prima. Hal ini dicapai dengan membangun sistem pemerintahan yang handal (*Good Governance*) dan Pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*), kebijakan pengawasan internal dan eksternal yang efektif dengan produk hukum yang berkualitas dan berintegritas, serta kapasitas aparatur daerah (ASN) yang gesit (*Agile*), inovatif dan memiliki komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugas. Sehingga diperlukan komitmen sekaligus semangat (spirit) yang menegaskan bahwa Tata Kelola Pemerintahan bersih dan handal serta pelayanan

publik yang prima di lingkup Provinsi Jawa Timur harus mencapai kemajuan dari tahun ke tahun sebagai perwujudan pencapaian visi Jawa Timur Maju.

4. Mewujudkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

   Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Jawa Timur yang aman, nyaman, tertib, tentram, demokratis, dan ekonomi yang stabil. Stabilitas keamanan dan demokrasi yang kondusif merupakan modal dalam memperkokoh stabilitas ekonomi makro sebagai perwujudan pencapaian visi Jawa Timur Maju.

   Keamanan daerah tangguh dilakukan melalui optimalisasi penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat (trantribumlinmas), demokrasi substansial melalui internalisasi nilai-nilai kebangsaan, dan Pendidikan politik untuk menjamin hak-hak politik dan demokrasi masyarakat. Sedangkan penguatan stabilitas ekonomi makro dilakukan melalui penguatan daya beli masyarakat, pengendalian inflasi serta peningkatan kapasitas fiskal daerah. Dengan tercapainya misi ini, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendapatkan kemajuan dalam urusan Trantibumlinmas, Penguatan Nilai Demokrasi dan Penguatan stabilitas ekonomi makro di Jawa Timur.

5. Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

   Ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai dukungan perwujudan visi Jawa Timur Berakhlak dan Jawa Timur Berkelanjutan diharapkan dapat menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi serta mengoptimalkan sosial budaya untuk tahan menghadapi segala tantangan. Aspek penting dalam penguatan ketahanan sosial adalah penguatan nilai-nilai agama dan budaya sebagai pijakan spiritual yang kokoh dan teruji, penguatan ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, dan pembangunan karakter melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas keluarga.

   Pemantapan ketahanan ekologi diwujudkan melalui pengembangan wilayah berbasis tata ruang, pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan efisien, perlindungan lingkungan hidup, ketahanan energi, air dan pangan, serta ketangguhan penanggulangan bencana dan perubahan iklim.

6. Memantapkan Pembangunan Kewilayahan yang Mendorong Titik Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Memperkuat Pemerataan Pembangunan

   Pembangunan kewilayahan diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat sebagai perwujudan visi Jawa Timur Maju. Misi ini difokuskan untuk pemerataan pembangunan antar wilayah, utamanya antara Wilayah Utara – Selatan, Madura Kepulauan. Upaya ini dilakukan dengan pemenuhan layanan infrastruktur dasar, penguatan konektivitas antar wilayah, dan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi dengan memperhatikan karakteristik wilayah. Pemerataan pembangunan antar wilayah dilaksanakan untuk memperkuat akses pasar regional dan global serta mengurangi biaya logistik. Pembangunan wilayah yang mendukung pemerataan pelayanan sosial dasar masyarakat yang berkualitas diharapkan dapat menekan angka kemiskinan dan pengangguran.

7. Mewujudkan Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

   Pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan diperlukan untuk menjamin terwujudnya visi Jawa Timur Berkelanjutan. Misi ini difokuskan untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat dan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan tangguh bencana. Pemenuhan sarana dan prasarana tersebut dilaksanakan secara menyeluruh baik berupa infrastruktur pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman, sarana transportasi, sumber daya air, energi dan pendukung pengembangan sektor riil, pertanian serta kelautan.

   Keberadaan sarana dan prasarana yang mampu mewujudkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan kondisi lingkungan hidup merupakan bagian dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

8. Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan

   Kesinambungan pembangunan penting untuk menjaga konsistensi dari satu masa dan antar periode pemerintahan, utamanya untuk menghadapi perubahan-perubahan mendasar yang memerlukan penguatan implementasi dan pembiayaan pembangunan. Misi ini dilaksanakan melalui sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah, sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi, peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional, perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko, peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan, pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan *Creative Finance.* Melalui perwujudan pembangunan yang berkesinambungan pada setiap periode perencanaan pembangunan diharapkan mampu mewujudkan visi Jawa Timur Berkelanjutan.

Sebagai upaya untuk mendukung keselarasan antara Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 dengan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, maka disajikan dalam ilustrasi Tabel 4.2.

Keselarasan 8 (delapan) Visi pembangunan Jangka Panjang sebagaimana disajikan di atas, memiliki konsekuensi pada pembagian peran yang lebih tegas, antara pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Sehingga implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional lebih mudah untuk dilaksanakan. Peraturan pemerintah ini yang memberikan konsep mengenai *Money Follow Function* yang dikembangkan penjadi *Money Follow Program* dan pentingnya kebijakan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS).

Tabel 4. 2 Penyelarasan Misi RPJP Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025-2045

No	RPJPN		RPJPD
	Kelompok Agenda/Misi	Misi/Agenda	Misi/Agenda
1	Transformasi Indonesia	Transformasi Sosial	Mewujudkan Transformasi Sosial dalam Menunjang SDM Berkualitas
2		Transformasi Ekonomi	Mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan
3		Transformasi Tata Kelola	Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Pelayanan Publik Inovatif
4	Landasan Transfromasi	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Mewujudkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
5		Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
6	Kerangka Implementasi Transformasi	Pembangunan Kewilayahan yang Merata & Berkeadilan	Memantapkan Pembangunan Kewilayahan yang Mendorong Titik Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Memperkuat Pemerataan Pembangunan
7		Sarana dan Prasarana yang Berkualitas & Ramah Lingkungan	Mewujudkan Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
8		Kesinambungan Pembangunan	Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan

Visi dan Misi RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 dirumuksan untuk menjawab permasalahan dan isu strategis dengan keterkaitan yang dapat dilihat pada tabel penyandingan sebagai berikut :

Tabel 4. 3 Penyandingan Permasalahan, Isu Strategis, Visi dan Misi

PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	VISI	MISI
• Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat • Rendahnya kualitas SDM • Rendahnya Kesadaran Masyarakat Untuk Melestarikan Nilai-nilai Budaya Lokal	• Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, Kepedulian Sosial dan Nilai-Nilai Budaya Lokal	Berakhlak	Misi 1 : Mewujudkan Transformasi Sosial dalam Menunjang SDM Berkualitas Misi 5 : Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
• Belum meratanya sarana prasarana pelayanan dasar publik serta konektivitas thd pusat-pusat pertumbuhan wilayah. • Terdapatnya potensi konflik sosial & relatif tingginya angka kekerasan thp perempuan dan anak serta perkawinan anak • Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Adaptif serta Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	• Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Sosial Dasar • Optimalisasi Penanganan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat serta Penguatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Maju	Misi 3 : Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Pelayanan Publik Inovatif Misi 4 : Mewujudkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah Misi 6 : Memantapkan Pembangunan Kewilayahan yang Mendorong Titik Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Memperkuat Pemerataan Pembangunan
• Rendahnya produktivitas dan nilai tambahnya sumber daya lokal dalam pengembangan perekonomian daerah	• Penguatan Ekonomi Daerah melalui Peningkatan Produktivitas, daya saing dan Nilai Tambah Sumber Daya Lokal	Mendunia	Misi 2 : Mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan

PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	VISI	MISI
• Belum meratanya kemandirian pangan dan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan • Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup dan Keterbatasan Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	• Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkelanjutan • Pemerataan kemandirian pangan dan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan • Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kapasitas Penanggulangan Bencana	Berkelanjutan	Misi 7 : Mewujudkan Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas Dan Ramah Lingkungan Misi 8 : Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan

“Jawa Timur Berakhlak, Maju, Mendunia dan Berkelanjutan”

01 JAWA TIMUR BERAKHLAK





JAWA TIMUR MAJU, MENDUNIA 02

03 JAWA TIMUR BERKELANJUTAN



Visi:

“Jawa Timur Berakhlak, Maju, Mendunia dan Berkelanjutan”



BAB V
ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

5.1. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 dirumuskan dengan tujuan untuk memberi panduan (Arah Kebijakan) pelaksanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD) pada periode lima tahunan yang berkenaan. Hal ini untuk memperjelas penjabarannya ke dalam visi, misi, dan prioritas pembangunan jangka menengah (RPJMD).

Setelah memperhatikan isu strategis pembangunan Jawa Timur dan arah kebijakan nasional yang tertuang di dalam RPJPN, selanjutnya tahapan pembangunan disajikan secara ringkas pada tabel di bawah ini serta dirumuskan secara bertahap dengan mempertimbangkan berbagai sumber daya dan peluang yang dimiliki.

Pada tahapan pertama (2025-2029) adalah penguatan fondasi transformasi. Pada tahap ini, Transformasi Sosial dititikberatkan pada pemerataan pelayanan dan sarana prasarana kesehatan dan pendidikan sesuai kondisi wilayah, peningkatan kualitas pengajaran, produktivitas, daya saing, dan keahlian, serta pemenuhan sistem perlindungan sosial yang terintegrasi dan berbasis satu data.

Transformasi Ekonomi difokuskan pada hilirisasi sumber daya alam unggulan termasuk sektor Agro, peningkatan produktivitas tenaga kerja, penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru, penguatan sektor ekonomi yang berbasis riset dan inovasi, pemerataan akses digital, pengembangan sarana prasarana pariwisata, serta pembangunan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan.

Transformasi Tata Kelola difokuskan pada penataan kelembagaan yang tepat fungsi, manajemen ASN sesuai kompetensinya dan penyederhanaan regulasi yang berpotensi menghambat investasi dan pelayanan publik.

Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah, difokuskan pada penguatan peran dan fungsi pemerintah daerah dalam meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) untuk menciptakan kondisi aman dan kondusif pada masyarakat Jawa Timur. Peningkatan peran dan fungsi dilakukan melalui pemberdayaan dan penguatan kelembagaan demokrasi dan infrastruktur politik melalui kerjasama antar *stakeholder* dan penataan kebijakan pendukung stabilitas ekonomi daerah.

Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, difokuskan pada : optimalisasi nilai agama, budaya dan peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia serta menggerakkan modal sosial dalam masyarakat, peningkatan ketangguhan manusia dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan instrumen pengelolaan, serta perlindungan lingkungan hidup dan penguatan keterjangkauan pangan.

Pembangunan Wilayah, pada tahap ini difokuskan untuk perwujudan pusat-pusat pertumbuhan wilayah melalui penyediaan dan optimalisasi sarana prasarana yang memadai dan berwawasan lingkungan untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan. Pembiayaan Pembangunan, dioptimalkan melalui reformasi tata kelola fiskal, serta mobilisasi dan optimalisasi pembiayaan pembangunan non pemerintah.

Pada Tahap Kedua (2030-2034) dengan telah terwujudnya pondasi yang kuat, Jawa Timur melakukan akselerasi transformasi. Pada tahap ini, transformasi sosial dititikberatkan pada peningkatan upaya kesehatan masyarakat, penguatan sistem kesehatan, peningkatan akses dan kualitas pendidikan wajib belajar 13 (tiga belas) tahun serta distribusi tenaga pendidik, dan membangun sistem perlindungan sosial adaptif melalui integrasi program perlindungan sosial.

Transformasi Ekonomi difokuskan pada percepatan hilirisasi sumber daya alam dan peningkatan produktivitas secara masif. Perluasan pusat-pusat pertumbuhan serta optimalisasi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru. Penerapan praktek pengelolaan lingkungan dan pelestarian budaya lokal dalam rangka pariwisata yang berkelanjutan.

Transformasi Tata Kelola difokuskan pada kelembagaan yang adaptif dalam meningkatkan aksesibilitas dan teknologi pelayanan publik ditunjang dengan SDM aparatur berkompeten dan berintegritas.

Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah, difokuskan pada upaya peningkatan keterlibatan masyarakat dalam upaya preventif penanganan gangguan trantibumlinmas, peningkatan peran masyarakat, partai politik dan lembaga pendidikan dalam proses demokrasi melalui pendidikan politik, ideologi dan wawasan kebangsaan, pemahaman dan pengembangan budaya serta etika politik dan peningkatan cakupan layanan pendukung stabilitas ekonomi daerah.

Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, difokuskan pada upaya pemantapan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai pendorong pembangunan sosial ekonomi yang setara dan inklusif untuk mencegah konflik sosial. Implementasi teknologi dan informasi untuk mendukung terwujudnya ketahanan ekologi yang meliputi pangan, air, dan energi, menciptakan masyarakat yang tangguh dan adaptif terhadap perubahan iklim dan bencana.

Pembangunan Wilayah, difokuskan pada percepatan perwujudan koridor pengembangan wilayah untuk pemerataan pembangunan dan mengurangi disparitas wilayah melalui peningkatan konektivitas serta pemerataan sarana prasarana publik yang berkelanjutan. Pembiayaan pembangunan, dilakukan optimalisasi sumber pendanaan pemerintah, dan telah berkembang sumber pendanaan non pemerintah.

Pada Tahap Ketiga (2035-2039), Jawa Timur memulai langkah untuk melakukan ekspansi global. Pada tahapan ini, Transformasi Sosial yang dititikberatkan pada perluasan cakupan jaminan kesehatan yang berkelanjutan, kualitas pelayanan kesehatan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, peningkatan mutu pendidikan melalui angka partisipasi sekolah, kemampuan literasi dan numerasi, kualitas lulusan sekolah menengah kejuruan, iklim keamanan kebhinekaan dan inklusivitas, dan perluasan penerapan perlindungan sosial adaptif sebagai upaya pengentasan kemiskinan pada wilayah kantong kemiskinan.

Transformasi Ekonomi difokuskan pada transformasi menuju *Economic Power House* yang berkelanjutan melalui peningkatan daya saing dalam taraf internasional dengan menekankan pada perluasan dan penguatan peran Jawa Timur dalam *Global Value Chain*. Menjadikan Jawa Timur sebagai Hub Maritim Indonesia melalui penguasaan teknologi menengah dan tinggi serta melakukan diversifikasi dan pengembangan produk pariwisata.

Transformasi Tata Kelola ditekankan pada tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dalam pemenuhan pelayanan publik prima dan peningkatan kapasitas SDM Aparatur.

Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah, tahap ini difokuskan pada penguatan partisipasi masyarakat dalam pelaporan dan penanganan gangguan trantibumlinmas melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi terintegrasi. Kebebasan sipil dan kesetaraan yang terjamin bagi masyarakat Jawa Timur dengan partai politik yang modern dan berintegritas. Penguatan sinergi multi stakeholder pendukung stabilitas ekonomi daerah.

Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, difokuskan pada perwujudan manusia, keluarga, dan masyarakat yang tangguh dan adaptif terhadap perubahan dan bencana, mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan secara inklusif, pengembangan ekonomi hijau dan biru, penerapan dan pengembangan teknologi ramah lingkungan untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi sumber daya alam, pengurangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, optimalisasi pengelolaan limbah padat dan cair, penerapan energi bersih, serta penguatan sistem pangan.

Pembangunan Wilayah, pada tahap ini difokuskan pada peningkatan konektivitas wilayah untuk mendukung ekspansi global melalui peningkatan kualitas sarana prasarana berkelanjutan yang didukung dengan perluasan pemanfaatan teknologi otomasi dan digitalisasi. Pembiayaan Pembangunan, pada tahap ini difokuskan pada peningkatan, pemanfaatan, dan perluasan cakupan sektor yang menggunakan sumber dana non pemerintah.

Pada Tahap Keempat (2040-2045), Jawa Timur berhasil mewujudkan Jawa Timur Sejahtera 2045. Transformasi Sosial dititikberatkan pada upaya mewujudkan kesehatan untuk semua yang mencakup seluruh siklus hidup seluruh wilayah dengan pelayanan yang terjangkau dan berkualitas bagi setiap penduduk, pendidikan berkualitas yang merata yang inklusif, adaptif dan relevan dengan tuntutan global berbasis Pendidikan sepanjang hayat, serta penuntasan pengentasan kemiskinan melalui integrasi program perlindungan sosial adaptif secara penuh.

Transformasi Ekonomi, difokuskan pada upaya mengukuhkan Jawa Timur sebagai Provinsi Poros Maritim Nasional yang berpendapatan tinggi melalui penyempurnaan kualitas sumber daya manusia serta aplikasi riset dan inovasi yang berdaya saing global. Pemasaran dan promosi internasional untuk menjadi tujuan pariwisata kelas dunia dengan menerapkan *Sustainable Tourism*.

Transformasi Tata Kelola, difokuskan pada tata Kelola pemerintahan yang handal dan bersih (*Good and clean Governance*) menuju pelayanan publik yang effisien, transparan dan responsif sesuai kebutuhan masyarakat.

Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah, tahap ini difokuskan pada upaya mewujudkan Jawa Timur yang aman, nyaman, tertib, tenteram, demokratis dan terwujudnya stabilitas ekonomi makro daerah.

Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, difokuskan pada terwujudnya manusia, keluarga, dan masyarakat yang tangguh, berdaya, dan terjamin kualitas hidupnya, kelestarian fungsi lingkungan hidup, penerapan ekonomi hijau dan biru serta energi bersih di seluruh sektor pembangunan, sistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan, serta penurunan emisi GRK menuju *net zero emission*.

Pembangunan Wilayah, pada tahap ini difokuskan untuk terwujudnya pemerataan pembangunan antar wilayah yang berkualitas dan berkelanjutan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pelayanan dasar yang berkualitas. Pembiayaan Pembangunan, pada tahap ini sinergi pendanaan pemerintah dan non pemerintah semakin meningkat.

Tabel 5. 1 Arah Kebijakan

VISI	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN				SASARAN POKOK
			2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Jawa Timur Berakhlak, Maju, Mendunia, dan Berkelanjutan			**Penguatan Pondasi Transformasi Jawa Timur**	**Akselerasi Transformasi Jawa Timur**	**Jawa Timur Ekspansi Global**	**Jawa Timur Sejahtera**	
	1. Mewujudkan Transformasi Sosial dalam Menunjang SDM Berkualitas		Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial	Percepatan pembangunan SDM berkualitas dan inklusif	Penguatan daya saing SDM dan keberlanjutan kesejahteraan	Pendayagunaan SDM Jawa Timur yang unggul dan berkarakter	
		1. Layanan dan Jaminan Kesehatan bagi seluruh masyarakat	**<u>Fokus Pembangunan:</u>** Pemerataan pelayanan dan sarana prasarana kesehatan dan pendidikan sesuai kondisi wilayah, peningkatan kualitas pengajaran, produktivitas, daya saing, dan keahlian, serta pemenuhan sistem perlindungan sosial yang terintegrasi dan berbasis satu data	**<u>Fokus Pembangunan:</u>** Peningkatan upaya kesehatan masyarakat, penguatan sistem kesehatan, peningkatan akses dan kualitas pendidikan wajib belajar 13 (tiga belas) tahun serta distribusi tenaga pendidik, dan membangun sistem perlindungan sosial adaptif melalui integrasi program perlindungan sosial	**<u>Fokus Pembangunan:</u>** Perluasan cakupan jaminan kesehatan yang berkelanjutan, kualitas pelayanan kesehatan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, peningkatan mutu pendidikan melalui angka partisipasi sekolah, kemampuan literasi dan numerasi, kualitas lulusan sekolah menengah kejuruan, iklim keamanan kebhinekaan dan inklusivitas, dan perluasan penerapan perlindungan sosial adaptif sebagai upaya	**<u>Fokus Pembangunan:</u>** Upaya mewujudkan kesehatan untuk semua yang mencakup seluruh siklus hidup seluruh wilayah dengan pelayanan yang terjangkau dan berkualitas bagi setiap penduduk, pendidikan berkualitas yang merata yang inklusif, adaptif dan relevan dengan tuntutan global berbasis Pendidikan sepanjang hayat, serta penuntasan pengentasan kemiskinan melalui integrasi program	1. Terwujudnya Layanan & Jaminan Kesehatan bagi seluruh Masyarakat
		2. Pendidikan berkualitas dan merata					2. Terwujudnya Pendidikan berkualitas & merata
		3. Perlindungan Sosial yang adaptif					3. Terwujudnya Perlindungan Sosial yang adaptif

VISI	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN				SASARAN POKOK
			2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
					pengentasan kemiskinan pada wilayah kantong kemiskinan	perlindungan sosial adaptif secara penuh	
	2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan		Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja	Peningkatan produktivitas secara masif dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi	*Economic power house* yang terintegrasi dengan jaringan rantai global dan domestik, serta ekspor yang kokoh	Provinsi dengan pendapatan Tinggi	
		4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	**Fokus Pembangunan:** Hilirisasi sumber daya alam unggulan termasuk sektor Agro, peningkatan produktivitas tenaga kerja, penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru, penguatan sektor ekonomi yang berbasis riset dan inovasi, pemerataan akses digital, pengembangan sarana prasarana pariwisata, serta pembangunan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan.	**Fokus Pembangunan:** Percepatan hilirisasi sumber daya alam dan peningkatan produktivitas secara masif. Perluasan pusat-pusat pertumbuhan serta optimalisasi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru. Penerapan praktek pengelolaan lingkungan dan pelestarian budaya lokal dalam rangka	**Fokus Pembangunan:** Transformasi menuju Economic Power House yang berkelanjutan melalui peningkatan daya saing dalam taraf internasional dengan menekankan pada perluasan dan penguatan peran Jawa Timur dalam Global Value Chain. Menjadikan Jawa Timur sebagai Hub Maritim Indonesia melalui penguasaan teknologi menengah dan tinggi serta melakukan diversifikasi dan	**Fokus Pembangunan:** Upaya mengukuhkan Jawa Timur sebagai Provinsi Poros Maritim Nasional yang berpendapatan tinggi melalui penyempurnaan kualitas sumber daya manusia serta aplikasi riset dan inovasi yang berdaya saing global. Pemasaran dan promosi internasional untuk menjadi tujuan pariwisata kelas dunia dengan menerapkan Sustainable Tourism	4. Terwujudnya Kemajuan Iptek, Inovasi, & Produktivitas Ekonomi
		5. Penerapan Ekonomi Hijau					5. Terwujudnya Penerapan Ekonomi Hijau
		6. Transformasi Digital					6. Terwujudnya Transformasi Digital
		7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global					7. Terwujudnya Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
		8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat					8. Terwujudnya Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat

VISI	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN				SASARAN POKOK
			2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
		Pertumbuhan Ekonomi		pariwisata yang berkelanjutan.	pengembangan produk pariwisata.		Pertumbuhan Ekonomi
	3. Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Pelayanan Publik Inovatif		Tata kelola pemerintahan yang tepat fungsi dan penyederhaaan regulasi	Kelembagaan adaptif dengan ditunjang SDM aparatur berkompeten dan berintegritas	Kelembagaan kolaboratif dalam pemenuhan pelayanan publik	Tata kelola pemerintahan yang handal dan bersih (*Good and Clean Governance*) dan pelayanan publik inovatif	
		9. Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	**Fokus Pembangunan:** Penataan kelembagaan yang tepat fungsi, manajemen ASN sesuai kompetensinya dan penyederhanaan regulasi yang berpotensi menghambat investasi dan pelayanan publik	**Fokus Pembangunan:** Kelembagaan yang adaptif dalam meningkatkan aksesibilitas dan teknologi pelayanan publik ditunjang dengan SDM aparatur berkompeten dan berintegritas.	**Fokus Pembangunan:** Tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dalam pemenuhan pelayanan publik prima dan peningkatan kapasitas SDM Aparatur.	**Fokus Pembangunan:** Tata Kelola pemerintahan yang handal dan bersih (Good and clean Governance) menuju pelayanan publik yang effisien, transparan dan responsif sesuai kebutuhan masyarakat	9. Terwujudnya Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

VISI	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN				SASARAN POKOK
			2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
	4. Mewujudkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah		Memperkuat ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, kelembagaan Demokrasi dan penataan kebijakan pendukung stabilitas ekonomi daerah.	Memantapkan keterlibatan masyarakat dalam ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, proses demokrasi dan peningkatan cakupan layanan pendukung stabilitas ekonomi daerah.	Penguatan partisipasi masyarakat dalam penanganan gangguan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam mendukung kebebasan sipil dan kesetaraan serta penguatan sinergi *multi stakeholder* pendukung stabilitas ekonomi daerah	Jawa Timur yang aman, nyaman dan berkeadilan sebagai perwujudan Indonesia yang berdaulat, aman, damai, dan terciptanya stabilitas ekonomi makro	
		10. Stabilitas, Demokrasi dan Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Daerah	**Fokus Pembangunan:** penguatan peran dan fungsi pemerintah daerah dalam meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	**Fokus Pembangunan:** upaya peningkatan keterlibatan masyarakat dalam upaya preventif penanganan gangguan trantibumlinmas, peningkatan peran masyarakat, partai	**Fokus Pembangunan:** Penguatan partisipasi masyarakat dalam pelaporan dan penanganan gangguan trantibumlinmas melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi terintegrasi.	**Fokus Pembangunan:** Upaya mewujudkan Jawa Timur yang aman, nyaman, tertib, tenteram, demokratis dan terwujudnya stabilitas ekonomi makro daerah.	10. Terwujudnya Stabilitas, Demokrasi dan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Daerah

VISI	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN				SASARAN POKOK
			2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
		11. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	(Trantibumlinmas) untuk menciptakan kondisi aman dan kondusif pada masyarakat Jawa Timur. Peningkatan peran dan fungsi dilakukan melalui pemberdayaan dan penguatan kelembagaan demokrasi dan infrastruktur politik melalui kerjasama antar stakeholder dan penataan kebijakan pendukung stabilitas ekonomi daerah.	politik dan lembaga pendidikan dalam proses demokrasi melalui pendidikan politik, ideologi dan wawasan kebangsaan, pemahaman dan pengembangan budaya serta etika politik dan peningkatan cakupan layanan pendukung stabilitas ekonomi daerah.	Kebebasan sipil dan kesetaraan yang terjamin bagi masyarakat Jawa Timur dengan partai politik yang modern dan berintegritas. Penguatan sinergi multi stakeholder pendukung stabilitas ekonomi daerah.		11. Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
		12. Daya saing Investasi					12. Terwujudnya Daya Saing Investasi
	5. Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi		Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan	Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai pendorong pembangunan sosial ekonomi yang setara dan inklusif	Mewujudkan ketangguhan masyarakat dan lingkungan dalam menghadapi dinamika pembangunan global	Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berkelanjutan	
		13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	**Fokus Pembangunan:** Optimalisasi nilai agama, budaya dan peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia serta	**Fokus Pembangunan:** Pemantapan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai pendorong pembangunan sosial	**Fokus Pembangunan:** Perwujudan manusia, keluarga, dan masyarakat yang tangguh dan adaptif terhadap perubahan dan	**Fokus Pembangunan:** Upaya terwujudnya manusia, keluarga, dan masyarakat yang tangguh, berdaya, dan terjamin kualitas	13. Terwujudnya masyarakat Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

VISI	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN				SASARAN POKOK
			2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
		14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif	menggerakkan modal sosial dalam masyarakat, peningkatan ketangguhan manusia dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan instrumen pengelolaan, serta perlindungan lingkungan hidup dan penguatan keterjangkauan pangan.	ekonomi yang setara dan inklusif untuk mencegah konflik sosial. Implementasi teknologi dan informasi untuk mendukung terwujudnya ketahanan ekologi yang meliputi pangan, air, dan energi, menciptakan masyarakat yang tangguh dan adaptif terhadap perubahan iklim dan bencana.	bencana, mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan secara inklusif, pengembangan ekonomi hijau dan biru, penerapan dan pengembangan teknologi ramah lingkungan untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi sumber daya alam, pengurangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, optimalisasi pengelolaan limbah padat dan cair, penerapan energi bersih, serta penguatan sistem pangan.	hidupnya, kelestarian fungsi lingkungan hidup, penerapan ekonomi hijau dan biru serta energi bersih di seluruh sektor pembangunan, sistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan, serta penurunan emisi GRK menuju net zero emission.	14. Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif
		15. Lingkungan Hidup Berkualitas					15. Terwujudnya Lingkungan Hidup Berkualitas
		16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan					16. Terwujudnya Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan
		17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim					17. Terwujudnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
	6. Memantapkan Pembangunan Kewilayahan yang Mendorong Titik Pertumbuhan		Peningkatan Pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi melalui pemenuhan dan pemanfaatan sarana prasarana yang berwawasan lingkungan untuk mewujudkan	Percepatan pembangunan untuk pertumbuhan ekonomi baru	Peningkatan konektivitas wilayah untuk mendukung ekspansi global.	Mewujudkan infrastruktur yang terintegrasi berkualitas dan berkelanjutan.	

VISI	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN				SASARAN POKOK
			2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
	Ekonomi Baru dan Memperkuat Pemerataan Pembangunan		kesinambungan pembangunan.				
	7. Mewujudkan Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan						
	8. Mewujudkan Kesinambun-gan Pem-bangunan		**Fokus Pembangunan:** Perwujudan pusat-pusat pertumbuhan wilayah melalui penyediaan dan optimalisasi sarana prasarana yang me-madai dan berwawasan lingkungan untuk mewujudkan kesinam-bungan pembangunan	**Fokus Pembangunan:** Percepatan perwujudan koridor pengembangan wilayah untuk pemer-ataan pembangunan dan mengurangi dis-paritas wilayah melalui peningkatan konektivi-tas serta pemerataan sarana prasarana pub-lik yang berkelanjutan.	**Fokus Pembangunan:** peningkatan konektivitas wilayah untuk mendukung ekspansi global melalui peningkatan kualitas sarana prasarana berkelanjutan yang didukung dengan perluasan pemanfaatan teknologi otomasi dan digitalisasi.	**Fokus Pembangunan:** Upaya terwujudnya pemerataan pembangunan antar wilayah yang berkualitas dan berkelanjutan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pelayanan dasar yang berkualitas	

5.2. Sasaran Pokok

Sasaran Pokok merupakan kinerja daerah untuk mencapai visi daerah yang dilakukan melalui langkah-langkah transformasi di daerah dalam kerangka pencapaian visi Indonesia Emas sesuai RPJPN Tahun 2025-2045. Rumusan sasaran pokok dilengkapi dengan indikator-indikator dan disertai dengan target-target yang harus dicapai sesuai dengan pentahapan arah kebijakan secara berkesinambungan.

Sasaran Pokok dirumuskan dari hasil penyelarasan Arah Pembangunan dan Arah kebijakan Transformasi Daerah yang telah diselaraskan dengan RPJPN Tahun 2025-2045 serta disesuaikan dengan karakteristik daerah.

5.2.1. Arah Pembangunan Daerah

Arah Pembangunan Daerah merupakan strategi daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional jangka panjang yang sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah. Arah Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 diterjemahkan pada tabel 5.2 berikut:

Tabel 5. 2 Arah Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045

Transformasi	Arah Pembangunan	
Sosial	1	Layanan dan Jaminan Kesehatan bagi seluruh masyarakat
	2	Pendidikan berkualitas dan merata
	3	Perlindungan Sosial yang adaptif
Ekonomi	4	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi
	5	Penerapan Ekonomi Hijau
	6	Transformasi Digital
	7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
	8	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
Tata kelola	9	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif
Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi, Substansi dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	10	Stabilitas, Demokrasi dan Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Daerah
	11	Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
	12	Daya saing Investasi
Ketahanan Sosial Budaya Dan Ekologi	13	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
	14	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif
	15	Lingkungan Hidup Berkualitas
	16	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan
	17	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Keterkaitan antara visi, misi, sasaran pokok, dan arah kebijakan dalam RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 dapat dilihat pada tabel penyandingan sebagaimana berikut :

Tabel 4. 4 Penyandingan Visi, Sasaran Visi, Misi, Sasaran Pokok, dan Arah Pembangunan

Visi	Sasaran Visi	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan
Jawa Timur Berakhlak, Maju, Mendunia, dan Berkelanjutan	<u>Sasaran Visi 4 :</u> Produktivitas & Daya Saing SDM Meningkat <u>Sasaran Visi 2 :</u> Pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan	<u>Misi 1 :</u> Mewujudkan Transformasi Sosial dalam Menunjang SDM Berkualitas	1. Terwujudnya Layanan & Jaminan Kesehatan bagi seluruh Masyarakat	Layanan & Jaminan Kesehatan bagi seluruh masyarakat
			2. Terwujudnya Pendidikan berkualitas & merata	Pendidikan berkualitas dan merata
			3. Terwujudnya Perlindungan Sosial yang adaptif	Perlindungan Sosial yang Adaptif
	<u>Sasaran Visi 1 :</u> Peningkatan Pendapatan per Kapita	<u>Misi 2 :</u> Mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan	4. Terwujudnya Kemajuan Iptek, Inovasi, & Produktivitas Ekonomi	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi
			5. Terwujudnya Penerapan Ekonomi Hijau	Penerapan Ekonomi Hijau
			6. Terwujudnya Transformasi Digital	Transformasi Digital
			7. Terwujudnya Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
			8. Terwujudnya Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
	<u>Sasaran Visi 3 :</u> Kepemimpinan dan Pengaruh Jawa Timur di kancah nasional meningkat	<u>Misi 3 :</u> Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Pelayanan Publik Inovatif	9. Terwujudnya Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Visi	Sasaran Visi	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan
		Misi 4 : Mewujudkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	10. Terwujudnya Stabilitas, Demokrasi dan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Daerah	Stabilitas, Demokrasi dan Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Daerah
			11. Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
			12. Terwujudnya Daya Saing Investasi	Daya saing Investasi
	Sasaran Visi 5 : Penurunan emisi GRK menuju net zero emission	Misi 5 : Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	13. Terwujudnya masyarakat Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
			14. Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif
			15. Terwujudnya Lingkungan Hidup Berkualitas	Lingkungan Hidup Berkualitas
			16. Terwujudnya Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan
			17. Terwujudnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

5.2.2. Arah Kebijakan Transformasi

Arah kebijakan menggambarkan upaya transformasi penurunan dari RPJPN 2025-2045 untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional serta menggambarkan upaya transformasi yang spesifik dengan kebutuhan/karakteristik daerah dan mendukung tercapainya visi daerah.

5.2.2.1. Arah Kebijakan Transformasi Sosial

Arah Kebijakan Transformasi Sosial Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 berdasarkan Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5. 3 Arah Kebijakan Transformasi Sosial
Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045

Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	
Transformasi Sosial	1	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.
	2	Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal.
	3	Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan
	4	Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.
	5	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan
	6	Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan
	7	Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan
	8	Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga kesehatan, terutama untuk tenaga kesehatan yang bertugas di Daerah Afirmasi 3TP diantaranya Pegunungan Sewu dan Madura, serta Daerah Afirmasi lainnya.
	9	Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi 3TP diantaranya Pegunungan Sewu dan Madura, serta Daerah Afirmasi lainnya.
	10	Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting
	11	Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan
	12	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).
	13	Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah
	14	Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.
	15	Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.
	16	Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan
	17	Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, literasi digital, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah)

Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	
	18	Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
	19	Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.
	20	Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan
	21	Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan
	22	Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan
	23	Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan, terutama untuk guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di Daerah Afirmasi 3TP diantaranya Pegunungan Sewu dan Madura, serta Daerah Afirmasi lainnya.
	24	Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi 3TP diantaranya Pegunungan Sewu dan Madura, serta Daerah Afirmasi lainnya.
	25	Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM *(Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics)*
	26	Beasiswa pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics*) dan keagamaan serta vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global.
	27	Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK, terutama pada Daerah Afirmasi 3TP diantaranya Pegunungan Sewu dan Madura, serta Daerah Afirmasi lainnya.
	28	Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama, terutama pada Daerah Afirmasi 3TP diantaranya Pegunungan Sewu dan Madura, serta Daerah Afirmasi lainnya.
	29	Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan terutama pada Daerah Afirmasi 3TP diantaranya Pegunungan Sewu dan Madura, serta Daerah Afirmasi lainnya.
	30	Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi *(unique & high-value economy),* serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi di Daerah Afirmasi 3TP diantaranya Pegunungan Sewu dan Madura, serta Daerah Afirmasi lainnya, guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat
	31	Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui *upskilling* maupun *reskilling*
	32	Pengembangan/peningkatan *government-induced activities* dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke Daerah Afirmasi 3TP diantaranya Pegunungan Sewu dan Madura, serta Daerah Afirmasi lainnya, yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi melalui bertambahnya *demand.*
	33	Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP diantaranya Pegunungan Sewu dan Madura, serta Daerah Afirmasi lainnya, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien
	34	Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi,

Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	
		bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP diantaranya Pegunungan Sewu dan Madura, serta Daerah Afirmasi lainnya.
	35	Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP diantaranya Pegunungan Sewu dan Madura, serta Daerah Afirmasi lainnya.
	36	Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP diantaranya Pegunungan Sewu dan Madura, serta Daerah Afirmasi lainnya
	37	Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga.

5.2.2.2. Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi

Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah(RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 berdasarkan Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5. 4 Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi
Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045

Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	
Transformasi Ekonomi	1	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan melalui penguatan fungsi pasar induk dan penguatan *water prosperity* melalui pengembangan kawasan strategis pertanian di wilayah Bengawan Solo, Brantas, dan Tapal Kuda (konsep Agrominapolitan sebagai dasar).
	2	Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi *(smart farming,* teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya).
	3	Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global
	4	Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis
	5	Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital *marketplace/ platform.*
	6	Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian
	7	Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.
	8	Pengembangan hilir agro antara lain dengan *closed loop model* pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan *market,* bank, dan asuransi pertanian

Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	
	9	Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah
	10	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak.
	11	Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui *digital marketplace/platform*.
	12	Perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak
	13	Pengembangan *closed loop* model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan *market*, bank, dan asuransi perikanan
	14	Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan
	15	Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif.
	16	Modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan.
	17	Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya
	18	Peningkatan nilai tambah komoditas pertanian kelautan, dan perikanan melalui upaya hilirisasi
	19	Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah yang dikembangkan pada kawasan strategis industri Madiun-Surabaya-Gresik-Pasuruan dan kawasan strategis industri lainnya (klaster industri petrokimia, industri logam dasar, industri pengolahan tembakau, industri bahan konstruksi, industri makanan dan minuman, industri *consumer goods & general manufactures*, industri kayu dan barang dari kayu, industri alat angkutan laut (galangan kapal), industri alat angkutan dan kendaraan (kereta api) serta pengembangan kawasan industri, Kawasan Ekonomi Khusus dan Sentra Industri
	20	Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkeretaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/stockyard yang modern terintegrasi) serta pemanfaatan energi dan sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan
	21	Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/low-carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri;
	22	Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.

Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	
	23	Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, bertaraf global (global city), dan berketahanan, terutama pada metropolitan Surabaya dan metropolitan Malang (megapolitan Surabaya-Malang), serta kawasan perkotaan Madiun, Kediri, dan Jember
	24	Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, serta layanan transportasi publik)
	25	Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan
	26	Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (*green & grey infrastructure*) pada kawasan perkotaan
	27	Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan.
	28	Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection dan/atau pembangunan infrastruktur mobile connection pada area-area weak coverage di kawasan perkotaan
	29	Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Surabaya dan metropolitan Malang yang akan direncanakan menjadi kawasan Megapolitan Surabaya-Malang
	30	Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan mengupayakan penggunaan sistem jalan berbayar elektronik di metropolitan.
	31	*City beautification* dalam rangka membangun citra, karakter, dan *dignity* kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan
	32	Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages) pada kawasan megapolitan/metropolitan (urban tourism) dan kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif Malang-Lumajang
	33	Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif
	34	Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha
	35	Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif
	36	Pengembangan multi-infrastructure backbone & maritime backbone, yang menginterkoneksikan antar kawasan strategis, termasuk pengembangan menginterkoneksikan antar kawasan strategis dan pengembangan sistem expressway dan/atau sistem perkeretaapian lintas Jawa
	37	Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa
	38	Pembangunan Jalan Tol pada wilayah Jawa Timur untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas: - Bojonegoro – Babat)*;

Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	
		- Jember – Banyuwangi)*; - Juanda – Gempol)*; - Kertosono – Kediri dan Kediri – Tulungagung)*; - Kertosono – Babat)*; - Krian – Pucukan)*; - Malang-Kepanjen)*; - Mojokerto – Gempol)*; - Mojokerto – Lamongan)*; - Ngawi – Bojonegoro)*; - Pasuruan – Sukorejo)*; - Probolinggo – Banyuwangi)*; - Probolinggo – Lumajang dan Lumajang – Jember)*; - Rembang – Tuban)*; - Situbondo – Jember)*; - Sukorejo – Batu – Kediri)*; - Suramadu – Tanjung Bulupandan)*; - Tuban - Babat – Lamongan – Gresik)*; dan - Yogyakarta – Pacitan – Trenggalek – Lumajang)* (termasuk di dalamnya ruas Tulungagung – Blitar dan Tulungagung – Trenggalek). * nomenklatur ruas sesuai Kepmen PUPR Nomor 367 Tahun 2023 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional Tahun 2020 – 2040 dan Revisi RTRW Provinsi Jawa Timur
	39	Pembangunan jalan tol intraregional atau jalan arteri lingkar kawasan perkotaan, terutama pada jalan tol intraregional metropolitan Surabaya dan metropolitan Malang
	40	Percepatan pembangunan jalan Lintas Pantai Selatan (PANSELA) dan pemenuhan daya dukung pengembangan ekonomi disekitarnya.
	41	Peningkatan prasarana perkeretaapian (termasuk pembangunan lintas atas/bawah pada perlintasan sebidang yang cukup padat), antara lain pada ruas Kertosono-Kediri-Blitar-Malang (pembangunan jalur ganda), Wonokromo-Bangil-Malang (pembangunan jalur ganda); Wonokromo-Mojokerto (pembangunan jalur ganda); Bangil-Pasuruan (pembangunan jalur ganda); Pasuruan-Probolinggo-Jember-Banyuwangi (pembangunan jalur ganda).
	42	Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kereta api logistik, utamanya peningkatan *dry port* KA untuk melayani Pelabuhan Tanjung Perak.
	43	Elektrifikasi jalur KA dan peningkatan sarana/prasarana perkeretaapian, terutama untuk layanan perkeretaapian KA komuter di kawasan metropolitan Surabaya dan metropolitan Malang
	44	Pengembangan kereta api cepat (HST/High Speed Train) Jakarta-Bandung-Cirebon-Semarang-Surakarta-Surabaya.
	45	Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhan-an pada pelabuhan utama, terutama di Pelabuhan Tanjung Perak dan kepulauan lainnya
	46	Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan pengumpul/pengumpan di Daerah Afirmasi 3TP, terutama di pelabuhan Kalianget (Sumenep) dan kepulauan lainnya
	47	Peningkatan sarana & prasarana dan kualitas pelayanan bandar udara internasional yang dapat melayani aksesibilitas/konektivitas cepat ke/dari kawasan metropolitan, kawasan strategis industri, kawasan

Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	
		strategis pariwisata & ekonomi kreatif dan/atau Daerah Afirmasi 3TP, terutama pada Bandar Udara Juanda.
	48	Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi migas di Jawa, terutama yang menghubungkan Cepu-Madiun-Kediri-Surabaya
	49	Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global
	50	Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya
	51	Penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon
	52	Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.
	53	Peningkatan keterkaitan Koperasi dan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.
	54	Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional maupun kerja sama internasional lainnya serta peningkatan daya saing investasi
	55	Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis
	56	Peningkatan produktivitas BUMD
	57	Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan *broadband* hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital
	58	Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah
	59	Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion pada Daerah Afirmasi 3TP diantaranya Pegunungan Sewu dan Madura, serta Daerah Afirmasi lainnya
	60	Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah
	61	Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami *urban decay* dalam suatu kawasan perkotaan
	62	Penguatan budaya dan ekonomi masyarakat Jawa Timur melalui pengembangan Industri Pariwisata bertaraf Internasional.
	63	Pengembangan ekonomi syariah antara lain pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis pesantren, industri halal, pariwisata halal dan lain-lain.

Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	
	64	Peningkatan daya saing dan produktifitas ekonomi pedesaan melalui pengembangan ekonomi lokal, digitalisasi dan pemberdayaan lembaga ekonomi lokal (BUMDes)

5.2.2.3. Arah Kebijakan Transformasi Tatakelola

Arah Kebijakan Transformasi Tatakelola Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 memperhatikan Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5. 5 Arah Kebijakan Transformasi Tatakelola
Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045

Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	
Transformasi Tata Kelola	1	Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan
	2	Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat
	3	Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah
	4	Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah Jawa Timur, menuju penyelenggaraan pemerintah daerah Jawa Timur yang profesional dan bebas korupsi
	5	Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital
	6	Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja
	7	Produk Hukum yang berkualitas dan berintegritas
	8	Penyederhanaan regulasi yang berpotensi menghambat investasi dan pelayanan publik

5.2.2.4. Arah Kebijakan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

Arah Kebijakan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 memperhatikan Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5. 6 Arah Kebijakan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045

Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	
Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah	1	Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan mengoptimalkan penegakan perda
	2	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBUD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb.), peningkatan

Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	
		kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional
	3	Peningkatan keamanan dan penegakan hukum wilayah perbatasan, terutama pada perbatasan laut
	4	Penguatan pengendalian inflasi daerah
	5	Dukungan terhadap pengembangan pusat pendidikan & pelatihan militer/pangkalan komposit/pangkalan/pos militer/sarana & prasarana pertahanan lainnya di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Madura).
	6	Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat
	7	Penguatan integritas partai politik
	8	Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaporan, dan pengolahan data terkait penanganan gangguan Trantibumlinmas

5.2.2.5. Arah Kebijakan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Arah Kebijakan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 memperhatikan Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5. 7 Arah Kebijakan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045

Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	1	Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila.
	2	Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan
	3	Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis
	4	Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami
	5	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.
	6	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal
	7	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang
	8	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan
	9	Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan
	10	Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air

Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	
	11	Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan *circular economy*
	12	Pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas *(smart grid)* guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan
	13	Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi
	14	Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan
	15	Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat
	16	Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi
	17	Penguatan sertifikasi kebudayaan

5.2.2.6. Arah Kebijakan Implementasi transformasi

Arah Kebijakan Implementasi transformasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 memperhatikan Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5. 8 Arah Kebijakan Implementasi Transformasi
Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045

Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	
Implementasi Transformasi	1	Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah dan antar wilayah perbatasan Provinsi
	2	Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb.).
	3	Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir
	4	Percepatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C *(Land Acquisition and Resetlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated)* yang disusun secara kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari

Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	
		masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas
	5	Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke *green/low-cost financing*, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan
	6	Percepatan pelaksanaan reforma agraria
	7	Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri.
	8	Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim
	9	Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU, blended finance, dan *creative finance*.
	10	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.
	11	Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi.
	12	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.
	13	Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan
	14	Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko
	15	Pemaduserasian antara koridor pertumbuhan wilayah ruang darat, ruang laut, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, sebagai bentuk nilai tambah sinergitas, disertai Kawasan pertahanan keamanan melalui pengaturan kelembagaan, pengendalian terhadap pemanfaatan ruang dan memperhatikan kerawanan terhadap bencana serta adaptasi perubahan iklim

5.2.3. Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan Daerah

Berdasarkan atas Arah Pembangunan hasil penyelarasan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045, Arah Kebijakan Transformasi Daerah serta Indikator Utama Pembangunan (IUP) maka dirumuskanlah sasaran pokok beserta indikatornya sebagai tolak ukur pencapaiannya. Dalam hal ini Indikator Utama Pembangunan Daerah merupakan alat ukur untuk melihat pencapaian dari tujuan pembangunan daerah serta kontribusi terhadap tujuan pembangunan nasional jangka panjang.

Sasaran pokok RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 adalah:

1. Terwujudnya Layanan dan Jaminan Kesehatan Bagi Seluruh Masyarakat
   Pembangunan kesehatan bertujuan agar setiap penduduk dapat hidup sehat pada seluruh siklus hidup, di seluruh wilayah, dan bagi seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan serta mewujudkan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas terjamin bagi setiap penduduk. Sasaran pokok ini dilaksanakan melalui Transformasi layanan primer, Transformasi layanan rujukan, Transformasi sistem ketahanan kesehatan, Transformasi sistem pembiayaan kesehatan, Transformasi sumber daya manusia (SDM) kesehatan dan Transformasi teknologi kesehatan.
2. Terwujudnya Pendidikan Berkualitas dan Merata
   Kebijakan pendidikan diarahkan pada pendidikan yang inklusif dan adaptif serta peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan dengan tuntutan global berbasis prinsip pendidikan sepanjang hayat (*life long learning*). Sasaran pokok ini dilaksanakan Melalui peningkatan tata kelola pendidikan, peningkatan kualitas dan pembelajaran, penjaminan mutu pendidikan, afirmasi akses berbagai jenjang, percepatan wajib belajar 13 (tiga belas) tahun, peningkatan pengelolaan dan penempatan pendidikan serta Tenaga Kependidikan. Pembangunan pendidikan berperan sentral dalam peningkatan kualitas hidup manusia serta mewujudkan kehidupan masyarakat dan bangsa yang bermartabat, unggul dan berdaya saing.
3. Terwujudnya Perlindungan Sosial yang Adaptif
   Perlindungan sosial yang adaptif merupakan skema perlindungan sosial yang komprehensif untuk mencegah dan mengurangi kemiskinan dan kerentanan dengan membangun ketahanan individu, rumah tangga, dan komunitas akibat bencana dan perubahan iklim. Perlindungan Sosial yang adaptif akan membantu individu, rumah tangga, dan masyarakat dengan memadukan konsep dan instrument utama perlindungan sosial, manajeman risiko bencana, dan adaptasi perubahan iklim. Tujuannya untuk percepatan penuntasan kemiskinan dan memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk sesuai kerentanan yang dijalankan dengan prinsip berkeadilan dan inklusif.
   Perlindungan Sosial Adaptif dilaksanakan melalui: (i) pengurangan kemiskinan melalui intervensi dalam bentuk bantuan sosial, pemberdayaan Masyarakat dan pemberdayaan Koperasi dan UKM, serta program lainnya dengan dukungan data kemiskinan *by name by address* (BNBA) yang valid dan mutakhir untuk mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan dan mengurangi wilayah-wilayah kantong kemiskinan; (ii) perlindungan sosial adaptif terintegrasi untuk memperkuat sistem perencanaan dan penganggaran berbasis bukti, serta penentuan target perlindungan sosial dalam mewujudkan integrasi program perlindungan sosial dan pembangunan SDM secara menyeluruh; (iii) mendukung penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang efektif dan mencapai cakupan *universal*; (iv) pengembangan bantuan sosial yang lebih adaptif terhadap bencana dan perubahan iklim; (v) integrasi penentuan target manfaat, dan pelaksanaan bantuan sosial, jaminan sosial, serta pemberdayaan Masyarakat; (vi) peningkatan lingkungan yang inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya; (vii) peningkatan keterampilan bekerja melalui pelatihan berbasis kompetensi dan berwirausaha; (viii) peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok

rentan lainnya sebagai angkatan kerja, antara lain pelayanan ketenagakerjaan yang merata dan inklusif, pemanfaatan teknologi digital, dan peningkatan keterampilan; (ix) inovasi pembiayaan untuk memperkuat dan memperluas cakupan integrasi perlindungan sosial yang berkesinambungan; (x) Peningkatan kolaborasi multipihak bersama swasta, lembaga zakat, filantropi, lembaga sosial dan *stakeholder* lainnya dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan perlindungan sosial.

4. Terwujudnya Kemajuan Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi
   Iptek dan inovasi menjadi pendorong dan mempercepat keberlanjutan produktivitas sektor-sektor ekonomi serta memperkuat struktur ekonomi antara lain melalui (i) optimalisasi komoditas unggulan daerah berbasis pertanian; (ii) penyiapan sumber daya manusia profesional di bidang Iptek; (iii) penguatan jejaring dengan berbagai *stakeholder*; (iv) pengembangan ekosistem dan infrastruktur pendukung Iptek dan Inovasi.
5. Terwujudnya Penerapan Ekonomi Hijau
   Penerapan ekonomi hijau dalam transformasi ekonomi ditujukan agar akselerasi aktivitas ekonomi sejalan dengan meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Penerapan ekonomi hijau diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan melalui : (i) peningkatan peluang kerja khususnya yang termasuk dalam *green jobs*, (ii) investasi hijau (*green investment*); (iii) pengembangan produk-produk ramah lingkungan (*circular economy*); (iv) penerapan energi bersih (*green energy*); serta (v) penerapan pertanian dan perikanan berkelanjutan.
6. Terwujudnya Transformasi Digital
   Transformasi digital adalah salah satu upaya untuk mendukung mewujudkan transformasi ekonomi melalui pengembangan *super platform*, produksi talenta digital dan percepatan transformasi digital diantaranya konektivitas giga (kapasitas *bandwith* besar) untuk mendukung penerapan teknologi digital masa depan, peningkatan inovasi digital, pengembangan SDM digital yang terampil dengan masyarakat digital yang berbudaya, hingga regulasi dan kebijakan yang mampu menciptakan ekosistem yang merata.
   Transformasi digital tersebut mengacu pada enam pemenuhan kewajiban menuju transformasi digital yang adaptif, inklusif, memberdayakan, berdaulat, dan berkelanjutan yaitu terkait: (i) regulasi dan institusi; (ii) pembangunan sumber daya manusia yang di dalamnya termasuk pendidikan dan pelatihan; (iii) infrastruktur digital dan teknologi, (iv) keterpaduan data (*data enablement*); (v) modal investasi teknologi (*jfinancing technologies*); serta (vi) riset dan inovasi.
7. Terwujudnya Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
   Integrasi ekonomi domestik dan global akan mendorong peningkatan perekonomian Jawa Timur yang terintegrasi dan mendukung partisipasi dalam rantai pasok global melalui peningkatan nilai tambah komoditas yang berdaya saing global dan peningkatan sarana prasarana serta konektivitas ekonomi domestik dan global.
8. Terwujudnya Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
   Pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi menuju kota dan desa yang maju, inklusif, dan berkelanjutan merupakan salah satu upaya untuk mencapai pemerataan kesejahteraan di desa dan kota.

Pengembangan wilayah metropolitan seperti Kota Surabaya, Kota Malang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik dan wilayah metropolitan lainnya sebagai pusat jasa dan perdagangan yang maju sehingga dapat menjadi hub ekonomi nasional dan global, serta memicu perkembangan pembangunan perdesaan.

Upaya yang dilakukan untuk memicu terwujudnya pengembangan pembangunan perdesaan antara lain : (i) penumbuhan wirausaha baru di perdesaan; (ii) hilirisasi produk-produk unggulan di wilayah perdesaan; (iii) pemberdayaan ekonomi lokal; (iv) penguatan akses pasar ; (v) intensifikasi dan diversifikasi ekonomi lokal; (vi) pengembangan infrastruktur; (vii) pengembangan sektor jasa.

Wilayah Perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi perlu didukung dengan penyediaan infrastruktur yang memadai. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut antara lain: (i) penyediaan akses terhadap hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan; (ii) penguatan konektivitas intra dan antar pusat pertumbuhan ekonomi; dan (iii) pengembangan sistem dan tata kelola tranportasi publik.

9. Terwujudnya Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

   Dalam mewujudkan regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif, arah kebijakan difokuskan pada: (i) Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan kolaboratif menuju penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang profesional dan demokrasi (ii) Percepatan digitalisasi pelayanan publik yang terintegrasi dan prima dan (iii) produk hukum yang berkualitas dan berintegritas.

10. Terwujudnya Stabilitas, Demokrasi dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Daerah

    Dalam rangka mewujudkan stabilitas, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas) serta demokrasi substansial di Jawa Timur, arah kebijakannya ke depan antara lain: (1) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaporan, dan pengolahan data terkait penanganan gangguan Trantibumlinmas oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat; (2) Penguatan peran dan fungsi pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan Trantibumlinmas; dan (3)Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat dan berkeadilan.

11. Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

    Stabilitas Ekonomi Makro Daerah diarahkan untuk mewujudkan kesinambungan fiskal, serta menjaga stabilitas moneter dan sektor keuangan dalam mendukung akselerasi aktivitas ekonomi melalui: (i) pertumbuhan ekonomi yang berkualitas; (ii) menjaga daya beli masyarakat dalam rangka pengendalian inflasi; serta (iii) peningkatan kapasitas fiskal daerah.

12. Terwujudnya Daya Saing Investasi

    Daya Saing Investasi diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan berkelanjutan, melalui: (i) iklim investasi yang kondusif; (ii) penyediaan infrastruktur pendukung ekonomi yang berkualitas; (iii) penyediaan sumber daya manusia yang unggul; serta (iv) pengembangan investasiyang berorientasi ekspor yang dapat mengembangkan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif serta meningkatkan partisipasi dalam rantai produksi global.

13. Terwujudnya Masyarakat Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

    Perwujudan masyarakat beragama maslahat dan berkebudayaan maju dapat tercapai melalui : (i) Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila; (ii) pembangunan kehidupan beragama yang inklusif, rukun, dan toleran yang berorientasi penguatan moderasi beragama; (iii) pengembangan dana sosial keagamaan dan filantropi, pemberdayaan umat beragama, dan peningkatan produktivitas; (iv) peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama secara merata, berkeadilan; dan (v) jaminan pemenuhan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.

14. Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif

    Peningkatan ketangguhan keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang terlindungi sesuai siklus kehidupan, pembagian peran yang setara, serta didukung lingkungan yang aman dan sehat. Keluarga sebagai unit terkecil pada struktur masyarakat berperan penting dalam mewujudkan individu Sumber Daya Manusia berkualitas sebagai motor penggerak pembangunan dengan arah kebijakan: (i) peningkatan ketahanan keluarga termasuk penguatan kesiapan membangun keluarga, peningkatan kapasitas dan keterampilan keluarga, dan penyediaan pusat layanan keluarga; (ii) pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan; (iii) pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam mengambil keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan; dan (iv) penyediaan lingkungan pendukung bagi individu sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya melalui penanaman nilai positif dan perubahan perilaku, penyediaan pelayanan publik serta sarana dan prasarana yang inklusif, pengembangan kebijakan ramah keluarga, penguatan riset dan kebijakan berbasis bukti, serta penyadaran masyarakat dalam memberikan pengakuan dan penghormatan hak anak, perempuan, penyandang disabilitas dan lansia.

    Penguatan pengarusutamaan gender (PUG) dan inklusi sosial untuk memastikan tidak ada satu orang pun yang tertinggal dalam pembangunan (*no one left behind*) dengan arah kebijakan: (i) penguatan tata kelola penyelenggaraan PUG dan inklusi sosial dalam proses pembangunan secara komprehensif; (ii) penguatan kebijakan afirmasi untuk mengakselerasi kesetaraan gender dan mengurangi kesenjangan kelompok rentan melalui peningkatan kepemimpinan perempuan, pemberdayaan perempuan, dan penjaminan akses layanan dasar yang inklusif; dan (iii) penguatan lingkungan strategis untuk pelaksanaan PUG dan inklusi sosial yang efektif dan berkelanjutan.

15. Terwujudnya Lingkungan Hidup Berkualitas

    Pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup serta produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan arah kebijakan: (i) perubahan perilaku masyarakat dan pelaku usaha menuju gaya hidup berkelanjutan; (i) peningkatan kualitas air dan udara melalui penerapan teknologi terkini dan terjangkau (iv) peningkatan pengelolaan limbah B3 berkelanjutan; (v) peningkatan pengelolaan ekosistem daratan, laut dan pesisir yang terintegrasi; (vi) pengelolaan hutan dan lahan

secara berkelanjutan; dan (vii) perumusan regulasi daerah sebagai instrumen pencegahan dan pengendalian kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup.

Selain itu, juga dibutuhkan implementasi pembangunan infrastruktur untuk mencegah dan meminimalkan kerusakan alam serta mengendalikan pencemaran lingkungan dengan arah kebijakan pengelolaan air limbah dan sampah melalui penerapan teknologi tepat guna, terpadu, dan terjangkau, serta pemenuhan akses air minum yang dikelola secara aman dengan memanfaatkan teknologi terkini terutama pada wilayah yang sulit air.

16. Terwujudnya Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

    Ketahanan energi diarahkan untuk mendukung keberlangsungan pasokan energi yang stabil, aman, dan berkelanjutan melalui diversifikasi dan konservasi energi untuk meningkatkan ketahanan pasokan energi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan serta pengembangan energi baru terbarukan.

    Arah kebijakan untuk mewujudkan ketahanan air adalah konservasi, dan pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air. Hal ini didukung oleh peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sumber daya air serta sistem informasi sumber daya air. Dari sisi pemanfaatan, pembangunan infrastruktur ketahanan air perlu didorong untuk mewujudkan akses air minum aman serta penyediaan air minum perpipaan bagi rumah tangga di wilayah perkotaan.

17. Terwujudnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

    Resiliensi terhadap bencana diperlukan untuk mengurangi kerugian langsung maupun tidak langsung akibat bencana. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan resiliensi terhadap bencana antara lain: (i) identifikasi karakteristik dan potensi kebencanaan; (ii) penerapan pertimbangan aspek pengurangan risiko bencana dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan daerah; (iii) penyediaan sistem peringatan dini multi ancaman bencana yang terpadu dan inklusif melalui penerapan teknologi yang andal dan terintegrasi; (iv) pembangunan kesiapsiagaan bencana dimulai dari tingkatan individu, keluarga, dan komunitas; peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan penanggulangan bencana; (v) pembangunan sarana dan prasarana yang memperhatikan kerawanan bencana dan perubahan iklim.

    Penerapan pembangunan yang rendah karbon untuk mewujudkan *Net Zero Emsission* dilaksanakan melalui arah kebijakan yang mencakup: (i) peningkatan rehabilitasi hutan, lahan serta mangrove, penghambatan laju deforestasi, serta pencegahan penurunan cadangan karbon, (ii) penerapan efisiensi energi secara luas dan peningkatan penggunaan EBT, (iii) pengembangan transportasi berkelanjutan dan elektrifikasi transportasi; (iv) pengelolaan limbah dan penerapan ekonomi sirkular; (v) pengembangan industri hijau; dan (vi) penerapan kebijakan yang mendorong perubahan perilaku masyarakat Indonesia secara luas untuk melaksanakan aktivitas kehidupan yang rendah karbon.

Tabel 5. 9 Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan		Indikator Utama Pembangunan		Target		Ket-erangan
						Baseline 2025	Target 2045	
1	Terwujudnya Layanan dan Jaminan Kesehatan Bagi Seluruh Masyarakat	1	Layanan dan Jaminan Kesehatan bagi seluruh masyarakat	1	Usia Harapan Hidup (UHH) (ta-hun)	75,2	80,35	
				2	Kesehatan ibu dan anak:			
					a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	112	15	
					b. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	15,6	4,4	
				3	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk):			
					a. Cakupan penemuan dan pen-gobatan kasus Tuberkulosis (*treatment coverage*) (%)	82	95	
					b. Angka keberhasilan pen-gobatan Tuberkulosis (*treatment success rate*) (%)	92,51	98,00	
				4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	95,38	99,50	
2		2		5	Hasil Pembelajaran:			

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan		Target		Ket-erangan
					Baseline 2025	Target 2045	
	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas dan Merata	Pendidikan Berkualitas yang Merata		a. Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:			
				- Literasi Membaca	47,37 - 68,42	86,84 - 92,11	
				- Numerasi	26,32 - 39,47	71,05 - 76,32	
				- Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:			
				- Literasi Membaca	53,38 - 55,38	81,27 - 83,27	
				- Numerasi	41,08 - 43,08	68,21 - 70,21	
				b. Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	8,85 - 8,85	11,20 - 11,23	
				c. Harapan Lama Sekolah	13,64 - 13,64	15,09 - 15,11	
			6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	9,64	9,64 - 11,65	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan		Indikator Utama Pembangunan		Target		Ket-erangan
						Baseline 2025	Target 2045	
				7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	67,77	75,00	
3	Terwujudnya Perlindungan Sosial Yang Adaptif	3	Perlindungan Sosial yang Adaptif	8	Tingkat Kemiskinan (%)	8,90-9,40	0,21 – 0,71	
				9	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	32,79	90,14	
				10	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	20	70	
4	Terwujudnya Kemajuan Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	4	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	11	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	30,60 - 30,66	36,27 - 36,88	
				12	Pengembangan Pariwisata:			
					a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	5,93	9,93	
					b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel berbintang) (ribu orang)*	238,70	716,10	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan		Target		Ket-erangan
					Baseline 2025	Target 2045	
			13	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional (%)	23,28	18,77	
			14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN			
				a. Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level provinsi (%)	11,94	14,00	
				b. Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level provinsi (%)	11,44	18,80	
				c. Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	2,91	8,21	
				d. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	1,28	6,02	
				e. *Return on Aset* (ROA) BUMD (%)	2,88	5,74	
			15	a. Tingkat Pengangguran Terbuka	3,90 - 4,49	1,73 - 2,74	
				b. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	37	80	
			16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	60,22	74,50	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan		Indikator Utama Pembangunan		Target		Ket-erangan
						Baseline 2025	Target 2045	
				17	Tingkat Penguasaan IPTEK			
					Indeks Inovasi Daerah	73	80,3	
5	Terwujudnya Penerapan Ekonomi Hijau	5	Penerapan Ekonomi Hijau	18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau			
					a. Indeks Ekonomi Hijau	66,09	88,38	
					b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	17,10	63,61	
6	Terwujudnya Transformasi Digital	6	Transformasi Digital	19	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6,1	7,8	
7	Terwujudnya Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	20	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	7,51	4,87	
				21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	27,62	23,53	
				22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	15,5	23,09	
8	Terwujudnya Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	8	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	23	Kota dan desa maju, inklusif, dan berkelanjutan			
					a. Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)	6,89 WM Surabaya (terdiri dari Kabupaten Gresik,	7,60 WM Surabaya (terdiri dari Kabupaten	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan		Indikator Utama Pembangunan		Target		Ket-erangan
						Baseline 2025	Target 2045	
						Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Lamongan)	Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Lamongan)	
					b. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	73,73	100	
					c. Persentase Desa Mandiri (%)	9,25	29,84	
9	Terwujudnya Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	9	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	24	Indeks Reformasi Hukum	70	100	
				25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4,26	5,00	
				26	Indeks Pelayanan Publik	4,43	5,00	
				27	Indeks Integritas Pemerintah Prov. Jawa Timur	78,90	95,05	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan		Indikator Utama Pembangunan		Target		Ket-erangan
						Baseline 2025	Target 2045	
10	Terwujudnya Stabilitas, Demokrasi dan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Daerah	10	Stabilitas, Demokrasi dan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Daerah	28	Persentase Penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	90	100	
				29	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	65,95	83,33	
				30	Indeks Demokrasi Indonesia	Tinggi	Tinggi	
11	Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	11	Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	31	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB (%)	1,06	1,20	
				32	Tingkat Inflasi (%)	1,5 - 3,5	1,0 - 3,0	
				33	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan			
					a. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	25,49	83,70	
					b. Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,17	1,53	
					c. Nilai Transaksi Saham Per Provinsi	9.231.744,24	122.410.242,52	
					d. Total Kredit/PDRB (%)	20,5	76,6	
				34	Inklusi Keuangan (%)	98,39	99,14	
12		12	Daya saing Investasi	35	Realisasi Investasi	148,84 triliun	185 triliun	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan		Indikator Utama Pembangunan		Target		Ket-erangan
						Baseline 2025	Target 2045	
	Terwujudnya Daya saing Investasi			36	ICOR	5,50	4,3	
13	Terwujudnya Masyarakat Beragama Maslahat, dan Berkebudayaan Maju	13	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	37	Indeks Pembangunan Ke-budayaan (IPK)	60,67 - 60,72	70,67 - 71,05	
				38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	78,28 - 78,35	85,52 - 86,34	
14	Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif	14	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif	39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	72,29 - 72,30	77,50 - 77,53	
				40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,402 - 0,401	0,189 - 0,178	
15	Terwujudnya Ling-kungan Hidup Berkualitas	15	Lingkungan Hidup Berkualitas	41	Indeks Pengelolaan Keane-karagaman Hayati	0,519	0,610	
				42	Kualitas Lingkungan Hidup			
					a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,17	78,75	
					b. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	10,44	85	
					- Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	12	90	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan		Indikator Utama Pembangunan		Target		Ket-erangan
						Baseline 2025	Target 2045	
					- Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	31	100	
16	Terwujudnya Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	16	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	43	Ketahanan Energi, Air, dan Pangan			
					a. Ketahanan Energi			
					- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	1.100	3.740	
					- Intensitas energi primer (SBM/Rp milyar)*	210	130	
					b. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment*) (%)	7,26	0,43	
					c. Ketahanan Air			
					- Kapasitas Air Baku (m3/detik)	2,10	49,85	
					- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	39,61	100,00	
17		17		44	Indeks Risiko Bencana (IRB)	110,93	94,47 - 80,34	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan		Target		Ket-erangan
					Baseline 2025	Target 2045	
	Terwujudnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	45	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)			
				a. Kumulatif	5,25	30,46	
				b. Tahunan	10,02	70,59	

BAB VI
PENUTUP

Sebagai upaya untuk mengantisipasi kekosongan regulasi yang mengatur saat terjadinya transisi dari berakhirnya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 ini dan petunjuk umum pelaksanaannya, maka perlu dirumuskan Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan. Secara detail muatan Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 sebagaimana diuraikan dalam penjelasan berikut ini:

6.1. Pedoman Transisi

Secara umum, Pedoman Transisi memuat petunjuk mengenai berbagai hal yang perlu dilakukan pada saat masa transisi dokumen perencanaan pembangunan. Hal ini merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan dokumen pada saat masa berlaku dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 ini berakhir. Berbagai hal yang perlu diatur antara lain sebagai berikut:

1. Berbagai permasalahan pembangunan yang belum terselesaikan pada akhir periode RPJPD 2025-2045, akan diakomodasi menjadi permasalahan pembangunan dalam RPJPD periode selanjutnya, agar dapat terus ditanggulangi melalui Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok dokumen perencanaan jangka Panjang yang akan datang.
2. Indikator Sasaran Pokok RPJPD merupakan alat ukur yang menandai peningkatan kesejahteraan/taraf hidup berbagai aspek pembangunan. Terkait dengan hal tersebut, jika karena suatu hal terjadi perubahan Indikator Sasaran Pokok, tetap dapat dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika yang terjadi, tetapi lingkup aspek/cakupan pembangunannya harus tetap dipertahankan.
3. Berbagai target Indikator Sasaran Pokok yang belum tercapai pada periode RPJPD 2025-2045 akan dilakukan penyesuaian target pada periode RPJPD 2046-2065.
4. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur pada masa transisi periode Tahun 2045- 2050 yang merupakan tahun pertama RPJPD periode 2045-2065 berfungsi untuk menjembatani agar Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Pembangunan berjalan secara berkelanjutan.

6.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah Pelaksanaan bertujuan untuk menciptakan petunjuk umum pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi lintas Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan arah kebijakan RPJPD secara efektif dan efisien. Koordinasi, sinkronisasi dan integrasi tersebut bertujuan untuk mengelola sumber daya pembangunan secara optimal serta dapat dilakukan pembagian peran secara tepat agar mencapai tujuan pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan. Adapun Kaidah Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah pengampu urusan Penunjang Perencanaan Daerah mengkoordinasi seluruh Perangkat Daerah (PD) atau unit kerja yang ada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, agar memperhatikan Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Pembangunan lima tahunan sebagai dasar dalam

penyusunan RPJMD pada periode berkenaan yang ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

2. Perumusan Visi, Misi dan Arah Kebijakan RPJMD selama periode perencanan Tahun 2025-2045 harus mengacu dan selaras dengan Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045.
3. Prinsip pengarusutamaan gender untuk mewujudkan kesetaraan gender sebagai strategi pembangunan berkelanjutan dan hak akses yang sama terhadap sumber daya, kesempatan, dan layanan publik untuk mencapai inklusi sosial.
4. Target Pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam Target Indikator Sasaran Pokok RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 menjadi acuan dalam penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) dokumen RPJMD pada periode berkenaan.
5. Sebagai upaya memastikan pencapaian target RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045, Perangkat Daerah pengampu perencanaan harus melaksanakan pengendalian dan evaluasi berdasarkan regulasi yang berlaku, untuk menghadapi perubahan pada lingkungan internal maupun eksternal.
6. Apabila terjadi perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, maka penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang baru dan memastikan seluruh urusan telah tertangani dengan baik.
7. Konsistensi antara perencanaan dan pendanaan diperlukan agar tercapai perencanaan yang berkualitas, kesesuaian antara pelaksanaan pembangunan dengan dokumen perencanaan, serta ketersediaan pendanaan atas pembangunan yang telah direncanakan secara optimal sehingga tercapai tujuan pembangunan secara berkelanjutan.

6.3. Komunikasi Publik

Komunikasi publik RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 berprinsip pada pembangunan yang berkualitas dan merata, dengan melibatkan para pemangku kepentingan utama yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota, Akademisi, dan Masyarakat. Komunikasi kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan melalui musyawarah perencananaan pembangunan nasional, musyawarah perencanaan pembangunan provinsi, dan musyawarah perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota, serta dalam forum dan rapat koordinasi lainnya sehingga terjalin sinergi pemerintah pusat dan pemerintah provinsi serta pemerintah Kabupaten/Kota yang baik. Selanjutnya, komunikasi kepada masyarakat umum termasuk swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, pemuda, dan kelompok rentan, seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas dan lansia dilakukan melalui berbagai metode komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan dengan memberikan masukan, kritik, atau dukungan

6.4. Pengendalian dan Evaluasi

Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dokumen RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 melalui kegiatan pemantauan, evaluasi dan manajemen risiko yang dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen RPJPD Provinsi dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan perencanaan melalui pengendalian jangka menengah dan jangka pendek yang hasilnya disampaikan kepada Gubernur. Berdasarkan tahapan pelaksanaannya, ruang lingkup pengendalian terbagi menjadi dua bagian.

1. Pengendalian perencanaan. Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan untuk memastikan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan. Pengendalian ini berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.
   Pengendalian jangka menengah mencakup:
   a. Penjabaran perencanaan RPJPD Provinsi ke dokumen RPJMD Provinsi, RPJMD Provinsi ke dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah;
   b. Identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.
   Pengendalian jangka pendek mencakup :
   a. Penjabaran perencanaan RPJMD Provinsi ke dokumen RKPD Provinsi, RKPD Provinsi ke dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi;
   b. Identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya
2. Pengendalian pelaksanaan. Pengendalian pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai rencana yang telah ditetapkan.
   Pemantauan dan Evaluasi mencakup:
   a. Pemantauan mitigasi risiko pembangunan;
   b. Evaluasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah; dan
   c. Evaluasi pencapaian kinerja utama pembangunan daerah

Pengendalian pembangunan perlu didukung dengan harmonisasi regulasi agar pelaksanaannya berjalan dengan efektif. Harmonisasi regulasi yaitu menyinergikan regulasi pemantauan, pengendalian, evaluasi dan manajemen kinerja yang bertujuan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan pengendalian dengan kinerja perangkat daerah terkait. Untuk mewujudkan pengendalian yang komprehensif diperlukan pengoordinasian pengendalian lintas dan internal perangkat daerah.

6.5. Mekanisme Perubahan

Dokumen perencanaan yang adaptif memerlukan ruang penyesuaian atas faktor yang tidak dapat dikendalikan, RPJPD Provinsi dapat ditinjau kembali untuk dilakukan perubahan setiap 5 (lima) tahun, dengan ketentuan:

1. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD Provinsi; dan
2. Terjadi perubahan yang mendasar, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD Provinsi tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD Provinsi kurang dari 7 (tujuh) tahun.

6.6. Pembiayaan Pembangunan

Upaya mewujudkan Visi “Jawa Timur Berakhlak, Maju, Mendunia dan Berkelanjutan”, memerlukan kapasitas pembiayaan yang memadai. Peningkatan kapasitas pembiayaan dilakukan melalui optimalisasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga terwujud kemandirian fiskal daerah.

Di samping optimalisasi PAD, pembangunan pada RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 juga diharapkan didukung oleh sumber pembiayaan APBN, APBD, BUMN, BUMD, Swasta, Filantropi, Lembaga Donor, serta sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Dengan berbagai sumber pembiayaan pembangunan tersebut, alokasi belanja daerah dilakukan secara efektif dan efisien dengan memprioritaskan program pembangunan berdampak, mengatasi permasalahan dan isu strategis pembangunan, sehingga terwujud Visi Jawa Timur 2045.

Pj. GUBERNUR JAWA TIMUR,

ADHY KARYONO

PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TIMUR

bappeda.jatimprov.go.id Bappeda Jatim @bappedajatim